



**KONTRIBUSI ORGANISASI KEPEMUDAAN AMPI DALAM
PENGUATAN BASIS MASSA PARTAI GOLKAR DI JAWA
TENGAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan**

**Oleh:
Ulul Mukmin
NIM 3301411135**

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2015**

Persetujuan Pembimbing

Skripsi ini telah disetujui pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian
Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Unnes pada:

Hari : Senin

Tanggal : 24 Agustus 2015

Menyetujui,

Pembimbing I



Puji Lestari S.Pd., M.Si

NIP 197707152001122008

Pembimbing II

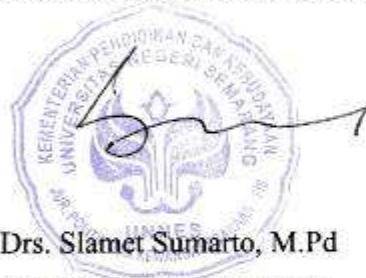


Drs. Ngabiyanto, M.Si

NIP 196501031990021001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan



Drs. Slamet Sumarto, M.Pd

NIP 196101271986011001

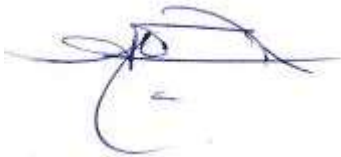
Pengesahan Kelulusan

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 26 Agustus 2015

Penguji I



Dr. Eko Handoyo, M.Si
NIP 19640608198803001

Penguji II



Puji Lestari S.Pd., M.Si
NIP 197707152001122008

Penguji III



Drs. Ngabiyanto, M.Si
NIP 196501031990021001

Mengetahui,
Dekan,



Dr. Subagyo, M. Pd.
NIP. 195108081980031003

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini adalah hasil karya sendiri bukan hasil karya orang lain baik sebagian maupun seluruhnya. Temuan hasil penelitian atau teori yang tertulis melalui rujukan atau kutipan dalam skripsi ini telah memenuhi sesuai dengan kode etik ilmiah.

Semarang, 26 Agustus 2015

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ulul Mukmin', written over a horizontal line.

Ulul Mukmin

NIM 3301411135

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- *“Hidup adalah perjuangan dan perjuangan butuh pengorbanan” (Penulis)*
- *“Apabila dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut tidak akan bertemunya dengan kemajuan selangkahpun” (Bung Karno (1901-1970)-Proklamator RI)*
- *“Aku rela dipenjara dimana saja asalkan bersama buku , karena dengan buku aku merasa bebas”. (Bung Hatta (1902-1980-Proklamator)- Saat dibuang di Boven Digul)*
- *“Mendiamkan kesalahan adalah sebuah kejahatan maka lebih baik diasingkan dari pada menyerah terhadap kemunafikan”. (Soe Hok Gie (1942-1969)-Aktivis Mahasiswa)*

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk:

- *Almarhumah Ibu tercinta Khasanah Binti Tarmidzi dan Almarhum Ayah tercinta Harun Bin Syafii yang selalu memberikan doa yang selalu menyayangi, menguatkan dan meridhoi setiap langkah putranya ini.*
- *Kaka ku yang tersayang Kak Nur Rohman, Kak Zahro, Kak Muhidin Hasan, Kak Abdul Kohar.*
- *Spesial rasa sayang Almarhum Syarovi bin Sudrajat yang telah banyak menghabiskan waktu bersama dan tak sempat melihatku lulus sarjana karena Allah SWT memanggilku lebih dahulu dengan indah.*
- *Para pejuang laskar ureng-ureng Mas Ikkal, Mas Patih, Mas Ozy, Mas Ali Puji.*
- *Adik ideologis Erman Istanto, Indra Wahyu Laksono dan Wahyu Adi Pamungkas.*
- *Pasukan HIMA PKn 2013, BEM FIS 2015 dan Kabinet Gelora Perubahan BEM KM Unnes 2015.*

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, kasih, kebesaran dan karunianya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini telah menuntun saya melakukan penelitian dengan segenap tenaga dan pikiran, sehingga skripsi ini saya yakini sebagai takdir yang akan mengantarkan pada kehidupan hari esok yang lebih baik.

Dalam mengerjakan skripsi ini banyak orang-orang yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor universitas Negeri Semarang
2. Dr. Subagyo, M.Pd, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang
3. Puji Lestari, S.Pd., M.Si, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
4. Drs. Ngabiyanto, M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan sumbangsih pengetahuan dalam proses bimbingan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen di lingkungan Jurusan Politik dan Kewarganegaraan yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan selama menjalankan kuliah.
6. Kedua orang tua saya Ayah Harun (Alm) dan Ibu Khasanah (Almh) , kaka Siti Zahro, kaka Muhidin Hasan, kaka Abdul Kohar. Terimakasih atas dukungan kalian untuk bergelut menuntut ilmu di perguruan tinggi.
7. Sahabat sejawat laskar ureng-ureng Fatih Alwi, Akhmad Fauzi, Ali Puji, Iqbal, Zaenul, Ghufron, Saeful Aziz, yang memotivasi penulis untuk menjadi orang hebat dengan pendidikan.

8. Khikmah Rizqi Awaliyah, sahabat sekaligus teman hidup penulis yang senantiasa menjadi orang yang memotivasi setiap waktu. Semoga Tuhan mengabulkan doa-doa kita.
9. Sahabat sejawat sekaligus *Bost* 11, Hendi Guntur Saputra, Riski Heri Arfiyanto, Ulfa Nur Rahardini, Saeful Febrian yang telah memberikan arti sebuah persahabatan dalam bingkai putih abu-abu yang masih bertahan sampai saat ini.
10. Keluarga BEM FIS 2012, HIMA PKn 2013, BEM FIS 2014, BEM KM 2015 dan sahabat sejawat program studi PPKn angkatan 2011
11. Pendamping penulis ketika mendapat amanah memimpin HIMA PKn 2013 dan BEM FIS 2014 Bapak Andi Suhardiyanto, S.Pd., M.Si. Terimakasih atas segala nasehat, bimbingan dan kesabarannya.
12. Para Informan dari DPD AMPI Jawa Tengah, DPD Partai Golkar Jawa Tengah.
13. Dan seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil.

Pada akhirnya skripsi ini tidak hanya dimaknai sebagai syarat kelulusan semata, tapi sebuah pengalaman dan cerita hidup luar biasa. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dibidang sosial politik.

Semarang, Agustus 2015

Penulis

SARI

Mukmin, Ulul. 2015. *Kontribusi Organisasi Kepemudaan AMPI dalam Penguatan Basis Massa Partai Golkar di Jawa Tengah*. Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Puji Lestari, S.Pd., M.Si. Pembimbing II Drs. Ngabiyanto, M.Si. 140 halaman.

Kata Kunci : Partai Golkar, AMPI, Basis Massa

Runtuhnya kekuasaan orde baru yang didominasi oleh kekuatan Golkar menjadi momentum penting bagi kehidupan perpolitikan nasional. Tranmutasi Golkar menjadi partai politik merupakan langkah politik yang tepat untuk terus mengikuti kontestasi politik di Indonesia, sehingga Partai Golkar terus berusaha memperbaiki diri untuk menciptakan citra positif di masyarakat. Partai Golkar sangat menyadari masih memiliki basis massa yang cukup kuat disemua lapisan masyarakat, dari semua kalangan ekonomi, basis agama dan basis lainnya karena latar belakangnya partai ini sebagai warisan orde baru. Maka harus ada upaya yang masif untuk menjaga eksistensi massa partai tersebut. Kehadiran AMPI pada awal didirikannya sebagai pemuda Partai Golkar bukan sebuah rekayasa untuk kepentingan jangka pendek partai. Tetapi AMPI merupakan perwujudan tekad Partai Golkar untuk berada dalam kehidupan kepemudaan dan masyarakat Indonesia guna merealisasikan misi perjuangan Partai Golkar demi kemajuan dan kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Hubungan Politik AMPI dengan Partai Golkar?, 2) Bagaimana Kontribusi AMPI terhadap Upaya Penguatan Basis Massa Partai Golkar di Jawa Tengah?, 3) Bagaimana Hambatan AMPI dalam Upaya Penguatan Basis Massa Partai Golkar di Jawa Tengah?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan penelitian di DPD AMPI Jawa Tengah, DPD Partai Golkar Jawa Tengah yang beralamat di jalan Kyai Shaleh nomor 1 Kota Semarang. Fokus penelitian ini yaitu, upaya kontribusi AMPI Jawa Tengah dalam penguatan basis massa Partai Golkar di Jawa Tengah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dengan model analisis kualitatif dengan model analisis interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa AMPI merupakan organisasi yang berbeda secara struktural dengan Partai Golkar. AMPI Jawa Tengah merupakan organisasi kepemudaan yang berdiri secara independen dan mandiri tetapi memiliki afiliasi politik dengan Partai Golkar. Upaya kontribusi AMPI melalui berbagai kegiatan yang telah dirancang selama periode kepengurusan dengan menjangkau elemen masyarakat secara umum maupun pemuda secara khusus. Bidang kegiatan-kegiatan tersebut meliputi kaderisasi internal, penguatan internal, pelatihan kader dan pemuda secara umum, kegiatan kerokhanian, konsolidasi wilayah dan pendidikan politik serta serap aspirasi. Penguatan basis massa tersebut dikuatkan dengan ditandai adanya kader yang militan dan tangguh, pelembagaan Partai Golkar dan secara pragmatis meningkatnya suara Partai

Golkar dalam Pemilu. Hambatan yang dihadapi dalam upaya penguatan tersebut yaitu keaktifan anggota atau kader AMPI, keterbatasan anggaran serta pragmatismenya sikap masyarakat yang telah terjebak dalam pola pikir kapitalis.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya kontribusi AMPI terhadap penguatan basis massa Partai Golkar di Jawa Tengah telah berjalan dengan baik dengan menciptakan kader yang militan, pelebagaan Partai Golkar di Jawa Tengah dan peningkatan suara Partai Golkar. Saran yang penulis sampaikan agar upaya kontribusi AMPI terhadap penguatan basis massa Partai Golkar dapat dilaksanakan secara sistematis dan teragendakan dengan segala pembiayaan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
SARI	vi
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Batasan Istilah	12
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Organisasi Kepemudaan	16
B. Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI).....	28
C. Basis Massa.....	41
D. Penguatan Basis Massa.....	54
E. Partai Politik.....	59

F. Fungsi Partai Politik	64
G. Klasifikasi Partai Politik	66
H. Hubungan Partai Politik dengan Masyarakat.....	69
I. Partai Golongan Karya (Golkar)	74
J. Kerangka Pemikiran.....	86
BAB III METODE PENELITIAN	89
A. Jenis Penelitian	89
B. Fokus Penelitian.....	90
C. Lokasi Dan Waktu Penelitian	91
D. Sumber Data	91
E. Teknik Pengumpulan Data	92
F. Teknik Analisis Data	95
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	97
A. Hasil Penelitian	97
1. Gambaran Umum Subjek Penelitian	97
a. Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Jawa Tengah. 97	
2. Hubungan Politik AMPI dengan Partai Golkar di Jawa Tengah	100
3. Kontribusi AMPI terhadap Upaya Penguatan Basis Massa Partai Golkar di Jawa Tengah	106
4. Hambatan AMPI terhadap Upaya Penguatan Basis Massa Partai Golkar di Jawa Tengah	117
B. Pembahasan.....	121
1. Hubungan Politik AMPI dengan Partai Golkar di Jawa Tengah	121

2. Kontribusi AMPI terhadap Upaya Penguatan Basis Massa Partai	
Golkar di Jawa Tengah	126
3. Hambatan AMPI terhadap Upaya Penguatan Basis Massa Partai	
Golkar di Jawa Tengah	136
BAB V PENUTUP.....	140
A. Kesimpulan	140
B. Saran.....	141
DAFTAR PUSTAKA	142
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Daftar Perolehan Suara Partai Golkar dari Setiap Pemilu Orde Baru	3
Tabel 3.1 Rentang Waktu Penelitian.....	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Hubungan Partai Politik dengan Pemilih	74
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Penelitian	88
Gambar 3.2. Model Analisis Data Miles dan Huberman	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa reformasi telah dimulai sejak tahun 1998 ketika rezim orde baru turun dari kekuasaan yang telah bertahun-tahun lamanya. Kejadian ini telah membuka kran-kran baru dalam dinamika perpolitikan nasional berupa kebebasan berdemokrasi dalam kehidupan politik untuk memperoleh kekuasaan secara terbuka melalui pertarungan politik dalam sistem pemilihan umum. Dengan adanya pertarungan politik yang terbuka membuka harapan baru dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Kompetisi politik merupakan sebuah langkah prosedural untuk memperoleh kekuasaan untuk mengisi jabatan-jabatan publik baik di lembaga eksekutif maupun legislatif. Dalam kontesetasi politik menjadi keniscayaan bahwa partai politik menjadi kendaraan politik untuk memperoleh kekuasaan tersebut.

Pasca runtuhnya orde baru secara *de jure* Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 telah menjadi dasar terbentuknya partai politik yang baru, setelah berpuluh-puluh tahun terkungkung dalam sandra politik yang berkepanjangan akibat adanya pembatasan jumlah partai politik. Euforia politik pada masa itu diwujudkan melalui pendirian partai politik yang jumlahnya sangat banyak. Dalam Catatan Daniel Dakidae dalam buku Litbang Kompas (2003:3) dikemukakan ada ratusan lebih bahkan sembilan ratusan partai politik yang terbentuk yang terdaftar, dan diakui secara hukum atau terbentuk hanya untuk memuaskan luapan psiko-politik

yang tidak bisa dibendung, walaupun pada pemilihan umum tahun 1999 tercatat hanya ada 48 partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum

Transisi demokrasi dari era orde baru ke era reformasi merupakan sebuah peluang bagi para aktor politik. Orde baru yang telah berkuasa selama tiga puluh dua tahun menjadi massa tertutupnya kompetisi politik secara terbuka. Undang-undang Nomor 3 tahun 1973 tentang Partai Politik dan Golkar menjadi langkah nyata dalam penyempitan kehidupan berdemokrasi. Dalam Undang-undang tersebut hanya ada dua partai politik dan satu golongan karya yang boleh mengikuti pemilihan umum. Golongan Karya walaupun notabene secara substansial adalah partai politik, tetapi organisasi ini tidak mau disebut partai politik. Golongan Karya merupakan penyokong kuat pemerintahan pada masa itu.

Penelitian Boileau (1983) dalam Akbar Tandjung (2007:15) mengungkapkan bahwa keberadaan Golkar merupakan kelompok politik fungsional yang ada di Indonesia. Sebagai masyarakat yang sedang mengalami transisi, nilai modern dan tradisional berjalan beriringan, karenanya menurut Boileau agar organisasi dapat sukses kedua perangkat tersebut harus ada dalam organisasi tersebut. Golkar sendiri dirancang berdasarkan kekuatan alternatif yang tidak berdasarkan ideologi tetapi berorientasi pada program. Karena adanya pelembagaan “dwi fungsi” ABRI dan Birokrasi yang dilembagakan, akibatnya Golkar menjadi sangat kuat sehingga mampu memenangi setiap Pemilu. Hal ini juga dikuatkan oleh pendapat Affan Gaffar (1992) yang merujuk pada pendapat Giovani Sartori (1976) dalam tulisan Akbar Tandjung (2007:16) bahwa sistem kepartaian dengan Golkar yang sangat kuat sebagai sistem kepartaian yang

hegemonik. Maksudnya adalah sistem kepartaian yang tidak membolehkan kompetisi formal dalam kekuasaan, partai politik lain boleh hidup tetapi menjadi kelas kedua atau partai politik yang cuma terdaftar tetapi marginal perannya. Dengan demikian melalui sistem politik yang hegemonik dan dukungan kuat pemerintah yang represif Golkar menjadi eksis sebagai kekuatan politik utama.

Ridwan Saidi (1993:60) mengambil kesimpulan dalam bukunya Golkar Pasca Pemilu 1992, bahwa pada awal didirikannya Golkar merupakan alternatif dalam bentuk pengelompokan baru yang melepaskan ikatan primordial sebagai sarana penghimpun. Oleh karena itu, Golkar memiliki strategi dengan cara mengembangkan pola komunikasi teknokratik dan elitis. Golkar tampil mengaktualisasikan diri sebagai “golongan karya” yang berbeda dengan “golongan politik” yang dipresentasikan oleh partai-partai politik. Hegemoni Golongan Karya begitu kuat sehingga setiap pemilihan umum era orde baru Golongan Karya selalu tampil menjadi pemenang. Berikut ini perolehan suara Golkar selama masa Pemilu orde baru :

Tabel 1.1. Daftar Perolehan Suara Partai Golkar dari Setiap Pemilu Orde Baru

No	Tahun Pemilu	Perolehan suara	Persentase (%)	Kursi
1	1971	34.348.673	62,80	236
2	1977	39.750.096	62,11	232
3	1982	48.334.724	64,34	242
4	1987	62.783.680	73,16	299
5	1992	66.559.331	68,10	282
6	1997	84.187.907	74,51	325

Sumber : Modul Pendidikan Pemilih KPU RI, diolah

Runtuhnya kekuasaan orde baru yang didominasi oleh kekuatan Golongan Karya menjadi momentum penting bagi kehidupan perpolitikan nasional. Masa orde baru yang mempraktekan kekuasaan tiranik dan despotik dengan mengkebiri hak-hak politik masyarakat telah berdampak pada Partai Golkar dewasa ini sebagai dampak dari ulah Golongan karya. Pada masa itu Golkar dijadikan alat untuk melegitimasi struktur kekuasaan orde baru sehingga ia lebih tampil sebagai *the electoral machine* dari pada sebuah partai yang berkuasa atau *the rulling party* (Umar Ibnu Alkhatab, 2009:2).

Kejadian ini berdampak pasca orde baru dimana kedudukan Partai Golkar sebagai instrumen politik untuk meraih kekuasaan sekaligus sebagai piranti kekuasaan tidak cukup untuk memadai karena tidak lagi akseptabel bagi masyarakat. Dalam kategori ini seperti yang diungkapkan Beetham dalam Ibnu Umar Alkhatab (2009:3) Partai Golkar mengalami delegitimasi politik yang luar biasa yang berkembang kearah mesin politik yang ilegal. Dalam keadaan yang demikian secara kalkulasi politik citra yang demikian buruk, sangat sulit mendapatkan kepercayaan kembali dalam tempo singkat.

Deklarasi Golongan Karya menjadi partai dilakukan untuk mengikuti pemilihan umum tahun 1999. Partai Golkar diyakini pada Pemilu 1999 diprediksi akan kehilangan banyak pendukung akibat kegagalan masa lalu yang telah mencoreng nama Golkar. Transmutasi Partai Golkar dari golongan fungsional menjadi partai politik tercermin dalam paradigma barunya, merupakan penyesuaian politik yang kreatif terhadap dinamika politik yang berubah dan berkembang.

Penyesuaian paradigma baru Partai Golkar menuai hasil maksimal pada Pemilu era reformasi. Pada pemilihan umum tahun 1999 Partai Golkar berhasil memperoleh suara yang cukup meyakinkan. Partai Golkar duduk di posisi kedua perolehan suara terbanyak yakni memperoleh 23.741.758 suara atau 22,44 persen. Pemilu tahun 2004 Partai Golkar memperoleh suara sebesar 24.461.104 atau 21,62%. Sedangkan tahun 2009 perolehan suara Partai Golkar menjadi 15.031.49 atau 14,45 %. Pada pemilu tahun 2014 Partai Golkar mampu duduk menjadi pemenang kedua suara terbanyak nasional dengan jumlah suara 18.681.471 suara atau sejumlah 14,75 %. Dari data tersebut kita dapat melihat betapa hegemoni Partai Golkar yang masih sangat terasa di era reformasi. Dari setiap hajatan pemilu Partai Golkar mampu meraup suara di atas sepuluh persen. Tren setelah reformasi memang perolehan suara Partai Golkar menurun tetapi secara umum eksistensi partai ini masih kuat di kalangan masyarakat.

Secara apriori dapat dikemukakan bahwa masih eksistensinya Partai Golkar dalam kontelasi politik nasional diantaranya disebabkan oleh kegagalan mahasiswa mengubur secara tuntas elemen-elemen orde baru setelah kejatuhannya. Pandangan Ibnu Umar Alkhatib (2009:6) menyebutkan bahwa gerakan mahasiswa terlalu cepat mengalami kepuasan setelah menumbangkan pemimpin orde baru sehingga mesin politik yang digunakan orde baru, yaitu Golkar sebelum menjadi partai politik, luput dari perhatiannya. Golkar dengan jeli melihat momentum tersebut untuk melakukan transmudasi dari golongan fungsional menjadi sebuah partai politik yang keberadaan saat ini sangat diperhitungkan oleh lawan politiknya.

Pemilihan umum yang telah diselenggarakan secara demokratis sejak era reformasi telah menjadi seleksi alam bagi partai politik. Terbukti sampai sekarang hanya ada beberapa partai yang mampu bertahan untuk mengisi lembaga legislatif maupun eksekutif. Adanya aturan *electoral treshold* menjadi langkah nyata mereduksinya banyak partai kedalam beberapa partai. Dalam beberapa pemilihan umum yang telah digelar, Partai Golkar mampu menduduki peringkat 5 besar mulai pemilihan umum tahun 1971 sampai pemilu tahun 2014

Menyadari bahwa Partai Golkar memiliki basis massa yang cukup kuat disemua lapisan masyarakat, dari semua kalangan ekonomi, basis agama dan basis lainnya karena latar belakangnya partai ini sebagai warisan orde baru. Maka harus ada upaya yang masif untuk menjaga eksistensi massa partai tersebut. Basis massa partai yang jelas harus menjadi landasan Golkar untuk menentukan arah kebijakan di internal partai maupun melalui keputusan-keputusan politik yang dibuat oleh kader partai yang duduk dilembaga legislatif maupun eksekutif. Untuk menjaga eksistensi tersebut perlu dibangun sebuah sistem di internal partai untuk menjalankan fungsi regenerasi sehingga keberlangsungan partai dapat terus berjalan, sehingga partai politik memiliki tugas yang sangat penting yaitu melakukan kaderisasi.

Kaderisasi adalah tulang punggung partai politik. Tegak bungkuknya partai politik tergantung pada kekuatan kaderisasi partai politik (Fayakhun, 2014:26). Dalam perpolitikan Indonesia sulit sekali menemukan partai politik yang memiliki kultur kaderisasi yang berjalan secara periodik dari generasi ke generasi. Sehingga yang kerap terjadi adalah krisis sumber daya manusia yang

berkualitas. Akibatnya kepemimpinan partai politik didominasi oleh wajah-wajah lama, sehingga kepekaan membaca realitas politik yang baru sangat lemah. Dampaknya, partai politik menjadi berjarak dengan dinamika politik pemilih.

Persoalan kaderisasi menjadi isu yang penting karena di dalam partai perlu digodok calon-calon pemimpin lokal maupun nasional yang memiliki visi dan misi yang visioner. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa Partai Golkar sebagai partai politik memiliki keniscayaan untuk melakukan kaderisasi agar roda organisasi partai dapat berjalan dengan baik. Saat ini Partai Golkar memiliki beberapa organisasi sayap partai yang berfungsi untuk menyokong calon-calon pengurus Partai Golkar yang memiliki visi kedepan. Secara organisatoris Partai Golkar didukung oleh beberapa organ pendukungnya. Diantaranya Sentra Organisasi Sosialis Karyawan Indonesia (SOSKI), Kosgoro 1957, Himpunan Wanita Karya (HWK), Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG), Al Hidayah, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) dan Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG). Dua organisasi terakhir ini adalah organisasi kepemudaan yang menyokong kader muda Golkar dalam proses rekrutmen dan kaderisasi.

Meminjam istilah sistem politik David Easton dalam Budi Winarno (2007:11) bahwa sistem politik melibatkan input, proses dan output. Begitu juga dalam proses kaderisasi yang dilakukan oleh organisasi kepemudaan partai politik. Inputnya berasal dari pemuda secara umum kemudian berproses dalam organisasi tersebut, kemudian output yang dihasilkan yaitu para kader muda partai, pemimpin muda masa depan. Jika kita mengaitkan dengan sistem ini maka proses regenerasi akan berjalan secara maksimal karena didasarkan pada

dukungan dan permintaan sehingga akan berpengaruh pada suara partai di akar rumput yaitu basis massa partai yang cukup loyal.

Kehadiran AMPI sebagai organisasi kepemudaan Partai Golkar pada awalnya bukan sebuah rekayasa untuk kepentingan jangka pendek partai. Tetapi AMPI merupakan perwujudan tekad Partai Golkar untuk berada dalam kehidupan kepemudaan dan masyarakat Indonesia guna merealisasikan misi perjuangan Partai Golkar demi kemajuan dan kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia. secara historis AMPI juga menjadi bagian yang sangat penting untuk mencapai visi partai, khususnya dalam melaksanakan catur sukses partai, terutama catur yang kedua, yakni sukses kaderisasi, yaitu dengan memperluas basis partai untuk menghasilkan sebanyak-banyaknya kader-kader baru sebagai produk sistem perkaderan yang akan dilaksanakan.

Organisasi kepemudaan AMPI menjawab harapan masyarakat adanya regenerasi politik khususnya kaum muda yang diharapkan masyarakat untuk menjadi pemimpin. Ini sejalan dari hasil survei Lembaga Suvei Indonesia (LSI) yang dilakukan pada 10-18 januari 2015 dimana hasilnya menunjukkan sebanyak 61,7 % responden berpendapat bahwa pemimpin muda akan lebih sesuai dengan tuntutan dan perkembangan bangsa kita. Bahkan mayoritas setuju bahwa bahwa partai politik sebaiknya dipimpin oleh generasi muda yaitu sebanyak 60 % dan sekitar 50 % setuju pemimpin muda akan lebih baik dari pada pemimpin tua (LSI. 2015:35).

Jika ditinjau lebih lanjut AMPI merupakan bagian dari kelompok penekan seperti yang diungkapkan Maurice Duverger (1984:136) kelompok penekan

massa berusaha mengumpulkan jumlah anggota, karena jumlah anggota merupakan sumber kekuatan mereka seperti gerakan pemuda, gerakan wanita. Pemahaman ini menjadi landasan berpikir bahwa AMPI merupakan gerakan kepemudaan yang memiliki tugas untuk mengumpulkan jumlah massa yang banyak dalam hal ini untuk menjadi bagian dari pemilih Partai Golkar.

Dilihat dari komposisi anggotanya Partai Golkar dapat dikategorikan sebagai partai massa yakni agar dapat memobilisasi jumlah massa sebanyak-banyaknya dari berbagai kelompok dan lapisan masyarakat. Salah satu massa yang ingin disaring Partai Golkar yaitu para pemuda yang memiliki jumlah cukup banyak dengan idealisme yang masih kental sehingga dapat bekerja keras untuk menyebarluaskan kepentingan partai dengan tujuan dapat memperoleh kekuasaan dengan cara yang elegan dan sistematis. Dalam hal ini AMPI mengemban tanggung jawab yang cukup besar untuk membesarkan Partai Golkar khususnya dalam penguatan dan perluasan basis massa.

Namun di sisi lain basis massa yang banyak harus diimbangi kader-kader yang berkualitas serta mumpuni untuk menjalankan roda organisasi, karena kader yang berkualitas merupakan sumber kekuatan utama. Untuk itu organisasi kepemudaan memiliki fungsi menyeleksi kader partai melalui kaderisasi yang berjenjang dan intensif, serta penegakan disiplin organisasi yang konsisten tanpa pandang bulu. Apabila kedua hal ini diterapkan maka akan lahir pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan dapat menarik simpati massa sehingga dapat dimobilisasi untuk kepentingan partai.

Penelitian yang dilakukan pasca runtuhnya orde baru yang dilakukan oleh Heriyandi Roni dalam Akbar Tandjung (2007:19) memfokuskan pada demokratisasi internal Golkar pasca orde baru. Disebutkan bahwa perubahan politik 1998 berimplikasi positif terutama pada bidang pengambilan keputusan. Dalam rangka mempertahankan diri, Golkar harus melakukan perubahan yang mendasar baik secara struktural maupun kultural sesuai dengan tuntutan reformasi. Eksistensi Partai Golkar sendiri tergantung pada kemampuan internal Partai Golkar dalam membangun citra baru Partai Golkar, salah satunya dengan mekanisme baru dalam proses rekrutmen pimpinannya. Untuk itu organisasi kepemudaan seyogyanya mampu berperan dalam membesarkan partai dengan berbagai cara. Organisasi kepemudaan AMPI menjadi jalan tengah dalam tanggung jawab merekrut para kader muda yang idealis dan menjadi penguat basis massa partai. Bagaimana kedua organisasi kepemudaan tersebut memberikan kontribusi nyata untuk Partai Golkar. Dengan berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk menuangkan dalam sebuah skripsi dengan judul *Kontribusi Organisasi Kepemudaan AMPI dalam Penguatan Basis Massa Partai Golkar di Jawa Tengah.*

B. Rumusan Masalah

Setelah memperoleh paparan latar belakang yang telah dikemukakan maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Hubungan Politik AMPI dengan Partai Golkar?
2. Bagaimana Kontribusi AMPI terhadap Upaya Penguatan Basis Massa Partai Golkar di Jawa Tengah?

3. Bagaimana Hambatan AMPI dalam Upaya Penguatan Basis Massa Partai Golkar di Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui hubungan politik AMPI dengan Partai Golkar
2. Mengetahui kontribusi AMPI terhadap Upaya Penguatan Basis Massa Partai Golkar di Jawa Tengah.
3. Mengetahui Hambatan AMPI dalam Upaya Penguatan Basis Massa Partai Golkar di Jawa Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoretis

Secara akademis penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk memperkaya ilmu pengetahuan di bidang ilmu politik dalam topik penguatan basis massa partai politik.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dilihat bagaimana kontribusi organisasi kepemudaan yang berafiliasi dengan partai politik, sehingga menjadi pertimbangan partai politik dan organisasi di bawahnya dalam menjalin komunikasi yang efektif dan efisien sehingga tujuan dan fungsi partai dapat tercapai secara maksimal.

E. Batasan Istilah

Dalam skripsi ini ada terdapat beberapa batasan istilah untuk memperjelas kata maksud yang hendak disampaikan yaitu.

1. Kontribusi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kontribusi diartikan sebagai sumbangan, lebih jauh penulis memahami bahwa sumbangan yang dimaksud adalah bagaimana seorang individu atau kelompok memberikan segala kemampuannya baik secara materil maupun non materil kepada institusinya yang menanunginya. Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisisensi dan efektivitas hidupnya. Hal ini dilakukan dengan cara menajamkan posisi perannya, sesuatu yang kemudian mejadi bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya (Anne Ahira:2012)

2. Organisasi Kepemudaan

Menurut Wiliam Scott organisasi merupakan sistem kegiatan-kegiatan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja bersama-sama, menuju kearah tujuan bersama di bawah satu kepemimpinan (dalam Kartini Kartono, 2011:7).

Sedangkan menurut Sondang P Siagian organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama, menuju kearah tujuan bersama, dan terikat secara ikatan formal dalam satu ikatan hierarki dimana terdapat selalu hubungan antara

seorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan (dalam Kartini Kartono, 2011:7).

Menurut Pasal 40 Undang-undang Nomor 40 tentang Kepemudaan bahwa organisasi kepemudaan adalah organisasi yang dibentuk oleh pemuda berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan, yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan organisasi kepemudaan menurut Kartini Kartono (2011:223) adalah wadah fungsional untuk mengembangkan potensi para pemuda. Organisasi Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) adalah organisasi kemasyarakatan kepemudaan Partai Golkar yang didirikan pada tanggal 28 Juni 1978 di Pandanaan Jawa Timur (<http://www.Golkarjateng.com/ormas-sayap/ampi>).

3. Penguatan Basis Massa

Menurut Rusadi Kantaprawira (1999:44-51) Massa berada dalam wilayah yang tidak resmi tetapi memiliki pengaruh yang sangat jelas dan signifikan bagi partai politik. Basis massa partai dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian seperti agama, suku, buruh. Menurut Fayakhun (2014:103-104) massa Partai Golkar dapat dikategorikan menjadi empat. Pertama, pemilih loyal Golkar yang tidak goyah oleh janji politik reformasi. Kedua, konstituen yang digerakan oleh sentimen *the politics of survival*. Ketiga, sebagian kelompok islam modernis dan yang keempat yaitu segmen pemilih dari kelas menengah kota, termasuk para profesional. Penguatan basis massa adalah upaya atau proses untuk menguatkan kuantitas dan kualitas massa dalam arti konstituen.

4. Partai Golkar

Partai Golkar adalah partai politik yang telah dideklarasikan sejak era reformasi setelah sebelumnya enggan disebut sebagai partai politik. Jauh sebelumnya Golongan Karya didirikan oleh Sekretariat Bersama (Sekber) pada 20 Oktober 1964. Pada masa pembentukannya Golkar tumbuh melalui Sekber Golkar yang beranggotakan 61 organisasi fungsional hingga kemudian berkembang menjadi 291 organisasi. Organisasi-organisasi tersebut kemudian dikelompokkan dalam tujuh kelompok induk organisasi (Kino) yaitu Kosgoro, SOKSI, MKGR, Kino Profesi, Ormas Hankam, Gakari, Gerakan pembangunan (Litbang Kompas, 2004:389).

Golkar memiliki ciri khas pada masa orde baru dimana ciri khas tersebut terdiri dari 4 hal utama yaitu : yang pertama dikenalnya istilah "sistem tiga jalur" (A ABRI, B Birokrasi, G GOLKAR), kedua, dominanya peranan Dewan Pembina, ketiga, pengambilan keputusan selalu dari atas (top down) dan keempat, sangat menghindari pemungutan suara (voting) untuk menentukan pimpinan organisasi di semua tingkatan atau dari Ketua Umum DPP sampai pada tingkatan kepengurusan terbawah.

Partai Golkar merupakan partai politik yang sangat melembaga di Indonesia. Partai Golkar baru adalah organisasi politik yang telah mengalami reformasi internal dan struktur melalui penyesuaian diri terhadap tuntutan reformasi. Paling tidak ada dua faktor penting yang amat memengaruhi pembaharuan dalam tubuh Golkar. Pertama, keinginan internal Partai Golkar dan kedua, adanya desakan eksternal. Karena Partai Golkar berada pada

lingkungan dimana perubahan-perubahan terjadi sejalan dengan tuntutan reformasi, maka desakan eksternal untuk reformasi tidak dapat dihindarkan. Sampai saat ini Partai Golkar tercatat selalu menjadi peserta pemilihan umum sejak pemilu tahun 1971 sampai pemilu terakhir tahun 2014.

Mengacu pada batasan istilah yang penulis sampaikan maka makna judul dari Kontribusi Organisasi Kepemudaan AMPI dalam Penguatan Basis Massa Partai Golkar di Jawa Tengah yaitu sebuah usaha atau upaya yang dilakukan oleh AMPI untuk memberikan kontribusi dalam proses penguatan basis massa Partai Golkar di Jawa Tengah melalui berbagai cara. Mengacu pada judul tersebut menjadi dasar pijakan penulis dalam melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini sehingga hasil penelitian yang diperoleh memiliki validitas data yang dapat dipertanggungjawabkan dengan ilmiah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Organisasi Kepemudaan

Organisasi menurut menurut Wiliam Scott merupakan sistem kegiatan-kegiatan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja bersama-sama, menuju kearah tujuan bersama di bawah satu kepemimpinan. (dalam Kartini Kartono, 2011:7). Sedangkan menurut Sondang P Siagian organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama, menuju kearah tujuan bersama, dan terikat secara ikatan formal dalam satu ikatan hierarki dimana terdapat selalu hubungan antara seorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan (dalam Kartini Kartono, 2011:7). Sedangkan organisasi kepemudaan menurut Kartini Kartono (2011:223) adalah wadah fungsional untuk mengembangkan potensi para pemuda. Menurut Pasal 40 Undang-undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan bahwa organisasi kepemudaan adalah organisasi yang dibentuk oleh pemuda berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan, yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Akan tetapi secara umum organisasi kepemudaan dapat dikategorikan sebagai organisasi kemasyarakatan sehingga diatur dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pasal 1, organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk masyarakat secara

sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Partai politik sebagai organisasi politik tentu bertujuan untuk menggalang massa yang banyak dengan harapan agar mendapatkan legitimasi kekuasaan. Dalam menjaga eksistensi suatu massa partai maka partai tersebut tidak dapat berjalan sepenuhnya menggunakan struktur organisasi partai yang dia memiliki. Untuk menanggulangi hal tersebut diperlukan sebuah “kaki tangan” partai untuk menjangkau masyarakat serta memperkuat eksistensi partai politik. Dalam hal ini partai politik dapat membentuk organisasi sayap atau organisasi massa yang berafiliasi dengan partai politik dengan jalur koordinasi yang jelas. Pembentukan suatu organisasi sayap tentu lebih mengkhususkan pada basis massa tertentu, misalnya berdasarkan kepemudaan, wanita, profesi dan sebagainya.

Membicarakan pemuda tentu sangat kompleks dari berbagai sudut pandang. Golongan yang dianggap memiliki kekuatan istimewa ini memiliki kelebihan yang begitu luar biasa. Ketika kita membahas permasalahan ini lekat sekali bahwa pemuda adalah sebuah simbol perubahan, harapan dan kemajuan. Pemuda memainkan peranan penting dalam gerakan pembangunan dan revolusi yang memiliki kekuatan sosial, kekuatan moral dan kekuatan politik. Konsep kaum muda secara teoritik pernah diungkapkan oleh Ben Anderson dalam Miftahudin (2004:12) yang membedakan pemuda Jawa kedalam empat fase yaitu masa kanak-kanak, fase muda, fase dewasa dan fase usia lanjut. Masa kanak-kanak dimulai sejak lahir dan berusia sekitar enam tahun. Setelah itu mereka harus menjalani ritual khitan dan setelah itu dianggap muda karena sudah harus lepas dari orang

tua. Selanjutnya mereka diharuskan menempa diri dengan mencari ilmu dan pengalaman hidup. Pada masa inilah seorang pemuda mengalami masa yang sulit dan berat, tetapi sekaligus sangat bermakna dalam pembentukan kepribadian dan kejiwaan.

Dalam buku yang sama Anderson (dalam Miftahudin, 2004:13) menulis pengertian pemuda ditentukan oleh masyarakat tradisional sebagai tahap tersendiri dalam garis busur kehidupan antara masa kanak-kanak dan dewasa. Sedangkan HAR Tilaar melihat konstruksi pemuda lebih melihat perpektif sosiologis dan historis dari pada perspektif demografis. Demikian juga Cliffort Geertz dalam Miftahudin (2004:13) dalam buku *The Religion of Java* menyatakan bahwa diantara kelompok-kelompok yang paling penting dalam perubahan sosial adalah kelompok pemuda. Perluasan pendidikan gaya barat yang relatif tiba-tiba di Indonesia, menurut Geertz telah melahirkan suatu “kebudayaan pemuda”, yang anggota-anggotanya ditandai dengan memiliki rasa kegelisahan yang mendalam, suatu ambivalensi yang tajam berhadapan dengan nilai-nilai jawa tradisional dan nasionalisme yang intens. Hadirnya kultur pemuda ditengah-tengah masyarakat dipandang Geertz sebagai nada optimisme sebagai kekuatan untuk menggantikan konflik antar pandangan.

Sebelum Indonesia merdeka, negara kita memiliki berbagai organisasi kepemudaan yang beranggotakan para pemuda-pemudi Indonesia baik yang bersifat nasional maupun kedaerahan. Berikut ini adalah daftar beberapa organisasi perkumpulan pemuda di Indonesia :

- 1) Budi Utomo / Boedi Oetomo

Budi Utomo berdiri pada tahun 1908 yang pada awal mula berdirinya merupakan organisasi pelajar yang ruang lingkupnya masih kedaerahan, namun pada perkembangannya berubah menjadi organisasi perkumpulan pemuda nasional.

2) Trikoro Dharmo / Tri Koro Dharmo

Trikoro Dharmo adalah sebuah perkumpulan pemuda yang berasal dari Jawa pada tahun 1915 di gedung kebangkitan nasional. Organisasi ini kemudian mengubah nama menjadi Jong Java pada kongres di Solo. Arti definisi dari tri koro dharmo adalah tiga tujuan mulia.

3) Jong Sumatra Bond (Persatuan Pemuda Sumatra)

Organisasi ini berdiri pada tahun 1917 yang memiliki tujuan untuk mempererat hubungan antar pelajar yang berasal dari Sumatera. Beberapa tokoh terkenal dari organisasi ini yaitu seperti M. Hatta dan M. Yamin.

4) Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia

Organisasi yang satu ini berdiri pada tahun 1925 yang diprakarsai oleh mahasiswa Jakarta dan Bandung dengan tujuan untuk kemerdekaan Indonesia.

5) Jong Indonesia

Perkumpulan pemuda dan pemudi ini didirikan pada tahun 1927 di Bandung di mana kemudian organisasi ini diubah menjadi Pemuda Indonesia untuk yang berjenis kelamin laki-laki dan Putri Indonesia bagi yang perempuan. Pemuda Indonesia membuat kongres di mana pada kongres yang kedua menghasilkan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928.

6) Indonesia Muda

Indonesia Muda adalah organisasi nasional yang lahir karena dorongan Sumpah Pemuda pada tahun 1928 sebagai peleburan banyak organisasi pemuda daerah.

7) Organisasi Perkumpulan Daerah

Setelah muncul Jong Java dan Jong Sumatra Bond, maka bermunculanlah organisasi lokal kedaerahan lain seperti Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Minahasa, dan lain sebagainya.

Sejarah telah mencatat bahwa perubahan bangsa ini banyak dipengaruhi oleh generasi pemuda termasuk gagasan penyelenggaraan kongres pemuda yang kemudian dikenal sebagai peristiwa sumpah pemuda. Hari sumpah pemuda menjadi sejarah dan juga sebuah bukti bahwa pemuda memiliki semangat yang tinggi dalam upaya memperbaiki negerinya. Puluhan tahun pemuda mengenang masa ini. Ikrar yang dilatar belakangi semangat perlawanan terhadap penjajahan ini adalah sejarah yang tak terlupakan (A.M. Fatwa, 2013:82).

Dalam bab yang lain A.M Fatwa (2013:90) menyatakan bahwa pemuda merupakan elemen penting dari perubahan yang terjadi di masyarakat. Bersama komponen bangsa lain mereka harus menunjukkan peran aktifnya. Dalam kondisi usia emas, pemuda memiliki kelebihan yang dapat memainkan peran untuk menjadi pelopor karena semangat dan kondisi yang sangat menunjang untuk berbuat yang lebih baik. Menjadi pelopor perubahan di masyarakat berarti mengedepankan inisiatif. Inisiatif tidak harus muncul dari pemikiran sendiri, tetapi merupakan hasil penyerapan ketika berinteraksi dengan lingkungannya.

Peran pemuda dan politik memiliki sejarah yang panjang dari pembentukan organisasi kepemudaan sampai pembentukan partai politik yang pada masa perjuangan kemerdekaan merupakan wadah untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dalam definisi yang sempit mahasiswa merupakan bagian dari pemuda Indonesia yang telah memiliki sejarah yang sangat panjang dari mulai era orde lama, era orde baru, dan era reformasi saat ini.

Sejarah keterlibatan mahasiswa dengan politik yaitu seperti dalam masa Demokrasi Liberal (1950-1959), seiring dengan penerapan sistem kepartaian yang majemuk saat itu, organisasi mahasiswa ekstra kampus kebanyakan merupakan organisasi di bawah partai-partai politik. Misalnya, GMKI Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, PMKRI Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia dengan Partai Katholik, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dekat dengan PNI, Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) dekat dengan PKI, Gerakan Mahasiswa Sosialis Indonesia (Gemsos) dengan PSI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) berafiliasi dengan Partai NU, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dengan Masyumi, dan lain-lain.

Dalam realitasnya kepemimpinan pemuda juga mengalami problematika. Muhammad Takdir Ilahi (2012:46) menyatakan bahwa krisis kepemimpinan yang dimaksud adalah tidak adanya pemimpin masa depan yang berorientasi global dan berjiwa revolusioner serta memiliki semangat kebangsaan yang berlipat ganda demi membangun negeri ini ke arah yang lebih menjanjikan. Tidak heran kalau pemuda dinantikan menjadi “juru penyelamat” bangsa dari segala keterpurukan dan kehancuran. Generasi tua yang diharapkan ternyata tidak mampu berbuat

banyak untuk memulihkan kondisi ekonomi yang sedang carut marut ini. Apa yang dikemukakan itu merupakan sebuah harapan sekaligus koreksi bagi generasi muda saat ini dimana pemuda mendatang merupakan generasi penerus yang diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan bagi perbaikan dan kemajuan bangsa.

Dalam buku ini juga Mohammad Takdir Ilahi (2012:48) menyatakan ada beberapa persoalan yang dihadapi pemuda sebagai tantangan yang sangat kompleks dan penuh dengan nuansa kebebasan. Pertama, lahirnya beragam organisasi kepemudaan yang ada di negeri ini sehingga memunculkan suatu perbedaan ideologi kebangsaan. Munculnya beragam organisasi kepemudaan, bukan menjadi jaminan ideal terciptanya suatu bangunan kebangsaan yang kukuh, malah justru akan semakin memperlebar jarak dan hubungan harmonis antar elemen-elemen pemuda. Kedua, perbedaan ideologi kader organisasi yang tidak tuntas. Persoalan ini mesti mengacu pada upaya pemberdayaan masing-masing individu yang berbeda ideologi. Maka, tak berlebihan kalau kita perlu menyiapkan kader untuk terjun langsung dalam membela dan memimpin masyarakat dengan kedalaman kompetensinya sehingga suara-suara pembelaan akan lebih berbobot. Ketiga, lambatnya regenerasi kepemimpinan. Persoalan ini sebenarnya terletak pada implikasi pada pola patronase dan senioritas organisasi kepemudaan sehingga pada gilirannya memunculkan sikap *introvert* dan perasaan minder dari generasi yang lebih muda karena memang tidak memiliki kesempatan dan ruang untuk berekspresi sesuai dengan kemampuannya yang dimiliki mereka.

Dalam buku ini juga Mohammad Takdir Ilahi (2012:50) mengemukakan beberapa hal terkait strategi dalam membangun pemuda yang berjiwa pemimpin masa depan dan juga pemuda yang visioner, berani, pantang menyerah, dan tak hirau dengan gemerlapnya kehidupan dan popularitas. Pertama, pemuda harus memiliki kepemimpinan intelektual dalam rangka membangun tradisi politik berbasis nilai-nilai dengan rumusan pengetahuan dasar untuk kepentingan nasional dengan kata lain kaum intelektual seperti kaum muda juga berupa untuk menghubungkan antara *upper discourse* dan *lower discourses*. Kedua, penanaman pendidikan pemuda secara rasional yang bersifat nasionalis, pluralis, dan strategis dalam pelbagai aspek kehidupan bangsa. Penanaman pendidikan kepemimpinan berupa pelatihan dan pengembangan kepada kaum muda untuk mematangkan kecakapan kepemimpinan yang lebih progresif dan profesional. Ketiga, membangun kematangan berpikir. Format kepemimpinan yang harus diwujudkan mestinya sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Catatan yang diberikan di atas membuktikan betapa berpengaruhnya pemuda dalam pembangunan bangsa untuk menjadi pemimpin masa depan. Kelompok-kelompok pemuda yang ada saat ini seyogyanya tidak terpecah-pecah karena perbedaan kelompok atas dasar ideologi, semuanya harus memahami bahwa pemuda Indonesia adalah harapan masa depan yang akan membangun negeri ini. Potensi-potensi itu kemudian ditangkap oleh beberapa partai politik untuk menguatkan posisi mereka dalam rangka membangun legitimasi pemuda, salah satu fungsi rekrutmen politik dengan cara membangun organisasi kepemudaan sehingga regenerasi dalam partai politik menjadi semakin signifikan.

Setelah memahami apa yang disampaikan maka dapat ditarik kesimpulan betapa gerakan pemuda memiliki entitas yang sangat penting. Bahkan pada saat ini setiap partai politik memiliki organisasi sayap ataupun organisasi masyarakat kepemudaan yang berafiliasi dengan partai politik. Pembentukan organisasi sayap atau ormas tersebut setelah berdiri tentu dapat menjadi wadah dalam menjaga eksistensi partai politik.

Kehidupan politik merupakan hal yang dinamis yang akan selalu berubah setiap waktu. Sebagai organisasi kepemudaan AMPI dituntut memainkan peran penting dalam menjawab masalah-masalah, tantangan dan kebutuhan Partai Golkar dalam usaha mendukung perjuangan Partai Golkar dengan meletakkan kegiatannya pada penggalangan massa kepemudaan nasional dan khususnya bergerak sebagai kekuatan yang mempunyai posisi strategis dalam melakukan kegiatan-kegiatan dengan semangat perjuangan. AMPI sebagai organisasi kemasyarakatan akan menjadi wadah untuk mensinergikan seluruh gerakan dan potensi pemuda dengan mengintegrasikan seluruh organisasi kepemudaan yang berada di lingkungan Partai Golkar. Apabila keberadaan organisasi kepemudaan ini dapat berjalan dengan baik maka basis massa partai akan dapat terpelihara. Untuk itu diperlukan sinergisitas antara partai politik dengan organisasi sayap ataupun organisasi kemasyarakatan partai di bawahnya dengan pola hubungan yang saling menguntungkan dan menguatkan satu sama lain.

Bila dikaitkan dengan teori kelembagaan yang dikemukakan oleh Samuel P Huntington dalam Tandjung (2007:22) yang mengatakan bahwa sebuah partai apabila ingin *survive* maka partai harus memiliki kelembagaan yang kuat.

Huntington mengukur tingkat pelebagaan politik dari adaptabilitas, kompleksitas, otonomi dan koherensi. Terkait dengan kemampuan adaptasi Huntington mengajukan beberapa kriteria. Pertama umur organisasi yang diukur melalui penghitungan kronologis, usia generasi dan fungsi organisasi. Penghitungan kronologis memandang bahwa semakin tua organisasi maka semakin besar kemungkinan untuk *survive* dan usia generasi melihat bagaimana suatu organisasi dapat melakukan pergantian tokoh secara teratur dan signifikan. Fungsi organisasi mendefinisikan kemampuan organisasi dalam mengubah fungsinya.

Kedua tingkat kompleksitas dan kesederhanaan dimana semakin kompleks unit-unit organisasi semakin tinggi pula tingkat pelebagaannya. Kompleksitas tercermin dari jumlah subunit organisasi baik dari hirarki maupun fungsional serta diferensiasi dari berbagai tipe sub unit organisasi secara terpisah. Semakin beragam subunit organisasi, semakin besar pula kemampuan organisasi tersebut dalam menjamin dan mempertahankan kesetiaan anggotanya.

Ketiga adalah otonomi subordinasi, yakni sejauh mana organisasi politik dan prosedur tidak tergantung pada kelompok sosial dan perilaku organisasi lain. Dalam sistem yang telah maju, organisasi politik memiliki integritas, sedangkan yang belum maju, organisasi sangat peka terhadap pengaruh dari luar. Otonomi menyangkut hubungan antara berbagai kekuatan sosial dan organisasi politik. Yang terakhir menurut Huntington yaitu kesatuan dan perpecahan, yang artinya bahwa semakin padu organisasi, semakin tinggi pula tingkat pelebagaannya dan

sebaliknya. Konsensus merupakan suatu persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap kelompok sosial.

Sejalan dengan itu Angelo Panebianco (1988) dalam Tandjung (2007:23) juga mengungkapkan bahwa pelembagaan partai politik diungkapkan ada lima indikator penting. Pertama, tingkat perkembangan organisasi pada pusat kekuasaan, dimana partai politik dengan kelembagaan kuat umumnya memiliki birokrasi yang terpusat yang kuat. Kedua, tingkat homogenitas pada struktur organisasi pada level hierarki yang sama cenderung memiliki struktur yang sama dengan organisasi pada tingkat nasional. Ketiga, pendanaan organisasi bersifat reguler dan berasal dari berbagai sumber. Keempat, hubungan dengan organisasi-organisasi *onderbouw*, dimana partai politik dengan kelembagaan yang kuat mendominasi organisasi-organisasi eksternalnya. Kelima, tingkat kesesuaian antara norma hukum dan struktur kekuasaan yang aktual dimana tingkat kesesuaian antara keduanya cenderung lebih besar dalam partai politik yang memiliki pelembagaan yang kuat.

Bertolak dari penelitian dan teori yang telah disampaikan di atas, maka dapat diketahui yang menyebabkan Golkar menjadi kuat dari zaman orde baru bahkan hingga saat ini. Teori pelembagaan yang disampaikan oleh Samuel Huntington dan Angelo Panebianco menjawab bagaimana Golkar kemudian berproses menjadi organisasi politik yang sangat kuat. Pada masa pembentukannya Golkar tumbuh melalui Sekber Golkar yang beranggotakan 61 organisasi fungsional hingga kemudian berkembang menjadi 291 organisasi. Organisasi-organisasi tersebut kemudian dikelompokkan dalam tujuh kelompok induk organisasi (Kino) yaitu

Kosgoro, SOKSI, MKGR, Kino Profesi, Ormas Hankam, Gakari, Gerakan pembangunan (Litbang Kompas, 2004:389).

Pada masa orde baru, menurut Awad Bahason dalam Akbar Tandjung (2007:102) pada masa orde baru Golkar menjadi kuat karena didukung oleh tiga jalur yaitu jalur A (ABRI) melalui “dwi fungsi”, jalur B (Birokrasi) sebagai mesin dalam pemerintahan dan G (Golkar) yang menjadi wadah bagi masyarakat secara umum untuk berpolitik melalui Golkar. Salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Golkar yaitu sebagaimana Bianco adanya hubungan partai politik dengan *underbouw*. Bahwa Partai Golkar sejak dahulu hingga sekarang memiliki organisasi sayap maupun kemasyarakatan yang cukup kuat seperti Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), SOKSI, KOSGORO, Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Himpunan Wanita Karya (HWK), Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) yang kesemuanya itu secara langsung menjadi penguat partai.

Basis massa Partai Golkar yang cukup kuat perlu diakomodir dan diorganisir secara rapi. Untuk itu perlu sebuah wadah dalam rangka menjaga dan mengawal massa partai tersebut. Untuk itu perlu dibentuk organisasi di bawah partai politik untuk menjadi alat untuk menguatkan dan memobilisasi massa partai. Banyak organisasi sayap yang telah didirikan oleh Partai Golkar dengan beberapa kategori tentu dengan tujuan memperluas jaringan dengan menguatkan massa partai. Dalam menampung idealisme pemuda Partai Golkar telah memiliki organisasi sayap yaitu Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia dan Angkatan Muda Partai Golkar yang sesungguhnya keduanya tidak dapat dipisahkan dari

Partai Golkar. Dalam penelitian ini fokus kajian pada hanya pada organisasi kepemudaan AMPI yang mewadahi para pemuda serta bagaimana kontribusi dan perannya dalam rekrutmen dan penguatan basis massa partai.

B. Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI)

1. Sejarah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia

Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia di deklarasikan pada tanggal 28 Juni 1978 di Pandaan Jawa Timur oleh para pemuda Indonesia yang tergabung dalam Angkatan Muda Jayakarta (AMJ), Angkatan Muda Sliwangi (AMS), Angkatan Muda Brawijaya (AMUBRA), Angkatan Muda Diponegoro (AMD) Angkatan Muda Sriwijaya (AMSRI), Generasi Muda SOKSI, Generasi Muda KOSGORO, Generasi Muda MKGR. Deklarasi Pandaan oleh perwakilan pemuda dari seluruh Indonesia, adalah sebagai berikut: NAD, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, Irian Jaya.

Landasan Perjuangan AMPI ini adalah dasar-dasar pandangan yang bersifat filosofis dan empiris dari AMPI di dalam menghayati hakikat Keberadaan dirinya ditengah-tengah realitas kehidupan bangsa dan Negara Indonesia. Karenanya Landasan Perjuangan AMPI ini merupakan pedoman mendasar bagi AMPI di dalam mewujudkan cita-cita Proklamsi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagai perwujudan dari pemikiran yang mendasar mengenai keberadaan dan Pedoman Perjuangan AMPI maka Landasan Perjuangan ini memuat hal-hal yang menyangkut masalah motivasi Keberadaan AMPI, hakekat Keberadaan AMPI dan strategi Perkembangan AMPI.

Pada hari Rabu, 28 Juni 1978, ratusan pemuda dari berbagai wilayah berkumpul di sebuah tempat yang sejuk di Jawa Timur yaitu Pandaan. Latar belakang para pemuda yang beraneka ragam, suku, agama, organisasi, maupun asal daerah mengingatkan kembali pada peristiwa "sumpah pemuda" yang pernah dikumandangkan kaum muda di era pergerakan kemerdekaan. Keberadaan ratusan pemuda dari berbagai ormas kepemudaan di Pandaan tersebut adalah untuk menggelorakan kembali nilai-nilai perjuangan yang tercetus dalam peristiwa "sumpah pemuda 1928".

Mereka bertekad untuk melestarikan nilai-nilai perjuangan "sumpah pemuda" dan harus tetap hidup dalam diri sanubari kaum muda Indonesia. Oleh karena nya, mereka sepakat membentuk organisasi yang diberi nama "Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia" sebagai alat perjuangan untuk mewujudkan idealismenya. Perjalanan panjang di era orde baru memberikan kesempatan yang cukup luas bagi AMPI untuk berkarya dan berbakti pada tanah air tercinta. Kehadiran AMPI di tengah-tengah masyarakat sangat dirasakan manfaatnya karena prestasi yang telah mereka ukir dalam pembangunan. Karya nyata AMPI tidak hanya di kota, namun juga di desa-desa dimana sebagian besar rakyat Indonesia bermukim. Inilah potret karya Nyata AMPI dalam lintasan Orde Baru.

Sesuai dengan namanya, AMPI terus bermetamorfosa mempelopori pembaharuan di tengah dinamika bangsa yang terus berubah. Eksistensi AMPI hingga saat ini merupakan bukti kemampuan kader-kader AMPI dalam mengimbangi perkembangan zaman. Nilai-nilai perjuangan ”sumpah pemuda ” yang dikobarkan sejak 1978 lalu di Pandaan, Jawa Timur, masih tetap hidup dalam sanubari kader-kader AMPI. Semangat inilah yang memompa energi kader-kader AMPI untuk terus berkarya dan berbakti pada bangsa dan negara tercinta. Reposisi organisasi yang telah dilakukan AMPI menjadi daya tarik sendiri bagi kalangan muda untuk bergabung bersama AMPI. Hal ini terlihat dengan besarnya animo kaum muda untuk menjadi anggota AMPI inilah potret karya nyata AMPI di era Reformasi.

2. Visi dan Misi AMPI

a) Visi

”Memantapkan Peran Kekaryaannya sebagai Pilar utama pembinaan Kepemudaan Partai Golkar”

b) Misi

Melakukan percepatan konsolidasi kelembagaan dan program untuk memperkuat posisi AMPI di tengah-tengah masyarakat dalam suasana yang demokratis serta menjamin hubungan, baik vertikal maupun horisontal dengan seluruh elemen pemuda kekaryaannya sebagai potensi politik Partai Golkar.

3. Panca Sukses AMPI

Berdasarkan visi dan misi sebagai landasan perjuangan dan pengabdian, orientasi baru pengembangan AMPI adalah Panca Sukses yang menjadi prioritas 2009-2014, yakni :

- 1) Konsolidasi Organisasi
- 2) Kaderisasi dan Keanggotaan
- 3) Partisipasi Pembangunan
- 4) Penataan administrasi dan kelembagaan
- 5) Penguatan hubungan dengan Partai GOKAR dan organisasi kepemudaan lainnya.

4. Kebulatan Tekad AMPI

Bahwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang dicetuskan Rakyat Indonesia merupakan puncak perjuangan Pergerakan Nasional dan titik awal upaya untuk mewujudkan cita-cita Kemerdekaan, yaitu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Bahwa pemuda Indonesia sebagai bagian dari Bangsa Indonesia tetap menunggal dalam sejarah pergerakan perjuangan dan kelangsungan hidup Bangsaanya; bahwa berkat cita-cita, semangat dan dinamika yang berkobar-kobar, Pemuda senantiasa tampil digaris depan sebagai pelopor perjuangan dalam mengibarkan panji - panji kemerdekaan, kebenaran dan keadilan.

Bahwa pembangunan nasional disegala bidang kehidupan yang dilaksanakan sejak Orde Baru, merupakan upaya dan karya nyata untuk mewujudkan cita-cita serta mengisi kemerdekaan. Pemuda sebagai bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat, bertanggung jawab ikut serta dan memperjuangkan pembaharuan, pembangunan, keadilan dan kebenaran melalui pengabdian kekaryaan yang berdasarkan atas jenis kerja dan – atau lingkungan kerja dengan menjunjung tinggi budi pekerti yang luhur dan ketajaman akal serta keseimbangan antara kehidupan rohaniah dan jasmaniah.

Dijiwai oleh semangat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan sadar sepenuhnya akan tanggung jawab serta fungsi Pemuda dan panggilan sejarah, maka kami Pemuda Indonesia yang berasal dari dari beraneka ragam suku bangsa, lingkungan budaya dan sosial maupun agama dan kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa menyatakan kebulatan tekad untuk bersatu padu dalam pemikiran, sikap dan gerak langkah di dalam mengemban tugas demi kejayaan Bangsa dan Negara.

Kebulatan tekad ini merupakan bukti nyata dari keinginan kami untuk membentuk satu wadah Angkatan Muda yang berorientasi pada Kekaryaan, sebagai jawaban atas tantangan dan panggilan sejarah masa kini demi masa depan yang lebih baik.

Maka, atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dengan ini kami menyatakan diri dan berhimpun dalam wadah yang secara resmi kami nyatakan berdiri, yaitu Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia.

5. Motivasi Keberadaan AMPI

Sejak awal kebangkitan Orde Baru, makin terasa kebutuhan akan adanya suatu kekuatan sosial politik yang kuat dan dominan serta efektif untuk melaksanakan pembaharuan dan pembangunan berdasarkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, halmana tidak memperoleh dukungan kondisi di dalam system politik pada masa sebelumnya.

Kekuatan politik semacam itu haruslah cukup kuat dan efektif serta mampu bertahan dalam jangka waktu yang relatif panjang sehingga efektif pula untuk menunjang adanya stabilitas politik yang dinamis sebagai prasyarat bagi kelangsungan pertumbuhan dan pembangunan yang mantap. Kerangka dan konfigurasi politik di Indonesia seperti itulah Golongan Karya tampak sebagai alternatif dengan membawa suatu orientasi baru yang menjelma di dalam pemikiran-pemikiran serta tindakan-tindakan dalam memecahkan problem bangsa disegala aspek kehidupan.

Dalam beberapa kali Pemilihan Umum dimasa Orde Baru Golongan Karya telah berhasil memperoleh kepercayaan rakyat untuk memegang peranan yang dominan dalam kehidupan Bangsa dan Negara. Peranan yang dominan itu perlu dan harus dipertahankan sehingga Golongan Karya cukup mempunyai waktu dan kesempatan untuk merealisasikan cita-cita dan programnya. Misi untuk mengisi dan mempertahankan peranan yang dominan Golongan Karya itu menyebabkan peranan kekuatan generasi muda yang berorientasi Karya dan Kekaryaan yaitu generasi muda yang menyalurkan aspirasi politik melalui

Golongan Karya, sekaligus sebagai pewaris cita-cita perjuangan Golongan Karya menjadi sangat penting untuk ditumbuhkan, dibina dan dikembangkan.

Sejak awal kebangkitan Orde Baru secara nyata terdapat adanya keragaman pertumbuhan, pembinaan dan perkembangan generasi muda yang berorientasi kepada Kekaryaan atau tegasnya generasi muda Golongan Karya baik dalam bentuk maupun modus operasionalnya, sehingga generasi muda dalam tubuh Golongan Karya belum menampakkan secara nyata solidaritas serta kekuatan pokok dalam mendukung perjuangan Golongan Karya pada umumnya serta menumbuhkan persamaan dan persatuan yang mendasar dalam visi persepsi serta sikap-sikap politik dalam dirinya. Dapat dilihat kenyataan dimasa-masa lalu bahwa meskipun berbagai organisasi pemuda menyatakan diri dan memberikan pengakuan bernaung di bawah Golongan Karya akan tetapi masih jelas kelihatan faksi-faksi struktural berdasarkan sumber asalnya masing-masing, sehingga kurang memungkinkan adanya pembinaan yang terpadu dan sistematis.

Sebelum terbentuknya AMPI keorganisasi Golongan Karya melakukan pembinaan/pengembangan generasi muda dalam bentuk operasional tidak langsung, sebagai konsekwensi logis dari system Keanggotaan masa mengambang yang dianut oleh Golongan Karya. Dengan demikian, berkembanglah Organisasi-organisasi Kepemudaan Golongan Karya yang mengambil sumber penggugah jiwa perjuangan nasionalnya pada kebangsaan Daerah seperti: Angkatan Muda Siliwangi (AMS), Angkatan Muda Brawijaya

(AMUBRA), Angkatan Muda Diponegoro (AMD), Angkatan Muda Sriwijaya (AMSRI) dan sebagainya, sedangkan Unsur-unsur Organisasi Kepemudaan yang lain bersumber dari Kino-Kino seperti Generasi Muda SOKSI, Generasi Muda MKGR, Generasi Muda KOSGORO, Eksponen Angkatan 66 dan lain-lain terkadang menimbulkan kurangnya keterpaduan pemikiran, program serta komunikasi antara organisasi-organisasi tersebut tadi.

Kondisi semacam ini pada gilirannya akan menimbulkan hambatan-hambatan dalam pembinaan dan keterpaduan peranan generasi muda yang berorientasi Karya dan Kekaryaannya yang seharusnya memiliki tanggung jawab besar sebagai generasi penerus dan penerus perjuangan Golongan Karya. Kenyataan-kenyataan seperti di atas menyebabkan tumbuhnya kesadaran dan pemikiran baru dikalangan Golongan Karya khususnya generasi mudanya, bahwa generasi muda yang menyalurkan aspirasi politik melalui Golongan Karya perlu menumbuhkan dan mengembangkan kebersamaan dan kekuatan yang lebih kukuh berdasarkan persamaan-persamaan yang mendasar dalam visi, persepsi, sikap serta program-program perjuangannya, sehingga generasi muda yang berorientasi pada Karya dan Kekaryaannya itu akan mempunyai peranan yang berarti dan strategis sesuai dengan aspirasi politiknya dalam gerak perjuangan Golongan Karya khususnya Bangsa dan Negara pada umumnya.

Untuk itu maka perlu diwujudkan suatu wadah kebersamaan dan persatuan yang utuh bagi generasi muda yang berorientasi pada Karya dan Kekaryaannya itu terutama dalam aspek social/politiknya. Wadah itu harus pula mampu

menambahkan dan mengembangkan kepeloporan generasi muda berorientasi Karya dan Kekaryaannya dalam melaksanakan pembaharuan dan pembangunan, serta menyiapkan kader-kader yang berkualitas dan berkepribadian dalam menyongsong tugas-tugas yang akan dipikulnya dalam rangka regenerasi.

Sadar akan kepentingan tersebut, maka melalui suatu proses pendekatan dan komunikasi antar generasi muda yang dilaksanakan secara bertahap dan sistematis, maka tanggal 28 Juni 1978 di Pandaan, Jawa Timur, atau dasar kesepakatan bersama segenap generasi muda yang berorientasi pada Karya dan Kekaryaannya, yang sadar akan tuntutan dan kebutuhan perjuangan dewasa ini maupun masa depan, melalui kebulatan tekad yang terkenal dengan *Kebulatan Tekad Pandaan* berdirilah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) dengan tujuan idealnya yakni turut serta memperjuangkan pembaharuan, pembangunan, keadilan dan kebenaran melalui pengabdian Kekaryaannya yang didasarkan atas jenis kerja dan atau lingkungan kerja, dengan menjunjung tinggi budi pekerti luhur, ketajaman akal serta keseimbangan antara kehidupan rohani dan jasmani.

Wadah inilah yang dilahirkan secara sadar oleh segenap generasi muda yang berorientasi kepada Karya dan Kekaryaannya sebagai wadah kebersamaan dan persatuan yang utuh bagi keterpaduan perjuangan yang akan diberi fungsi serta peranan secara keseluruhan, khususnya peranan social politiknya. Kelahiran AMPI pada waktu itu merupakan hasil kesadaran dan kemauan politik bersama dari segenap generasi muda Golongan Karya sebagai wadah

kebersamaan dan persatuan yang utuh bagi perjuangan pembaharuan dan pembangunan.

Perkembangan AMPI sejak kelahirannya hingga sekarang telah melalui tahapan-tahapan sesuai perkembangan sosio kultural maupun perkembangan politik dan perkembangan pembangunan itu sendiri. Hal tersebut adalah merupakan keharusan karena AMPI sebagai Organisasi Kepemudaan mempunyai tanggung jawab politik untuk memperjuangkan aspirasi anggotanya.

Sejalan dengan upaya penataan kehidupan social politik dan kemasyarakatan terutama dengan berlakunya UU No. 3 Tahun 1985 dan UU No. 8 Tahun 1985, maka AMPI menegaskan kembali Motivasi Keberadaannya sebagai Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yang berorientasi Karya dan Kekaryaannya dalam rangka menciptakan kader bangsa dan pembinaan peranan sosial politik anggotanya

6. Hakikat Keberadaan AMPI

Berdasarkan rasa kesadaran yang tinggi dan pengabdian terhadap bangsa dan negara maka hakikat terbentuknya AMPI adalah sebagai berikut:

- 1) AMPI adalah Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak dalam Bidang Kepemudaan yang secara organisatoris tidak menjadi anggota dan tidak mempunyai kaitan structural dengan salah satu organisasi kekuatan sosial politik. Namun demikian dari kenyataan Motivasi Keberadaan AMPI dan perkembangan AMPI dimasa depan dalam menyalurkan aspirasi dan kepentingan politik anggotanya harus tetap hadir dalam hubungan yang

bersifat khusus dengan Golongan Karya, yaitu tetap terpeliharanya hubungan aspiratif, historis dan program.

- 2) AMPI merupakan wadah pembinaan, komunikasi, pemersatu generasi muda yang berorientasi Karya dan Kekaryaannya yang senantiasa berupaya mengembangkan kebersamaan dan mengaktualisasikan potensi generasi muda menjadi suatu daya kekuatan juang yang efektif dalam melaksanakan pembaharuan dan pembangunan. Sejalan dengan pemikiran tersebut, maka AMPI adalah merupakan wadah utama dalam pembinaan peranan sosial politik kepemudaan yang berjuang atas dasar Karya dan Kekaryaannya.
- 3) Sesuai dengan namanya yaitu Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia, maka Pembaharuan adalah cita, citra dan ciri spesifikasi AMPI baik dalam pemikiran, sikap dan tindakan-tindakannya.
- 4) Pembaharuan merupakan upaya dalam proses perkembangan atau dinamika sosial berupa:
 - a) Memperkokoh dan mengembangkan hal-hal dan nilai-nilai positif yang teruji manfaatnya agar dapat relevan dengan tuntutan dan kebutuhan perkembangan atau dinamika masyarakat.
 - b) Menumbuhkan dan mengembangkan hal-hal, nilai-nilai baru yang dibutuhkan untuk menghadapi berbagai tantangan dan tuntutan perkembangan atau dinamika sosial. Dengan pengertian Pembaharuan seperti itu, maka AMPI menyadari bahwa tidak semua hal atau nilai lama adalah negatif dan tidak pula semua hal atau nilai baru adalah positif.

Demikian pula maka tidak semua hal dan nilai yang ada/ lama relevan dan bermanfaat buat perkembangan masyarakat, dan tidak pula semua hal yang baru menguntungkan bagi prospek kemajuan bangsa. Yang menjadi ukuran baik tidaknya suatu hal atau nilai apakah itu lama atau baru adalah kepentingan Nasional, kepentingan dalam prespektif dinamika sosial dengan ciri-ciri dan tuntutan-tuntutan yang spesifik.

- 5) Pembaharuan adalah tuntutan dan kebutuhan obyektif dari pada suatu bangsa yang ingin maju terus dalam semua aspek kehidupannya, dan mampu untuk menghadapi dan mengadakan penyesuaian diri dengan tuntutan dan kebutuhan dari perkembangan atau gerak maju itu sendiri.
- 6) Dasar dan sumber aspirasi Pembaharuan yang diperjuangkan oleh AMPI adalah Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan landasan kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 7) Semangat dan Sifat perjuangan Pembaharuan AMPI adalah semangat dan sifat Kerakyatan, yang berarti Pembaharuan seperti diinginkan dan dibutuhkan rakyat, diperjuangkan bersama rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Dengan demikian, maka AMPI harus selalu hadir ditengah-tengah rakyat menyatukan diri dengan kepentingan-kepentingan rakyat, peka terhadap masalah-masalah yang dihadapi rakyat dan mengabdikan perjuangan demi kesejahteraan rakyat banyak.
- 8) Tujuan Pembaharuan yang diperjuangkan AMPI adalah agar kelestarian Bangsa dan Negara Indonesia dapat dipertahankan dan agar Bangsa dan

Negara Indonesia mampu terus berkembang maju mencapai cita- cita luhurnya.

- 9) Perjuangan Pembaharuan dilaksanakan dalam kerangka perjuangan Karya dan Kekaryaan, yang mengutamakan kerja keras dan prestasi pengabdian serta berkepribadian dalam pengadilan kepada Bangsa dan Negara.
- 10) Sebagai organisasi yang bercita Pembaharuan, maka dalam dirinya sendiri maupun dalam aktivitas sosialnya, AMPI harus dapat menampilkan citra Pembaharuan dan kepribadian sebagai Pembaharu. Citra Pembaharuan yang ditampilkan AMPI mempengaruhi seberapa jauh akan memperoleh kepercayaan sebagai Agen Pembaharuan yang bernilai dan berharga.
- 11) Guna mampu mengemban misi Pembaharuan itu, maka AMPI harus memiliki kader-kader dengan ciri-ciri :
 - a) Memiliki idealisme sebagai motivasi yang kuat untuk berjuang
 - b) Memiliki kapasitas/kemampuan untuk memperjuangkan cita-cita Pembaharuan,
 - c) Memiliki stamina/daya tahan juang, karena setiap perjuangan Pembaharuan selalu menghadapi tantangan-tantangan,
 - d) Memiliki moral, budi pekerti luhur, demokratis, wawasan kebangsaan, bernegara dan bermasyarakat serta memiliki ciri-ciri berproduktif dan kreatif guna menunjang dinamika pembangunan.,
 - e) Memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya meningkatkan kualitas diri dalam berorganisasi disertai komitmen kerakyatan dan keikhlasan untuk berkarya.

- 12) Dalam memperjuangkan cita-citanya, maka AMPI memiliki program-program dengan ciri khas, yakni :
- a. Bercita dan bercitra Pembaharuan Yang Bersifat Kerakyatan Yang Manusiawi.
 - b. Mengutamakan kerja keras dan prestasi yang merupakan karya-karya nyata yang dapat dinikmati masyarakat banyak.

C. Basis Massa

Setiap partai politik memiliki basis massa yang berbeda-beda sebagaimana klasifikasi yang telah di jelaskan di atas. Bahwa berdasarkan komposisi dan fungsi anggota terdapat partai massa dimana partai ini mengandalkan kekuatan pada jumlah anggota dengan cara memobilisasi massa sebanyak-banyaknya. Rafael Raga Maran (2001:66) menerjemahkan istilah massa dari para sosiolog yang menunjuk bahwa massa adalah orang-orang yang memberikan respon terhadap peristiwa yang sama dengan cara yang kurang lebih sama, meskipun mereka tidak mengenal secara fisik.

Basis Massa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari partai politik, karena suara mereka dalam pemilihan umum akan sangat memengaruhi perolehan suara partai. Dengan memahami basis massa dari suatu partai maka segmentasi politik akan dapat dihitung secara prediktif untuk mengambil langkah dari suatu partai dalam rangka memengaruhi massa tersebut.

Memahami persoalan basis massa maka tidak akan lepas dari suatu kelompok masyarakat tertentu berdasarkan karakteristiknya misalnya masyarakat perdesaan, perkotaan, masyarakat petani, buruh dan kelompok pekerja lainnya.

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki hasrat untuk hidup berkelompok untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Rusadi Kantaprawira (1999:44-51) Massa berada dalam wilayah yang tidak resmi tetapi memiliki pengaruh yang sangat jelas dan signifikan. Massa dalam kategori ini dapat dikelompokkan dalam beberapa hal diantaranya yaitu :

1) Pengelompokan masyarakat atas dasar persamaan sosial ekonomi

Dalam pengelompokan ini masyarakat dibagi dalam beberapa kriteria sesuai kemampuan sosial ekonominya yaitu :

a) Golongan Tani

Adalah kelompok manusia yang memperoleh kehidupan dari sektor pengolahan tanah atau lahan dalam arti luas. Mereka beserta keluarganya hidup dari hasil penggarapan tanah yang secara ekonomis mempunyai batas maksimal produktivitas. Cara pengolahan tanah dilakukan tradisional yang diajarkan oleh leluhurnya diturunkan dari generasi ke generasi. Unsur tradisi, mistisisme akan anugerah alam yang irasional kemudian nilai keagamaan sebagai pengganti mistisisme sangat melekat dalam kehidupan kelompok ini. Sifat konservatisme dipengaruhi oleh kurangnya pengaruh komunikasi dari luar apalagi dunia internasional. Mereka sangat jauh dari pusat pertumbuhan dan perkembangan peradaban modern, informasi yang masuk ke desa-desa tempat sebagian terbesar petani sangat kecil dibandingkan informasi yang diperoleh oleh masyarakat kota.

b) Golongan Buruh atau Pekerja

Merupakan kelompok masyarakat yang memperoleh kehidupan dari penyumbangan tenaga dalam proses produksi. Mereka hidup di kota-kota besar atau sekitarnya, karena disanalah kebanyakan industri berdiri. Karena hidup di kota, mereka dapat turut mengecap kenyamanan hidup di kota dengan segala fasilitasnya seperti pusat perbelanjaan, alat transportasi, hiburan, pendidikan dan sebagainya. Sebagai unsur dalam salah satu proses produksi mereka berkepentingan memperoleh kesempatan meningkatkan keterampilan dan kecakapannya agar dapat mencapai taraf hidup yang lebih baik dan mempunyai posisi kuat. Karena kebanyakan para buruh hidup di kota besar maka perkembangan ilmu pengetahuan teknologi melalui penemuan baru menjadi tantangan untuk mereka dapat menjawabnya, sehingga hal ini menyebabkan para buruh untuk bersemangat memperbaiki taraf hidupnya dari tingkat subsistem ke tingkat yang lebih baik lagi.

c) Golongan Menengah

Merupakan kelompok masyarakat yang mempunyai kehidupan di luar pengolahan tanah atau lahan dan penjualan tenaga secara langsung. Mereka kebanyakan terdiri atas orang yang mempunyai profesi seperti dokter, advokat, pegawai negeri, pemilik modal atau pengusaha. Khusus untuk Indonesia kaum menengahnya lebih cenderung terdiri atas bangsawan kecil, priyai, dan bukan terdiri dari penguasa tanah dan pengusaha besar seperti di Eropa. Sebagian golongan menengah ini disebut “parvenu” yang mempunyai sikap mental yang sangat hati-hati dalam menilai setiap gejala perubahan.

d) Golongan Intelegensia

Merupakan kelompok berkat kelebihan pengetahuannya dibandingkan dengan rakyat kebanyakan. Mereka mempunyai gagasan, idealisme dan konsepsi bagaimana yang sebaiknya masyarakat diwujudkan. Karena kelebihan pengetahuan dan ilmu yang mereka peroleh melalui pendidikan formal maupun nonformal, mereka tertantang untuk mencoba menerapkan ilmu yang dikuasainya, jumlahnya sangat sedikit tetapi sangat potensial dan berperan. Kriteria golongan ini lebih bersifat berhubungan dengan soal kemampuan dan sikap mentalnya yang menghendaki kemajuan diberbagai bidang.

- 2) Pengelompokan masyarakat atas dasar perbedaan cara, gaya di satu pihak dan dilain pihak pengelompokan atas dasar kesadaran akan adanya persamaan jenis-jenis tujuan. Dalam kelompok ini sering kali terorganisir dan mempunyai struktur formal sehingga dapat dikategorikan sebagai kelompok asosiasi politik. Model-model dalam kelompok ini contohnya golongan anggota organisasi sosial politik, golongan administrator, golongan agama, golongan militer, golongan pengusaha, golongan seniman, golongan media massa yang kesemuanya itu berbeda dalam cara, gaya, jenis dan nilai tujuannya.
- 3) Pengelompokan masyarakat atas dasar kenyataan dalam kehidupan politik rakyat yang satu sama dan peranan politik tertentu yang secara konvensional dikenal dalam sistem politik. Golongan ini mengemban fungsi dan peranan politik yang secara konvensional dikenal dalam sistem politik. Contoh dalam

kelompok ini yaitu partai politik, kelompok penekan, kelompok kepentingan, tokoh politik dan media komunikasi politik.

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut manusia membutuhkan kelompok sosial. Syahril Syahbani (2002:23) mendefinisikan kelompok sosial adalah himpunan manusia dalam kehidupan bersama yang memiliki hubungan timbal balik yang memiliki syarat sebagai berikut :

- 1) Adanya kesadaran setiap orang selaku anggota kelompok bahwa dia merupakan bagian dari yang bersangkutan;
- 2) Ada hubungan timbal balik antar anggota yang bersatu dengan anggota lainnya dalam kelompok itu;
- 3) Ada faktor pengikat yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok itu seperti rasa senasib, kepentingan, tujuan, ideologi dan lain sebagainya;
- 4) Berstruktur dengan memiliki pola perilaku yang sama.

Secara umum kelompok sosial dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori. Pertama kelompok sosial yang teratur yakni kelompok sosial yang sifatnya tetap dan dapat diamati secara terus menerus. Dalam hal ini kelompok sosial teratur dapat dibagi sebagai berikut :

- 1) In Group dan Out Grup

Kelompok sosial yang terdapat dalam semua lapisan dalam masyarakat misalnya rukun tetangga (RT), Rukun Warga (RW).

- 2) Primary Group dan Secondary Group

Kelompok primer karena mereka saling kenal, ada pertalian darah dan persahabatan. Sedangkan kelompok sekunder didasarkan pada kerjasama dan pertimbangan untung rugi.

3) Gemeinschaft dan Gessellschaft

Gemeinschaft ini bersifat alamiah karena memiliki ikatan lahir yang kuat sedangkan Gessellschaft karena ikatan lahiriah yang mekanis.

4) Formal Group dan Informal Group

Kelompok formal dibentuk karena adanya hubungan yang sengaja diciptakan maka akan ada kedudukan dalam organisasi, sedangkan kelompok informal karena adanya pertemuan yang berulang-ulang secara pribadi.

5) Membership Group dan Reference Group

Membership yaitu kelompok sosial yang terikat adanya keanggotaan biasanya dibuktikan dengan identitas, sedangkan reference group mereka mengidentifikasi pada suatu kelompok tertentu.

Sedangkan kelompok sosial yang tidak teratur merupakan kelompok sosial yang bersifat sementara dan tidak dapat diamati secara terus menerus. Kelompok sosial tidak teratur terdiri dari :

1) Kerumunan

Terjadi apabila sejumlah orang yang berada pada satu tempat tertentu karena suatu perhatian ataupun kepentingan tanpa ikatan hubungan seperti di bioskop, di pasar, di stasiun. Kerumunan sirna jika orangnya bubar dan menjadi massa dengan ciri sebagai berikut :

a) Adanya sejumlah orang dalam suatu tempat.

- b) Terjadi suatu peristiwa yang mengalihkan dan menyita perhatian.
- c) Kesadaran individu menurun secara drastis
- d) Perasaan yang sama melanda semua orang.
- e) Timbul jiwa massa sesuai dengan peristiwanya.

2) Publik

Yaitu kelompok sosial yang tidak teratur yang berinteraksi secara tidak langsung yakni melalui saluran komunikasi baik cetak maupun elektronik.

Akhirnya kita semua harus menyadari bahwa dinamika sosial selalu berubah karena sejatinya manusia itu makhluk yang dinamis. Sewaktu-waktu dapat terjadi proses formasi atau reformasi baik karena pengaruh dari dalam maupun pengaruh dari luar. Jika melihat letak geografis basis massa dari suatu partai politik maka kategori selanjutnya adalah didasarkan pada letak geografis yaitu terdiri dari masyarakat perdesaan dan masyarakat perkotaan. Menurut Syahril Syahbani, dkk (2002:25) masyarakat kota yaitu masyarakat yang ditandai dengan kondisi tatanan nilai yang heterogen terdiri dari suku, agama, adat istiadat, menjalankan fungsi pusat administratif dan pusat komersial dan bahkan pusat konsentrasi kegiatan yang sekaligus menjadi indikator modernisasi dan kekayaan negeri. Sedangkan masyarakat perdesaan yaitu sebuah masyarakat yang ditandai dengan adanya homogenitas, sumber ekonominya diperoleh dari cara-cara yang tradisional seperti petani, berkebun dan lain sebagainya. Sesungguhnya kedua bentuk masyarakat ini saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya masyarakat perdesaan menjual hasil panennya ke kota untuk memperoleh uang serta

terjadinya arus urbanisasi dari desa ke kota dengan motif utama untuk mendapatkan pekerjaan.

Basis massa memiliki pengaruh dalam menentukan perolehan suara partai sebagai bagian dari partisipasi politik. Samuel P Huntington (1994:6) mendefinisikan bahwa partisipasi politik adalah keikutsertaan warganegara preman atau biasa dalam memengaruhi keputusan politik. Rafael Raga Maran (2001:147) bahwa partisipasi politik sebagai usaha yang terorganisir oleh warga negara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka, memengaruhi bentuk dan jalannya kebijaksanaan umum. Kadar partisipasi politik setiap orang berbeda-beda dan bervariasi. Hal ini menunjukkan bahwa setiap individu maupun kelompok memiliki kecenderungan untuk menentukan pilihan-pilihannya sendiri. Perbedaan-perbedaan ini yang menunjukkan adanya hirarki partisipasi politik. Rush dan Philip Althof dalam Rafael Marga Maran (2001:148) mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi politik yang menjadi hierarki partisipasi politik sebagai berikut :

- 1) Menduduki jabatan politik atau administratif;
- 2) Mencari jabatan politik atau administratif;
- 3) Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi politik.
- 4) Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi politik.
- 5) Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi semi politik.
- 6) Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi semi politik.
- 7) Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi dan sebagainya.
- 8) Partisipasi dalam diskusi politik formal

9) Partisipasi dalam pemungutan suara.

Selain hierarki di atas, partisipasi politik juga dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk yang lain seperti apatis, alienasi politik dan kekerasan. Apatitis adalah orang yang tidak berpartisipasi sama sekali dalam sistem politik. Alienasi politik memiliki dua kecenderungan, pertama orang bisa masuk kedalam tingkat apatis, kedua seseorang dapat menjadi bagian dari level politik tertentu. Misalnya Robert Lane (dalam Maran, 2001:155) memandang bahwa alienasi adalah perasaan keterasingan seseorang dari kehidupan politik dan pemerintahan masyarakat. Kekerasan merupakan bentuk partisipasi politik yang cenderung keras dan kejam seperti demonstrasi, kerusuhan, teror dan pembunuhan politik (dalam Maran, 2001:151).

Apa yang dikemukakan di atas juga sejalan dengan yang dikemukakan oleh Charles Andrain dan James Smith dalam Kacung Marijan (2010:111) mengelompokkan partisipasi politik menjadi tiga kelompok. Pertama kelompok yang lebih pasif dimana kelompok ini melihat bagaimana keterlibatan politik seseorang, sejauh mana melihat politik sebagai sesuatu yang penting, memiliki minat terhadap politik dan sering berdiskusi mengenai isu-isu politik dengan teman. Kedua partisipasi politik yang lebih aktif dimana melihat seseorang sejauh mana terlibat dalam organisasi kesukarelaan seperti kelompok keagamaan, kelompok pemuda, kelompok profesi, organisasi buruh. Ketiga adalah partisipasi yang berupa kegiatan-kegiatan protes seperti ikut menandatangani petisi, melakukan boikot dan demonstrasi.

Dalam konteks basis massa juga mempelajari bagaimana struktur dan budaya politik dari suatu massa partai. Kedua komponen ini saling memengaruhi, seperti yang dikatakan Almond dalam Rusadi Kataprawira (1999:28) budaya politik masyarakat sangat dipengaruhi oleh struktur politik, sedangkan daya operasional struktur tadi ditentukan oleh konteks kultural dimana struktur itu berada. Struktur politik adalah lembaga-lembaga yang berada dalam sistem politik yang dkhhususkan dalam infrastruktur politik dan suprastruktur politik. Infrastruktur politik adalah lembaga politik yang menjalankan roda pemerintahan seperti lembaga eksekutif dan legislatif, sedangkan suprastruktur politik yaitu kelompok yang berada diluar pemerintahan seperti kelompok penekan, kelompok kepentingan, ormas, NGO dan sebagainya. Dalam sistem politik struktur politik menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan untuk saling mendukung dan mengkritisi sebuah kebijakan.

Dalam suatu sistem politik menurut Almond dalam Budi Winarno (2007:13) bahwa setidaknya ada tiga fungsi yang hampir selalu ada yaitu sosialisasi politik, rekrutmen politik dan komunikasi politik. Sosialisasi politik merupakan fungsi mengembangkan dan memperkuat sikap-sikap politik dikalangan penduduk ataupun melatih rakyat untuk melaksanakan peran-peran politik, administrasi dan peranan judicial, sedangkan rekrutmen politik merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan-jabatan pemerintahan dan komunikasi politik bertanggungjawab terhadap mengalirnya informasi dari masyarakat dan melalui berbagai struktur yang ada dalam sistem politik.

Hal lain yang tidak terlupakan dalam karakteristik massa partai adalah budaya politik. Menurut Sidney Verba dalam Budi Winarno (2007:15) budaya politik adalah *all politically relevant orientations whether of cognitive, evaluative or expressive sort*. Sedangkan David Easton dalam Budi Winarno (2007:15) mendefinisikan budaya politik yang merujuk pada tindakan atau tingkah laku yang membentuk tujuan-tujuan umum maupun khusus mereka dan prosedur-prosedur yang mereka anggap harus diterapkan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Menurut Hitchner dan Levine budaya politik menghasilkan orientasi khusus ke arah hubungan politik, suatu kombinasi informasi, perasaan, dan pendapat yang cukup bervariasi (dalam Budi Winarno, 2007:16). Pendek kata budaya politik adalah bagaimana masyarakat melakukan sebuah tindakan untuk menilai dengan prosedur yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan –tujuan umum.

Beberapa hal yang memengaruhi terhadap budaya politik menurut Hitchner dan Carol Levine (Budi Winarno, 2007:16) diantaranya karakter nasional, orientasi terhadap kekuasaan, rekrutmen pemimpin dan gaya politik. Karakter nasional yang dimaksud didasarkan pada ciri umum suatu bangsa tertentu yang membedakan dirinya dikenal orang lain. Orientasi terhadap kekuasaan yaitu bagaimana seseorang memandang manfaat dan keuntungan dari suatu kekuasaan. Rekrutmen pemimpin adalah bagaimana pola seleksi untuk menduduki jabatan publik. Gaya politik mengidentifikasi seorang individu dalam proses komunikasi dan tawar menawar.

Menurut Almond dalam Budi Winarno (2007:17) berdasarkan orientasi–orientasi warga negara terhadap kehidupan politik maka secara umum budaya politik dibedakan menjadi tiga sebagai berikut :

1) Budaya politik partisipan

Budaya ini hidup dalam masyarakat yang orang-orangnya melibatkan diri dalam kegiatan politik atau paling tidak dalam kegiatan pemberian suara, dan memperoleh informasi yang cukup banyak tentang kehidupan politik.

2) Budaya politik subjek atau kaula

Budaya ini ditemukan pada orang-orang yang secara pasif patuh pada pejabat-pejabat pemerintahan dan undang-undang, tetapi tidak melibatkan diri dalam politik ataupun memberikan suara dalam pemilihan.

3) Budaya politik parokial

Budaya ini hidup dalam masyarakat yang orang-orangnya sama sekali tidak menyadari atau mengabaikan adanya pemerintahan dan politik. Barangkali, mereka adalah orang-orang yang buta huruf dan hidup di daerah terpencil yang sama sekali tidak sadar akan hak pilih dan pemerintahannya.

Samuel Huntington mereduksi modernisasi merupakan proses bersegi banyak yang melibatkan perubahan di semua kerangka dan pemikiran dan aktivitas manusia (Winarno, 2007:21). Secara psikologis modernisasi melibatkan pergeseran mendasar dibidang mental, nilai-nilai dan harapan. Manusia modern menyetujui perubahan dan percaya akan kapasitas mereka.

Rusadi Kuntaprawira (1999:37-39) menelaah budaya politik masyarakat Indonesia yang dipengaruhi oleh beberapa variabel yang memiliki kecenderungan sebagai berikut :

- 1) Konfigurasi subkultur masyarakat Indonesia yang masih beraneka ragam yang pada prinsipnya masalah ini telah ditanggulangi oleh pembangunan bangsa dan pembangunan karakter.
- 2) Budaya masyarakat Indonesia yang masih bersifat parokial kaula di satu pihak dan budaya partisipan di lain pihak, disisi lain juga masih ada masyarakat yang tertinggal dalam menggunakan hak pilihnya.
- 3) Sifat ikatan primodial yang masih berakar kuat yang indikatornya dapat ditemukan melalui sentimen keadaerahan, keagamaan, perbedaan pendekatan keagamaan dan sebagainya.
- 4) Kecenderungan budaya politik yang masih mengukung sikap paternalisme dan ikatan primodial. Sehingga keputusan ditentukan oleh beberapa orang saja seperti orang tua, tokoh masyarakat, kepala suku dan dianggap sebagai representasi dari kelompoknya.
- 5) Dilema interaksi tentang introduksi modernisasi dengan segala konsekuensinya dengan pola-pola yang telah berakar lama sebagai tradisi dalam masyarakat.

Yang perlu dicatat bahwa variabel-variabel tersebut terjalin satu sama lain, berinteraksi, bersilangan, kadang-kadang berkonsidensi yang bentuk sementaraanya bergantung pada variabel tertentu yang relatif paling dominan.

Basis massa suatu partai tentu berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain bagaimana ideologi dan program dari suatu partai. Massa partai terdiri dari

berbagai kategori ada berdasarkan sosial ekonomi, kepentingan, kelompok keagamaan, para cendekiawan dan sebagainya. Komunikasi massa merupakan wahana penting untuk membangun kebersamaan dan memungkinkan banyak orang untuk mendengarkan suatu pesan. Itulah proses yang memungkinkan media cetak maupun elektronik mentransmisikan informasi, ide-ide dan sikap-sikap tertentu dikalangan suatu masyarakat yang besar. Mekanisme lain yaitu adanya rantai interaksi dimana komunikasi berproses dari individu kepada individu yang lain, dari suatu kelompok yang satu kepada kelompok yang lain.

D. Penguatan Basis Massa

Untuk bertahan dalam percaturan politik di Indonesia setiap partai politik dituntut untuk melakukan berbagai program yang bertujuan untuk menguatkan kelembagaan dan eksistensi partai dalam masyarakat. Pelembagaan kepartaian menjadi sebuah kebutuhan yang tidak terhindarkan. Pelembagaan kepartaian akan menjadikan partai bekerja dalam koridor fungsi-fungsi yang semestinya serta mengantisipasi perubahan partisipasi politik dari warga negara akibat modernisasi dan perubahan zaman.

Dasar pelembagaan partai politik yang dilaksanakan dengan tepat akan mampu menghasilkan sebuah partai yang kuat secara struktural. Seperti yang diketahui setiap partai memiliki memiliki program yang bertujuan untuk menjaga eksistensi partai dalam masyarakat. Hal tersebut didukung dengan banyaknya partai-partai besar yang melakukan program-program untuk penguatan kelembagaan internal, salah satunya ialah Partai Golkar. Sebagai salah satu partai besar dan memiliki sejarah yang panjang Partai Golkar memiliki basis masa yang

sangat besar dan kuat. Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa kali hasil pemilu Partai Golkar hampir selalu menduduki peringkat 3 besar dalam perolehan suara. Untuk mencapai pelembagaan yang kuat partai politik perlu melakukan upaya untuk menguatkan basis massa dengan sistem pelembagaan oleh partai politik. Pelembagaan tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan atau melalui organisasi pendamping di bawah struktur partai seperti organisasi kemasyarakatan atau organisasi sayap partai dengan tujuan untuk memperluas dan memeperkuat massa partai.

Partai Golkar memiliki ketangguhan dalam perpolitikan nasional meskipun partai ini ditempa badai dosa orde baru. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Denny JA (dalam Fayakhun, 2014:102-103) penyebab tangguhnya Partai Golkar karena beberapa hal. Pertama, infrastruktur Partai Golkar yang mumpuni dengan dukungan kader-kader muda yang militan. Kedua, memiliki *branding* politik yakni sebagai bagian dari rakyat. Ketiga, kondisi ekonomi yang terlilit krisis, sehingga kaum reformis tidak mampu memenuhi ekspektasi politik masyarakat. Keempat, kekecewaan publik pada tabiat sebagian politis reformis yang ternyata juga mengidap penyakit orde baru.

Sedangkan basis massa Partai Golkar di era reformasi tersegementasi karena beberapa hal. Pertama, pemilih Golkar adalah pemilih loyal yang tidak loyal oleh janji politik. Kedua, konstituen yang digerakkan oleh sentimen *the politics of survival*. Ketiga, sebagian dari kelompok masyarakat islam modernis. Kelima segmen dari kelas menengah kota termasuk kalangan profesional (Fayakhun, 2014:103-104)

Penguatan basis massa sejalan dengan tujuan dari konsep institusionalisasi partai sebagaimana yang disampaikan oleh Vicky Randall dan Lars Svasand dalam Hendaru (2014:9) yaitu Pertama, Dimensi kesisteman. Yang dimaksudkan dengan kesisteman adalah proses pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik, termasuk penyelesaian konflik, dilakukan menurut aturan, persyaratan, prosedur, dan mekanismenya yang disepakati dan ditetapkan dalam AD/ART partai politik. Derajat kesisteman suatu partai bervariasi menurut: (a) asal-usul partai politik, yaitu apakah dibentuk dari atas, dari bawah, atau dari atas yang disambut dari bawah; (b) siapakah yang lebih menentukan dalam partai: seorang pemimpin partai yang disegani ataukah pelaksanaan kedaulatan anggota menurut prosedur dan mekanisme yang ditetapkan oleh organisasi sebagai suatu kesatuan; (c) siapakah yang menentukan dalam pembuatan keputusan: faksi-faksi dalam partai ataukah partai secara keseluruhan; dan (d) bagaimana partai memelihara hubungan dengan anggota dan simpatisan, yaitu apakah dengan klientelisme (pertukaran dukungan dengan pemberian materi) ataukah menurut konstitusi partai (AD/ART). Lebih tegas lagi kesisteman ini merujuk pada bagian internal partai yang berfokus pada strukturalnya, dimana mengenai pengembangan peningkatan ruang lingkup partai, kepadatan dan keteraturan interaksi yang berstruktur, yang secara formal kesemuanya ini diatur melalui aturan partai yang dikemas oleh AD/ART.

Kedua, dimensi identitas nilai. Identitas nilai ini berkaitan dengan identitas partai politik berdasarkan ideologi atau platform partai, karena itu berdasarkan basis sosial pendukungnya, dan identifikasi anggota terhadap pola dan arah perjuangan yang diperjuangkan partai politik tersebut. Karena itu derajat identitas

nilai suatu partai politik berkaitan dengan (a) hubungan partai dengan kelompok populis tertentu (*popular bases*), yaitu apakah suatu partai politik mengandung dimensi sebagai gerakan sosial yang didukung oleh kelompok populis tertentu, seperti buruh, petani, kalangan masyarakat tertentu, komunitas agama tertentu, komunitas kelompok etnik tertentu, dan (b) pengaruh klientelisme dalam organisasi, yaitu apakah hubungan partai dengan anggota cenderung bersifat instrumental (anggota selalu mengharapkan tangible resources berupa materi dari partai) ataukah lebih bersifat ideologis (anggota mengenal dan mengharapkan partai bertindak berdasarkan identifikasi terhadap ideologi partai). Partai politik yang mempunyai basis sosial pendukung yang spesifik niscaya akan memiliki identitas nilai yang jelas.

Ketiga, Dimensi otonomi. Derajat otonomi suatu partai politik dalam pembuatan keputusan berkaitan dengan hubungan partai dengan aktor luar partai baik dengan sumber otoritas tertentu (penguasa, pemerintah), maupun dengan sumber dana (pengusaha, penguasa, negara atau lembaga luar) dan sumber dukungan massa (organisasi masyarakat): (a) apakah partai tergantung kepada aktor luar tersebut ataukah hubungan itu bersifat saling tergantung (*interdependen*), dan (b) apakah keputusan partai ditentukan oleh aktor luar ataukah hubungan itu berupa jaringan (*linkage*) yang memberi dukungan kepada partai.

Keempat, dimensi reifikasi. Reifikasi menunjukkan derajat pengetahuan publik tentang partai politik yang merujuk pada pertanyaan apakah keberadaan partai politik tersebut telah tertanam pada imajinasi publik. Bila keberadaan partai

politik tertentu telah tertanam pada imajinasi publik, maka pihak lain baik para individu maupun lembaga akan menyesuaikan aspirasi dan harapan ataupun sikap dan perilaku mereka dengan keberadaan partai politik tersebut. Derajat pengetahuan publik ini merupakan fungsi dari waktu dan kiprah partai tersebut.

Penjelasan di atas telah dipaparkan berbagai dimensi yang akan digunakan dalam melihat bagaimana proses institusional partai dijalankan atau bagaimana partai politik dilembagakan. Dari segi pelaksanaan institusionalisasi partai terletak dari profesionalisme dan pengelolaan partai. Bukan hanya partai akan terlihat pada saat menjelang pemilu, tetapi juga rutinitas yang dilakukan partai sehari-hari. Pengelolaan partai dalam hal ini menyangkut ideologi dan kebijakan, aturan main, kekuasaan dan latar belakang sosial anggota partai dan pemimpinnya, rekrutmen dan kandidat yang duduk di legislatif, serta proses marketing politik dari partai tersebut.

Scott Mainwaring dalam Fayakhun (2014:61) mendefinisikan instusionalisasi partai politik juga dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Pertama, di dalam sistem partai yang telah mengalami institusionalisasi terdapat pola kompetisi partai politik yang stabil. Tidak ada dominasi personal dari seorang elit politik dengan sistem kompetisi berjalan secara seimbang. Kedua, partai politik memiliki akar yang kuat di masyarakat. Akar yang kuat ini buah kinerja dari institusi yang berlangsung lama, terprogram dan sistematis sehingga kepercayaan konstituen semakin kuat. Ketiga, adanya pengakuan dari elit dan warga negara bahwa partai politik adalah hal mendasar dan penting bagi kehidupan demokrasi. Pengakuan ini mencerminkan kepuasan rakyat terhadap kinerja yang dijalankan

partai politik. Keempat, partai politik memiliki struktur internal, prosedur dan rutinintas jelas.

Jika penulis menelaah apa yang disampaikan Randall dan Svasand maka organisasi kepemudaan AMPI maka sangat erat kaitannya dengan penguat basis massa Partai Golkar dilihat dari empat dimensi tersebut. Kedua organisasi tersebut berperan aktif dalam melakukan intitusionalisasi partai kepada pemilihnya untuk mendekatkan partai dengan pemilihnya. Organisasi kepemudaan AMPI dan berperan penting dalam memberikan sumbangsih nyata bagi Partai Golkar dari segi keutuhan internal, ketangguhan organisasi serta identitas politik. Dimensi-dimensi tersebut dalam Partai Golkar untuk mendekatkan dengan konstituen sehingga organisasi kepemudaan tersebut menjadi jembatan antara partai politik dan pemilihnya.

Apa yang disampaikan oleh Scott Mainwaring sejalan dengan instusionasasi Partai Golkar. Dimensi tersebut memang belum sepenuhnya dicapai oleh partai Golkar. Dimensi yang penting adalah bagaimana parpol mengakar kuat di masyarakat, pengakuan dari warga negara serta sistem yang internal yang jelas. Untuk itu AMPI menjadi jembatan bagi Partai Golkar untuk memperkuat institusionalisasi Partai Golkar dengan menguatkan basis massa Partai Golkar.

E. Partai Politik

Partai Politik merupakan salah satu sarana penting penyaluran aspirasi masyarakat, dan sebagai kendaraan politik, yang pada umumnya ada pada negara-negara berdaulat serta merdeka. Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara

Eropa Barat seperti yang diungkapkan oleh Maurice Duverger (1984:3) bahwa munculnya partai politik di Amerika karena adanya komite pemilihan untuk memilih wakil-wakil di parlemen karena partai politik berkembang seiring dengan berkembangnya proses parlementer dan proses pemilihan. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikuti sertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat dengan pemerintah.

Firmanzah (2008:56) menyatakan bahwa bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, fenomena partai politik adalah fenomena pasca kolonialisme. Artinya, kemunculan partai politik yang kita kenal sekarang ini terjadi ketika negara ini telah memperoleh kemerdekaan. Meskipun ruang kebebasan masyarakat untuk mendirikan partai politik dalam periode kolonial memang dibatasi, pembentukan serikat-serikat kerap terjadi. Dalam tahap ini, kita belum bisa mengkategorikannya sebagai partai politik seperti dalam definisi formalnya, karena memang belum tercipta mekanisme pemilu pada saat itu.

Dalam buku Pengantar Sosiologi Politik hasil tulisan Rafael Raga Maran (1999:85) serta buku sosiologi politik yang ditulis oleh Syahril Syahbani dkk (2002:76) Carl Fedrich mendefinisikan partai politik adalah organisasi yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin partainya dan berdasarkan kekuasaan itu akan memberikan kegunaan materiil dan idiil kepada anggotanya. Dari pemahaman ini menjelaskan bagaimana partai politik menjadi kendaraan untuk mengisi jabatan-jabatan di pemerintahan maupun parlemen sehingga dapat

memberikan manfaat kepada anggotanya melalui putusan-putusan kebijakan yang akan dibuatnya.

R.H. Soltau dalam Rafael Raga Maran (1999:85) juga menyatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok warga negara yang bertindak sebagai unit politik dan yang berdasarkan penggunaan kekuatan voting, mereka bermaksud mengontrol kebijakan pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka. Sigmund Neuman (1999:85) juga mendefinisikan bahwa partai politik merupakan organisasi penghubung yang terdiri dari para pelaku aktif masyarakat yang menaruh perhatian pada pengendalian kekuasaan pemerintahan yang berkompentensi dengan kelompok lain dalam rangka memperoleh dukungan rakyat. Dari pendapat para ahli tersebut bahwa partai politik ini merupakan sebuah organisasi yang digunakan untuk berkompentensi mendapatkan kekuasaan dan juga menjadi kelompok pengontrol atau oposan bagi suatu kebijakan bagi kelompok lain yang tidak yang berbeda pandangan dalam rangka memperoleh dukungan dari masyarakat.

Joseph Lapalombara dan Myron Weiner dalam Ramlan Surbakti (2007:113) mengungkapkan sejarah terbentuknya partai politik dapat dilacak oleh tiga teori. Pertama teori kelembagaan yang menyatakan adanya hubungan antara parlemen awal dengan munculnya partai politik, kedua teori situasi dimana partai politik sebagai upaya sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas, ketiga teori pembangunan yang menekankan bahwa partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi.

Partai politik pada umumnya dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang sudah modern atau sedang dalam proses memodernisasikan diri. Penelitian mengenai partai politik merupakan kegiatan ilmiah yang relatif baru, namun telah bermacam-macam penelitian telah diadakan untuk mempelajarinya dari penelitian-penelitian tersebut telah banyak definisi tentang partai politik dari pakar-pakar politik.

Menurut Miriam Budihardjo (2008:396) partai politik secara umum dapat dikatakan sebagai suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik untuk melaksanakan kebijaksanaan mereka, baik dengan cara konstitusional maupun inkonstitusional.

Joseph Lapalombara dan Myron Weiner, sebagaimana dikutip oleh Miriam Budihardjo (2008:397) melihat partai politik sebagai organisasi untuk mengekspresikan kepentingan ekonomi sekaligus mengapresiasi dan mengatur konflik. Partai politik dilihat sebagai organisasi yang mempunyai kegiatan yang berkesinambungan serta secara organisatoris memiliki cabang mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah.

Dari pandangan beberapa ahli tersebut penulis menyimpulkan bahwa partai politik adalah sekelompok warga negara yang merupakan kumpulan orang-orang yang terorganisir memiliki kepentingan yang sama dengan tujuan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam suatu sistem politik untuk mewakili masyarakat dalam lembaga pemerintah maupun parlemen. Kelompok

tersebut berjuang dalam suatu kontestasi politik untuk mendapatkan kepercayaan dari rakyat dalam rangka mengisi jabatan-jabatan publik baik di pemerintahan maupun di parlemen serta dapat menjadi kelompok yang mengkritisi dan pengendalian kebijakan pemerintah bagi kelompok yang berbeda pandangan.

Lebih jauh Lapalombara dan Myron Weiner dalam Firmanzah (2008:67) mengidentifikasi empat karakteristik dasar yang menjadi ciri khas organisasi yang dikategorikan sebagai partai politik. Keempat karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:

a. Organisasi Jangka Panjang

Organisasi partai politik harus bersifat jangka panjang, diharapkan dapat terus hadir meskipun pendirinya sudah tidak ada lagi. Partai politik bukan sekadar gabungan dari para pendukung yang setia dengan pemimpin yang kharismatik. Partai politik hanya akan berfungsi dengan baik sebagai organisasi ketika ada sistem dan prosedur yang mengatur aktivitas organisasi dan ada mekanisme suksesi yang dapat menjamin keberlangsungan partai politik untuk jangka waktu yang lama.

b. Struktur Organisasi

Partai politik hanya akan dapat menjalankan fungsi politiknya apabila didukung oleh struktur organisasi, mulai dari tingkat lokal sampai nasional, dan ada pola interaksi yang teratur diantara keduanya. Partai politik dilihat sebagai organisasi yang meliputi suatu wilayah teritorial serta dikelola secara prosedural dan sistematis. Struktur organisasi partai politik yang sistematis dapat menjamin aliran formasi dari bawah keatas maupun dari atas kebawah,

sehingga nantinya akan meningkatkan efisiensi serta efektifitas fungsi kontrol dan koordinasi.

c. Tujuan berkuasa

Partai politik didirikan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan, baik di level lokal maupun nasional. Siapa yang memimpin negara, propinsi atau kabupaten. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang melatarbelakangi hadirnya partai politik. Ini pula yang membedakan partai politik dengan bentuk kelompok dan grup lain yang terdapat dalam masyarakat seperti asosiasi, ikatan dan perserikatan.

d. Dukungan publik luas

Adalah cara untuk mendapatkan kekuasaan partai politik perlu mendapatkan dukungan luas dari masyarakat. Dukungan ini yang menjadi sumber legitimasi untuk berkuasa. Karakteristik ini menunjukkan bahwa partai politik harus mampu diterima oleh mayoritas masyarakat dan sanggup memobilisasi sebanyak mungkin elemen masyarakat. Semakin besar dukungan publik yang didapatkan partai politik, semakin besar pula legitimasi yang diperolehnya.

F. Fungsi Partai Politik

Seperti halnya organisasi lain yang berada pada daerah publik, partai politik perlu melihat kembali peran dan tugas yang diembannya. Aktivitas politik perlu dibingkai dalam lembaga formal yang memungkinkan aspirasi politik suatu kelompok diperjuangkan dalam sistem formal. Menurut Firmanzah (2008:68) secara garis besar, peran dan fungsi partai politik dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, peran dan tugas internal organisasi. Dalam hal ini organisasi partai

politik memainkan peran penting dalam pembinaan, edukasi, pembekalan, kaderisasi dan melanggengkan ideologi politik yang menjadi latar belakang pendirian partai politik. Kedua, partai politik juga mengemban tugas yang lebih bersifat eksternal organisasi. Di sini peran dan fungsi organisasi partai politik terkait dengan masyarakat luas, bangsa dan negara. Kehadiran partai politik juga memiliki tanggung jawab konstitusional, moral, dan etika untuk membawa kondisi dan situasi masyarakat menjadi lebih baik.

Sebagaimana pemahanam di atas bahwa fungsi penting dari suatu partai politik yaitu dapat memperoleh dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang akan disusun. Secara umum partai politik memiliki beberapa fungsi sebagaimana diungkapkan oleh Miriam Budiarjo (2008:166) dan Ramlan Surbakti (2007:117) sebagai berikut :

a. Sarana sosialisasi Politik

Partai politik memainkan peran sebagai instrumen sosialisasi politik yaitu proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat.

b. Sarana Rekrutmen Politik

Surbakti (2007:118) mendefinisikan rekrutmen politik seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.

c. Partisipasi Politik

Kegiatan warga negara dalam biasa dalam memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan.

d. Pemandu Kepentingan

Kegiatan menampung, menganalisis dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan untuk dirumuskan dan diperjuangkan dalam proses dan pelaksanaan keputusan politik.

e. Komunikasi Politik

Partai politik sebagai komunikator politik sebagai agen dalam menyampaikan keputusan politik, menyampaikan aspirasi dan kepentingan berbagai kelompok masyarakat kepada pemerintah.

f. Pengendalian Konflik

Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara-cara berdialog dengan pihak yang berkonflik dengan cara menampung dan memadukan aspirasi yang berbeda yang selanjutnya dapat mempengaruhi keputusan politik.

g. Kontrol Politik

Kontrol politik adalah kegiatan untuk menunjukan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dalam suatu isi kebijakan serta dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

G. Klasifikasi Partai Politik

Partai politik juga telah terdiferensiasi berdasarkan tipologinya atau klasifikasi. Klasifikasi ini dimaksudkan untuk memahami tipe-tipe partai politik yang berkembang dari dahulu sampai saat ini. Klasifikasi itu dapat diketahui dari berbagai macam kategori, namun secara umum kategori partai dapat dilihat dari asas dan orientasi, komposisi dan fungsi, serta basis tujuan dan sosial. Ramlan Surbakti (2007: 122) memberikan kategori partai politik dari ari sisi asas dan orientasi, parpol dapat dikelompokkan menjadi 3 tipe, yaitu :

- 1) Partai Politik Pragmatis yaitu suatu partai yang mempunyai program dan kegiatan yang tidak terikat kaku pada suatu doktrin dan ideologi tertentu;
- 2) Partai Politik Doktriner ialah suatu partai politik yang memiliki sejumlah program dan kegiatan konkret sebagai penjabaran ideologinya;
- 3) Partai Politik Kepentingan merupakan suatu partai politik yang dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, etnis, agama, yang secara langsung ingin berpartisipasi dalam pemerintahan.

Jika melihat klasifikasi partai politik berdasarkan asas dan orientasinya, Partai Golkar merupakan tipe partai pragmatis karena dapat dilihat bahwa Partai Golkar memiliki program-program dan kegiatan yang tidak terlihat kaku pada satu doktrin atau ideologi tertentu. Program dan kegiatan Partai Golkar cenderung merupakan cerminan dari program-program yang disusun oleh pimpinan dan berdasarkan gaya kepemimpinan ketuanya.

Ramlan Surbakti (2007:123) juga mengklasifikasikan Partai Politik berdasarkan komposisi dan fungsinya, parpol dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu:

- 1) Partai massa adalah partai politik yang mengandalkan kekuatan pada keunggulan jumlah anggota (kuantitas) dengan cara mobilisasi massa sebanyak-banyaknya, dan mengembangkan diri sebagai pelindung bagi kelompok dalam masyarakat sehingga pemilihan umum dapat dengan mudah dimenangkan dan kesatuan nasional dapat terpelihara,
- 2) Partai kader adalah suatu partai politik yang mengandalkan kualitas anggota, keketatan organisasi, disiplin anggota sebagai kekuatan utama.

Jika dilihat dari komposisi dan fungsinya Partai Golkar dapat di golongan partai massa karena merupakan partai yang mengandalkan kekuatan utamanya yaitu jumlah anggota atau massa yang cukup banyak dan tersebar di seluruh Indonesia, dengan mengembangkan diri sebagai pelindung bagi kelompok masyarakat. Hal ini diperkuat dengan slogan partai Golkar “Suara Golkar Suara Rakyat”. Dengan slogan ini Golkar seakan menasbihkan diri sebagai partai yang mengayomi dan melindungi kepentingan rakyat.

Almond dalam Ramlan Surbakti (2007:123) berdasarkan basis sosial dan tujuannya, parpol dapat digolongkan menjadi 4 tipe, yaitu :

- 1) Partai politik yang beranggotakan lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat, seperti kelas atas, menengah, dan bawah,
- 2) Partai politik yang anggotanya berasal dari kalangan kelompok kepentingan tertentu, seperti buruh, petani, dan pengusaha,

- 3) Partai politik yang anggotanya berasal dari pemeluk agama tertentu (religi), seperti Islam, Kristen, Hindu, dll,
- 4) Partai politik yang anggotanya berasal dari budaya tertentu, seperti suku bangsa, bahasa, dan daerah tertentu.

Dilihat dari basis sosial dan tujuannya Partai Golkar merupakan partai politik yang beranggotakan lapisan sosial dalam masyarakat, hal ini dilihat dari anggota partainya yang terdiri dari masyarakat kelas atas sampai kelas bawah dan anggotanya tidak terikat pada agama dan budaya tertentu.

G. Hubungan Partai Politik dengan Masyarakat

Partai politik mewakili kelompok masyarakat atau persisnya kepentingan kelompok-kelompok masyarakat. Partai politik mengumpulkan dan mengartikulasikan kepentingan tersebut dan mengintegrasikan ke dalam programnya. Partai politik membutuhkan hubungan yang erat dan kuat dengan masyarakat sipil. Untuk mengenali dan memetakan pemilihnya partai politik harus memahami komposisi sosial anggota dan pemilihnya sendiri dengan mengetahui informasi yang lengkap mengenai anggota, pendukung dan konstituennya. Dengan cara ini partai politik dapat memahami hubungannya dengan masyarakat sipil. Selain itu partai politik dapat menugaskan anggota dan relawan untuk merekrut anggota baru yang berasal dari latar belakang tertentu.

Wiryanto (2011:36) mengemukakan bahwa dalam membangun dan memperkuat hubungan partai politik dengan organisasi masyarakat sipil beberapa isu berikut perlu diangkat yaitu :

- 1) Membangun kepercayaan antara partai politik dan organisasi masyarakat sipil,

- 2) Melakukan komunikasi secara rutin dan sistematis,
- 3) Konsultasi dan pertukaran informasi mengenai isu-isu strategis,
- 4) Seleksi kandidat yang didukung oleh organisasi masyarakat sipil,
- 5) Membuka partai untuk menerima kritik, saran dan rekomendasi dari organisasi masyarakat sipil,
- 6) Mengupayakan kerjasama dalam bidang pendidikan politik dan civic education,
- 7) Melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam perumusan gagasan atau penyusunan undang-undang,
- 8) Meningkatkan penggunaan media untuk komunikasi dengan masyarakat.

Hal-hal tersebut ditunjukkan agar partai politik dapat menjangkau konstituennya melalui organisasi masyarakat sipil. Partai politik semestinya dapat menjadikan organisasi masyarakat sipil sebagai mitra strategis dalam penjarangan massa partai. Wiryanto (2011:36) menyatakan pada dasarnya hubungan partai politik membutuhkan suara pemilih dalam pemilihan umum. Konstituen itu dapat diartikan sebagai pemilih pada daerah pemilihannya dan kelompok anggota atau pendukung atau simpatisan partai tertentu yang menyepakati platform tertentu.

Pengelolaan hubungan partai politik dengan masyarakat penting bagi keberlangsungan dan *survival* partai politik sebagai organisasi sosial. Seluruh organisasi berusaha untuk menstabilkan dan mengontrol lingkungan. Lingkungan sentral bagi partai politik adalah konstituennya. Hubungan dan komunikasi dengan masyarakat yang konsisten serta dua arah merupakan stabilisator bagi

partai politik. Pemilih merasa lebih akrab dan terikat pada partai serta sanggup memberikan kontribusi. (Wiryanto, 2011:36).

Ideologi dan nilai-nilai merupakan pondasi hubungan partai dengan konstituennya. Ada tiga pilar yaitu sumber daya manusia, prosedur dan mekanisme internal partai, serta sumber daya finansial. Partai harus membangun ideologi sebagai landasan pemikiran dan program partai. Jika ada ideologi dan nilai-nilai yang jelas, partai dapat mengidentifikasi kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki satu kesamaan dengan ideologi yang akan dikembangkan partai kemudian dilakukan pengorganisasian, sehingga pengembangan program dapat berjalan. Ideologi dan nilai-nilai dihadapkan pada semua masalah untuk mengembangkan tawaran solusi atas masalah-masalah, baik masalah ekonomi, sosial, antar agama dan sebagainya, sehingga ideologi akan terus hidup.

Wiryanto dalam buku Komunikasi Politik (2011:38) mengidentifikasi beberapa masalah hubungan partai politik dengan konstituennya sebagai berikut:

- 1) Lemahnya pemahaman ideologi dan sistem nilai partai, sehingga ketika timbul persoalan, tidak terlihat adanya perbedaan yang substansial antara partai satu dengan yang lainnya dalam menyelesaikan masalah. Bila ideologi menjadi suatu sistem nilai, seharusnya berdampak pada cara berpikir dan menyelesaikan persoalan. Efek dari lemahnya ideologi membuat partai menjadi pragmatis. Tidak mengherankan bahwa konstituen akan lebih pragmatis dan cenderung memilih figur, kedekatan atau resourcesnya kuat;

- 2) Hubungan partai dengan konstituennya sudah terjebak pada pola transaksional antara *buyer* dan *seller*. Untuk mendapatkan suara dalam pemilu, partai politik membeli konstituen lewat uang sembako, kaos, pembangunan masjid atau pembangunan jalan. Hal ini dilestarikan oleh hubungan anggota dewan dengan konstituennya, yang terhanyut dalam pola politik sejenis pasca pemilu. Desain keputusan politik yang sesungguhnya aspirasi dan kepentingan konstituen yang terjebak menjadi program atau kegiatan bantuan dengan biaya tinggi dan bahkan koruptif;
- 3) Belum terbangunnya suatu komunitas politik dan infrastrukturnya yang solid, dimana partai politik sebagai ujung tombak penyaluran aspirasi dan agregasi kepentingan komunitas tersebut. Suara dalam pemilu seyogyanya merupakan konsekuensi logis dari komitmen yang dibangun bersama dalam komunitas, dimana partai berada barisan terdepan;
- 4) Belum adanya peraturan partai yang mengatur dan mendesain pola hubungan dengan konstituen. Hubungan dengan individu dan tidak sistemik. Partai politik selayaknya merancang, membangun tradisi dan melembagakan pola hubungan dengan konstituen dalam suatu peraturan partai yang komprehensif. Partai politik menggunakan konstituen untuk kepentingan jangka pendek, konstituen hanya sebagai pendulang suara dalam pemilu, alat legitimasi, alat mobilisasi, tatkala instrumen partai membutuhkan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Konstituen diposisikan sebagai sub ordinat untuk memenuhi keinginan dan keinginan partai politik;

5) Komunikasi politik dan hubungan partai politik dengan konstituen pada umumnya masih satu arah. Dari elit-elit partai politik kepada konstituen. Desain program partai politik kurang mencerminkan aspirasi, dan kebutuhan konstituen yang diwakilinya.

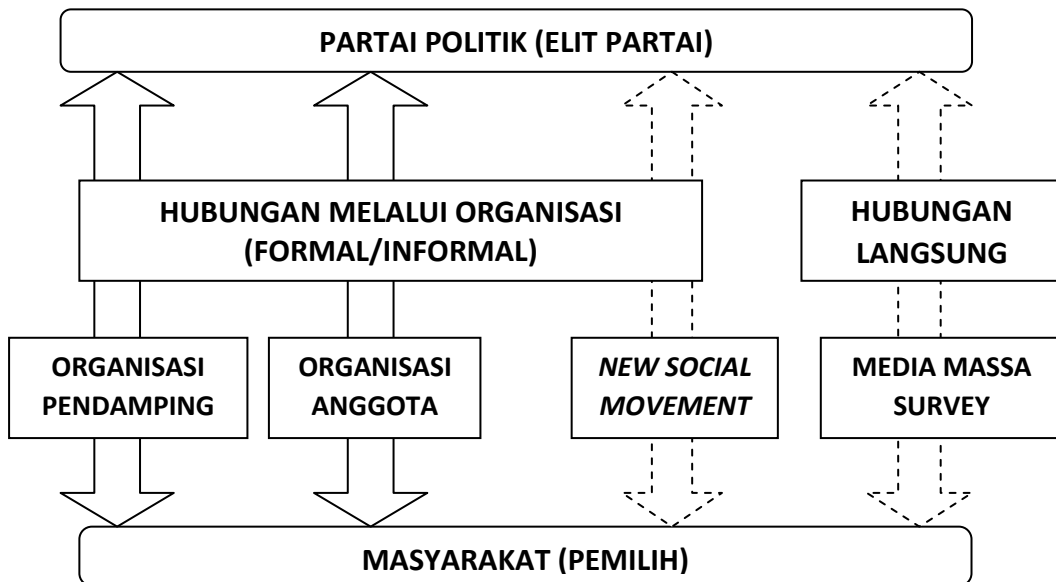
Jawaban terhadap permasalahan tersebut kemudian oleh Wiryanto (2011:39) bagaimana strategi untuk mengelola hubungan antara organisasi politik dengan masyarakat melalui dua cara yaitu :

1) Komunikasi langsung dengan pemilih, komunikasi langsung pada umumnya dilaksanakan melalui media massa dan alat-alat political marketing seperti direct mailing, kampanye email atau membangun website internet. Lebih lanjut para aktor politik berupaya untuk meningkatkan dan pemahamannya mengenai keinginan dan preferensi kelompok-kelompok pemilih melalui riset, survey dan *focus group discussion*. Dalam hubungan semacam ini terdapat suatu kelemahan, yaitu keterikatan terhadap partai agak lemah. Hubungan dengan masyarakat melalui komunikasi langsung tidak menghasilkan sebuah kesepakatan yang mengikat. Artinya pimpinan partai politik tidak dapat mengandalkan dukungan pemilih, sebab seleksi isu-isu dilakukan oleh elit partai sendiri;

2) Membangun hubungan dengan pemilih melalui organisasi lain sebagai mediator, dalam pengelolaan hubungan melalui organisasi terdapat agregasi atau preseleksi topik-topik yang tidak melibatkan elit partai. Organisasi seperti serikat buruh, sayap pemuda dalam partai atau organisasi agama membahas masalah-masalah dan memilih beberapa isu yang menjadi suatu paket tuntunan

politiknya. Kemudian organisasi tersebut memasuki perundingan dengan elit partai. Kesepakatan yang dapat dicapai pada umumnya tidak mencakup semua tuntutan, akan tetapi merupakan suatu kompromi antara kepentingan organisasi tertentu dan partai politik.

Demikian, lingkungan organisasi distabilisasi karena partai politik dapat mengandalkan dukungan organisasi tersebut. Gambaran pola hubungan antara partai politik dengan masyarakat pemilih seperti pada gambar berikut:



Hubungan Partai Politik dengan Pemilih (Wiryanto, 2011:39)

H. Partai Golongan Karya (Golkar)

Semangat kekaryaan yang terwujud dalam bentuk pengakuan terhadap Golkar bibitnya telah tumbuh ketika pembahasan penyusunan UUD 1945 sedang dilakukan. Namun kedudukannya secara formal belum diatur dengan tegas pada awal kemerdekaan, hingga keluarnya Maklumat Wakil Presiden. Pada tanggal 16 Oktober 1945 keluar Maklumat Wakil Presiden Nomor X, yang disusul kemudian

dengan Maklumat Presiden tanggal 3 November 1945, yang memberi kesempatan mendirikan partai-partai politik dengan ideologi yang beraneka ragam.

Kehidupan politik dengan sistem multi partai sejak diberlakukannya Maklumat Wakil Presiden Nomor X berlangsung sampai tahun 1957 yang dikenal dengan zaman demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. Pada zaman demokrasi parlementer ini kendali percaturan politik berada di tangan partai-partai politik, namun tidak ada satupun partai politik yang cukup dominan mengendalikan parlemen maupun pemerintahan. Keadaan tersebut mengakibatkan kabinet silih berganti mengikuti pergantian partai yang berkuasa dimasa itu.

Puncak pertentangan partai-partai politik pada masa demokrasi parlementer adalah di mana terjadi kegagalan Konstituante dalam menetapkan dasar negara pada tahun 1959. Pertentangan tersebut berpusat pada adanya partai-partai politik yang gigih mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, tetapi adapula partai-partai politik yang menghendaki dan memperjuangkan Syariat Islam sebagai dasar negara.

Untuk menyelamatkan bangsa dan negara dari kekacauan dan kehancuran, maka Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945 dimana dalam pembukaanya memuat Pancasila yang resmi dan asli sebagai dasar negara. Setelah diberlakukanya kembali UUD 1945 partai politik yang ada di Indonesia mulai disederhanakan dimana pada permulaan tahun 1961 hanya diakui 10 partai.

Penyederhanaan jumlah partai peserta pemilu setelah dikeluarkanya dekrit presiden 5 juli 1959 ternyata tidak mengurangi pertentangan ideologi di

dalam masyarakat. Pertentangan ideologi yang terjadi dimasyarakat disebabkan adanya format politik NASAKOM (Nasionalis, Agama, Komunis) yang digagas oleh Presiden Soekarno. PKI yang merupakan tulang punggung NASAKOM menuntut agar semua lembaga negara dan lembaga kemasyarakatan termasuk golongan fungsional dinasakomkan.

Sebagai perlawanan terhadap tekanan-tekanan PKI dan dalam rangka pelaksanaan UUD 1945, maka golongan – golongan fungsional yang tidak berafiliasi pada partai politik dan dengan dukungan TNI berjuang keras untuk memformalkan kehadirannya di dalam masyarakat. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1959, diangkatlah 200 orang wakil–wakil Golongan Karya di MPRS kemudian dengan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1964 diakui wakil-wakil Golongan Karya di Front Nasional.

Dengan adanya pengakuan tentang kehadiran dan legalitas golongan fungsional di MPRS dan Front Nasional, maka atas dasar dorongan TNI dibentuklah Sekretariat Bersama Golongan Karya atau disingkat Sekber Golkar pada tanggal 20 Oktober 1964. Tanggal inilah yang kemudian dijadikan hari lahirnya Golkar. Pada masa awal pertumbuhan Sekber Golkar beranggotakan 61 organisasi fungsional, kemudian berkembang menjadi 291 organisasi fungsional karena golongan–golongan fungsional lainnya sudah menyadari bahwa Sekber Golkar berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta tujuan dan haluanya adalah Demokrasi Pancasila untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam Sekber Golkar

ini kemudian dikelompokkan berdasarkan keayaannya ke dalam 7 (tujuh) Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu:

- 1) Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO)
- 2) Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI)
- 3) Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR)
- 4) Organisasi Profesi
- 5) Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM)
- 6) Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI)
- 7) Gerakan Pembangunan untuk menghadapi Pemilu 1971

Ke-7 (tujuh) KINO yang merupakan kekuatan inti dari Sekber Golkar tersebut, mengeluarkan keputusan bersama pada tanggal 4 Februari 1970 untuk ikut menjadi peserta Pemilu melalui satu nama dan tanda gambar yaitu Golongan Karya (GOLKAR). Logo dan nama ini, sejak Pemilu 1971 tetap dipertahankan sampai sekarang. Pada Pemilu 1971 ini, Sekber Golkar ikut serta menjadi salah satu konsestan. Pihak parpol memandang remeh keikutsertaan Golkar sebagai kontestan Pemilu. Mereka meragukan kemampuan komunikasi politik Golkar kepada *grassroot* level. NU, PNI dan Parmusi yang mewakili kebesaran dan kejayaan masa lampau sangat yakin keluar sebagai pemenang.

Mereka tidak menyadari kalau perpecahan dan kericuhan internal mereka telah membuat tokoh-tokohnya berpindah ke Golkar. Hasilnya di luar dugaan. Golkar sukses besar dan berhasil menang dengan 34.348.673 suara atau 62,79 % dari total perolehan suara. Perolehan suaranya pun cukup merata di seluruh Propinsi, berbeda dengan parpol yang berpegang kepada basis tradisional. NU

hanya menang di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan, Partai Katholik di Nusa Tenggara Timur, PNI di Jawa Tengah, Parmusi di Sumatera Barat dan Aceh. Sedangkan Murba tidak memperoleh suara signifikan sehingga tidak memperoleh kursi DPR.

Setelah Peristiwa G30S, Sekber Golkar dengan dukungan sepenuhnya dari Soeharto sebagai pimpinan militer melancarkan aksi-aksinya untuk melumpuhkan mula-mula kekuatan PKI. Pada dasarnya Golkar dan TNI-AD merupakan tulang punggung rezim militer Orde Baru. Semua politik Orde Baru diciptakan dan kemudian dilaksanakan oleh pimpinan militer dan Golkar. Selama puluhan tahun Orde Baru berkuasa jabatan-jabatan dalam struktur eksekutif, legislatif dan yudikatif, hampir semuanya diduduki oleh kader-kader Golkar. Keluarga besar Golongan Karya sebagai jaringan konstituen, dibina sejak awal Orde Baru melalui suatu pengaturan informal yaitu jalur A untuk lingkungan militer, jalur B untuk lingkungan birokrasi dan jalur G untuk lingkungan sipil di luar birokrasi.

Memasuki reformasi tuntutan mundur Presiden Soeharto menggema di mana-mana. Soeharto akhirnya berhasil dilengserkan oleh gerakan mahasiswa. Hal ini kemudian berimbas pada Golkar. Karena Soeharto adalah Penasehat Partai maka Golkar juga dituntut untuk dibubarkan. Saat itu Golkar dicerca di mana-mana. Akbar Tandjung yang terpilih sebagai ketua umum di era ini kemudian mati-matian mempertahankan partai. Di bawah kepemimpinan Akbar, Golkar berubah wujud menjadi Partai Golkar. Saat itu Golkar juga mengusung citra sebagai Golkar baru.

Upaya Akbar tak sia-sia, dia berhasil mempertahankan Golkar dari serangan eksternal dan krisis citra. Partai Golkar kemudian ikut dalam Pemilu 1999, berkompetisi bersama partai-partai baru di era multipartai. Pada pemilu pertama di Era Reformasi ini Partai Golkar mengalami penurunan suara di peringkat ke dua di bawah PDIP.

a. Posisi dan Peran Partai Golkar di Masa Orde Baru

Memasuki Orde Baru untuk memantapkan Golkar maka diadakanlah Musyawarah Kerja Nasional I (MUKERNAS I) Sekber Golkar dari tanggal 19 sampai dengan 11 Desember 1965, dengan tema “Konsolidasi Organisasi dan Partisipasi Terhadap Timbulnya Orde Baru.” Pada MUKERNAS ini berhasil menyusun program konsolidasi organisasi dan program perjuangan di segala bidang dalam rangka usaha menegakan Orde Baru.

Pada masa Orde Baru ini Sekber Golkar tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan ekspon-eksponen Orde Baru lainnya yang mempelopori pembaharuan kehidupan politik berdasarkan konsepsi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen serta melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang sebagai upaya pengisian cita-cita Proklamasi.

Pada masa Orde Baru, Golkar memosisikan diri sebagai kekuatan sosial politik pendukung Orde Baru dimana kekuatan sosial politik sebagai pendukung Orde Baru ini tercermin dari setiap pelaksanaan Munas Golkar yang senantiasa menghasilkan keputusan yang memberikan dukungan terhadap program-program pemerintah. Program organisasi selalu disinkronkan dengan

program pemerintah yang mendapatkan dukungan serta legitimasi dari lembaga legislatif yang dikuasai oleh Golkar.

Kedudukan Ketua Dewan Pembina Golkar yang juga merupakan Presiden (Mandataris MPR) memiliki wewenang yang dominan dalam keputusan-keputusan Golkar, bahkan dapat membatalkan keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh musyawarah organisasi dan membekukan Dewan Pengurus. Kedudukan Ketua Dewan Pembina yang dominan tersebut menyebabkan berkurangnya kemandirian di mana kebijakan-kebijakan penting dan esensial Golkar harus terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Dewan Pembina sehingga kepengurusan terkesan telah kehilangan kreatifitas khususnya yang berkaitan dengan perkembangan demokrasi.

Golkar memiliki ciri khas pada masa Orde Baru di mana ciri khas tersebut terdiri dari 4 hal utama yaitu : yang pertama dikenalnya istilah "sistem tiga jalur" (A ABRI, B Birokrasi, G GOLKAR), kedua, dominanya peranan Dewan Pembina, ketiga, pengambilan keputusan selalu dari atas (top down) dan keempat, sangat menghindari pemungutan suara (voting) untuk menentukan pimpinan organisasi disemua tingkatan atau dari ketua umum DPP sampai pada tingkatan kepengurusan terbawah.

Fenomena yang menggambarkan dari kehidupan kekuatan sosial politik terkesan terlalu kaku, struktural, institusional dan formalistik. Seluruh kekuatan sosial politik baik secara diam-diam maupun terang-terangan diarahkan untuk memberikan dukungan berupa legitimasi yang kuat kepada Pemerintahan Orde Baru. Kondisi tersebut tercipta akibat berkembangnya sistem politik yang

menempatkan pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama yang dikenal dengan nama pembangunanisme (developmentalisasi). Hal ini diterima luas oleh sebagian besar elit dan massa. Salah satu syarat pembangunan ekonomi itu ialah adanya stabilitas politik dengan jalan mengurangi partisipasi politik dan membatasi kebebasan politik.

Pembangunanisme melahirkan budaya politik teknokratik (mengutamakan kemampuan teknis/keahlian) dan birokratik (pengaturan dari atas dan sentralistik) hal ini menjadi apopulis dan apolitik. Dalam bingkai itulah golongan fungsional memastikan persemian yang subur untuk tumbuh dan dalam masa awal orde baru berhasil menciptakan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi selama 30 tahun.

b. Perkembangan Partai Golkar Era Reformasi

Sejak pelaksanaan Munaslub Golkar pada bulan juli 1998 Golkar semakin menegaskan untuk memperbaharui dirinya sesuai dengan tuntutan reformasi. Visi dan misi Partai Golkar baru kedepan memang tampak berbeda dengan Golkar lama, ada beberapa ciri yang tidak lagi melekat sebagai masa lampau, sekalipun Partai Golkar juga tetap mempertahankan citra sejarahnya sebagai kekuatan politik nasional yang memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara.

Beberapa hal yang dapat dilihat sebagai perbedaan yang signifikan dengan Golkar masa lampau adalah pembaruan Partai Golkar. Struktur kepemimpinan Partai Golkar era reformasi tidak lagi mempunyai institusi Dewan Pembina. Sebelumnya Dewan Pembina Golkar dipimpin oleh Presiden, sekarang ini

dihapus. Partai Golkar menghapus institusi Dewan Pertimbangan di propinsi, Ketua Dewan Pertimbangan itu adalah Gubernur. Partai Golkar tidak lagi Ketua Dewan Penasehat di Kabupaten/Kota, yang semula dijabat oleh Bupati.

Secara struktural dan dalam konteks kader, Partai Golkar tidak lagi mempunyai hubungan politik internal dengan pemerintah. Dengan melakukan reformasi pada struktur kepemimpinan berarti proses pengambilan keputusan internal Partai Golkar dilakukan oleh dewan pimpinan pusat sendiri. Sebagai akibat perampangan struktur kepemimpinan dalam tubuh Partai Golkar, maka pemilihan pimpinan Partai Golkar yang selama ini selalu berdasarkan tuntutan, arahan dan keputusan dari atas, maka pemilihan Pimpinan Partai Golkar justru bersumber dari hasil pelaksanaan pemilihan langsung arus aspirasi politik dalam dalam pemilihan sangat terbalik, apabila dulu diturunkan dari atas kebawah (top down) maka sekarang dipilih dari bawah (bottom up). Ketua umum DPP Partai Golkar terpilih berdasarkan pemilihan langsung dan berdasarkan aspirasi dari bawah.

Perubahan prinsip yang terjadi di tubuh Partai Golkar di era reformasi telah mengubah posisi politik dimana dahulu Golkar sulit dipisahkan dari pemerintah, dengan adanya jalur ABRI, Birokrasi dan Golkar maka sering di identikan dengan pemerintah. Partai Golkar baru adalah organisasi politik yang telah mengalami reformasi internal dan struktur melalui penyesuaian diri terhadap tuntutan reformasi. Paling tidak ada dua faktor penting yang amat mempengaruhi pembaharuan dalam tubuh Golkar. Pertama, keinginan internal

Partai Golkar dan kedua, adanya desakan eksternal. Karena Partai Golkar berada pada lingkungan dimana perubahan– perubahan terjadi sejalan dengan tuntutan reformasi, maka desakan eksternal untuk reformasi tidak dapat dihindarkan.

c. Visi dan Misi Partai Golkar

Sejalan dengan cita-cita para bapak pendiri negara (the founding fathers) kita bahwa tujuan kita bernegara adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan ikut menciptakan perdamaian dunia, maka Partai Golkar sebagai pengemban cita-cita Proklamasi menegaskan visi perjuangannya untuk menyertai perjalanan bangsa mencapai cita-citanya. Partai Golkar berjuang demi terwujudnya Indonesia baru yang maju, modern, bersatu, damai, adil dan makmur dengan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, berahlak baik, menjunjung tinggi hak asasi manusia, cinta tanah air, demokratis, dan adil dalam tatanan masyarakat madani yang mandiri, terbuka, egaliter, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja dan semangat kekaryaan, serta disiplin yang tinggi.

Berdasarkan visi tersebut maka Partai Golkar hendak mewujudkan kehidupan politik nasional yang demokratis melalui pelaksanaan agenda-agenda reformasi politik yang diarahkan untuk melakukan serangkaian koreksi terencana, melembaga dan berkesinambungan terhadap seluruh bidang kehidupan. Reformasi pada sejatinya adalah upaya untuk menata kembali

sistem kenegaraan kita di semua bidang agar kita dapat bangkit kembali dalam suasana yang lebih terbuka dan demokratis. Bagi Partai Golkar upaya mewujudkan kehidupan politik yang demokratis yang bertumpu pada kedaulatan rakyat adalah cita-cita sejak kelahirannya.

Dalam rangka mengaktualisasikan doktrin dan mewujudkan visi Partai Golkar maka misi dari perjuangan Partai Golkar adalah:

- 1) Menegakkan, mengamalkan, dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa demi untuk memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 2) Mewujudkan cita-cita Proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis, menegakkan supremasi hukum, mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan hak-hak asasi manusia.

d. Tujuan Pokok dan Fungsi Partai Golkar

Partai Golkar merupakan partai yang berasaskan Pancasila dan bersifat mandiri, terbuka, demokratis, moderat, solid, mengakar, responsif, majemuk, egaliter, serta berorientasi pada karya dan kekarya.

1) Tujuan partai Golkar

Partai Golkar merupakan sebuah partai yang memiliki tujuan:

- a) Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan UUD 1945.
- b) Mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945;

- c) Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d) Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, yang menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran, keadilan, hukum, dan Hak Asasi Manusia.

2) Tugas Pokok Partai Golkar

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud sebelumnya, maka tugas pokok Partai Golkar adalah memperjuangkan terwujudnya peningkatan segala aspek kehidupan yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, agama, sosial budaya, hukum, serta pertahanan dan keamanan nasional guna mewujudkan cita-cita nasional.

3) Fungsi

Partai Golkar yang merupakan partai politik yang berlandaskan Pancasila memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan politik yang demokrasi berlandaskan Pancasila. Fungsi–fungsi tersebut meliputi :

- a) Menghimpun persamaan sikap politik dan kehendak untuk mencapai cita-cita dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- b) Mempertahankan, mengemban, mengamalkan, dan membela Pancasila serta berorientasi pada program pembangunan di segala bidang tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan;

c) Menyerap, menampung, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat, serta meningkatkan kesadaran politik rakyat dan menyiapkan kader-kader dengan memperhatikan kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

e. Struktur Organisasi, Wewenang dan Kewajiban

Struktur Organisasi Partai Golkar terdiri atas tingkat Pusat, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Kecamatan, dan tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya, yang masing-masing berturut-turut dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, Pimpinan Kecamatan dan Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain.

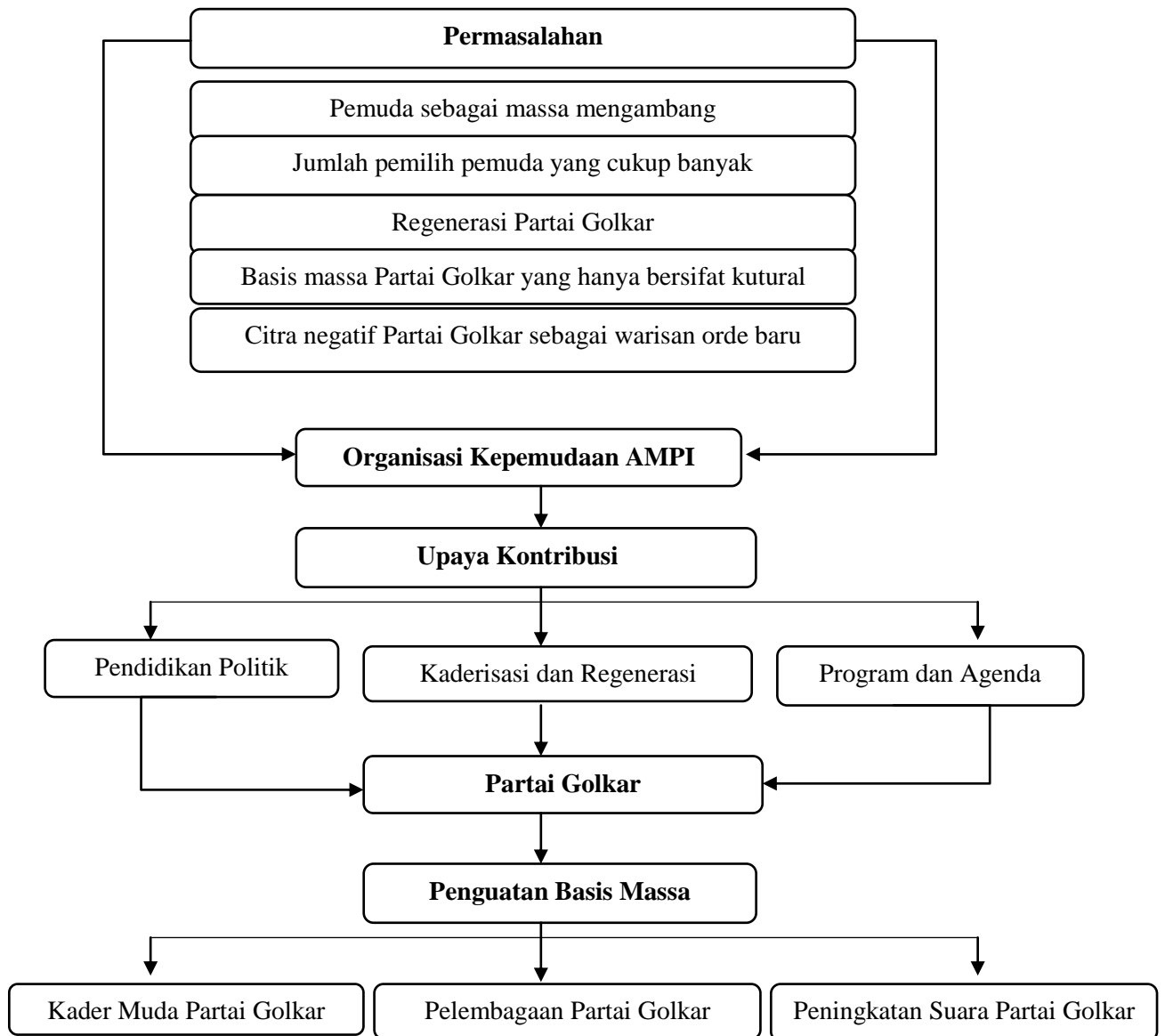
I. Kerangka Pemikiran

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa penulis akan lebih fokus pada bagaimana kontribusi organisasi kepemudaan dari Partai Golkar khususnya AMPI dalam penguatan basis massa. Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) yang telah lama berdiri menjadi motor penggerak Golkar di bidang kepemudaan. Untuk itu kajian ini melibatkan organisasi kepemudaan AMPI dalam penguatan basis massa Partai Golkar. Seperti diketahui bersama bahwa Partai Golkar memiliki massa yang cukup kuat karena partai ini merupakan warisan sekaligus penguasa orde baru. Untuk itu perlu dibentuk sebuah wadah yang memiliki afiliasi dengan Partai Golkar. AMPI merupakan organisasi yang berafiliasi dengan Partai Golkar khususnya pada bidang kepemudaan. Dalam

penelitian ini penulis menyoroti bagaimana kinerja ormas tersebut dalam menguatkan dukungan terhadap Partai Golkar.

Fokus kajian dari penelitian ini meliputi bagaimana organisasi tersebut berperan aktif melibatkan diri dalam menguatkan suara Partai Golkar untuk setiap pemilihan umum. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana visi dan misi yang akan melandasi tujuan dari kinerja organisasi tersebut. Bagaimana visi dan misi itu diemban serta diimplemetasikan dalam setiap program-program yang telah dicanangkan. Kemudian program apa yang telah dicanangkan serta bagaimana kedepan program tersebut dapat berjalan. Dalam kajian program ini tentu berkaitan dengan periode kepengurusan AMPI, ada program jangka pendek dan program jangka panjang. Dengan memahami program-programnya diharapkan mampu menganalisis sejauh mana kebermanafaatan AMPI bagi basis massa Partai Golkar.

Fokus kajian terakhir penulis melihat dari kaderisasi organisasi tersebut karena menjadi sebuah keniscayaan bahwa organisasi harus menyiapkan kader-kader untuk menjadi pemimpin dikemudian hari. Dalam fungsi pengkaderan kajian ini memfokuskan diri pada penjarangan dari basis massa kemudian penjadi penyuplai kader terbaik di Partai Golkar sehingga regenerasi pengurus partai dapat tercapai. Untuk lebih lengkapnya digambarkan dalam bagan di bawah ini:



Bagan 2.1. Kerangka Pemikiran Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut sugiyono (2010:14) sering disebut penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Selaras dengan pandangan tersebut bahwa penelitian ini tidak dalam situasi yang dikondisikan atau dibuat dalam keadaan tertentu, penelitian ini murni tanpa adanya situasi yang nyata untuk dianalisis. Metode penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam yaitu suatu data yang mengandung makna. Dalam penelitian ini penulis mencoba mengungkapkan dan menggambarkan kontribusi AMPI sebagai organisasi kepemudaan dalam menguatkan basis massa Partai Golkar.

Anslem Strauss dan Juliet Corbin (2013:6) menyatakan bahwa penelitian kualitatif dilakukan oleh peneliti di bidang ilmu sosial dan perilaku, juga oleh para peneliti dibidang-bidang yang menyoroiti masalah yang terkait dengan perilaku dan peranan manusia. Jenis penelitian ini dapat digunakan untuk meneliti organisasi, kelompok, dan individu. Jelas bahwa menurut teori ini pendekatan kualitatif sangat relevan untuk meneliti organisasi yaitu AMPI.

Organisasi kepemudaan AMPI adalah objek dari penelitian ini yang datanya akan diperoleh di lapangan, maka diperlukan pendekatan penelitian yang relevan dalam konteks ini. Senada dengan Maxwel dalam Alwasilah (2011:64) yang menyatakan kehebatan paradigma kualitatif didasarkan pada pemahaman makna yang merujuk pada kognisi, afeksi, intensi dan apa saja yang terpayung dalam

perspektif partisipan sehingga peneliti mampu memahami permasalahan secara holistik. Inilah yang menjadi alasan mengapa pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini.

Dengan pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran permasalahan di lapangan sehingga penulis mampu memahami untuk menemukan dan menginterpretasikan masalah tersebut sehingga akan diperoleh data yang maksimal dari penelitian ini. Menurut Anselm Strauss dan Juliet Corbin (2013:7) untuk melakukan penelitian kualitatif ini seorang peneliti harus memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk meninjau kembali dan menganalisis situasi secara kritis, mengenali dan menghindari bias, mendapatkan data yang sah dan andal dan berpikir secara abstrak. Untuk melakukannya keterampilan yang dibutuhkan meliputi:

- a. Kepekaan teoretis dan sosial
- b. Kemampuan menjaga jarak analisis, sekaligus memanfaatkan pengalaman terdahulu dan pengetahuan teoritis untuk memahami apa yang dilihat.
- c. Kemampuan pengamatan yang cermat.
- d. Kecakapan berinteraksi.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini memfokuskan pada organisasi kepemudaan khususnya Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI). Fokus penelitiannya terletak pada kontribusi organisasi tersebut dalam memperkuat basis massa Partai Golkar di provinsi Jawa Tengah.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Jawa Tengah yang beralamat di Kompleks Sekretariat DPD Partai Golkar Jawa Tengah di Jl. Kyai Shaleh nomor 1 di Kota Semarang, Jawa Tengah. Sedangkan waktu penelitian akan dilakukan selama dua bulan sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat validitas yang tinggi dengan rincian waktu sebagai berikut :

Objek Penelitian	Bulan					
	1			2		
Observasi Awal AMPI	■					
Wawancara Responden AMPI			■			
Studi Dokumentasi					■	
Validasi Data						■

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dan informasi melalui dua cara yaitu:

a. Data Primer

Data ini diperoleh melalui informan dengan menggunakan teknik wawancara. Dalam pelaksanaan teknik ini penulis mengumpulkan data melalui komunikasi langsung dengan informan.

b. Data Sekunder

Data ini diperoleh melalui studi kepustakaan, melalui kajian buku-buku dan literatur yang relevan dengan objek yang diteliti yaitu tentang organisasi sayap partai dan bagaimana peranannya. Data tersebut merupakan data yang terdokemntasikan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang direncanakan untuk digunakan di lapangan adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data dengan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Merupakan suatu bentuk komunikasi atau percakapan untuk memperoleh informasi. Alwasilah (2011:110) wawancara meminta waktu dan kesungguhan sang peneliti untuk mengumpulkan informasi yang tidak mungkin diperoleh dari observasi. Peneliti akan secara langsung melakukan wawancara dengan informan kunci, yaitu orang yang dianggap paham dan mengetahui masalah yang akan diteliti dengan menggunakan daftar pertanyaan mendalam.

Sugiyono (2011:317) mengungkapkan bahwa wawancara digunakan teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden lebih mendalam dan jumlah responden sedikit.

Untuk mencari tingkat pemahaman sedalam itu memerlukan cara penggalian yang handal seperti yang diungkapkan Sanafiah Faisal dalam Burhan Bungin (2010:67) dengan wawancara mendalam dapat digali apa yang tersembunyi dalam sanubari seseorang yang menyangkut masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Wawancara akan dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang sebelumnya telah disusun oleh penulis sebagai acuan dan sifatnya tidak mengikat sehingga banyak pertanyaan baru yang muncul pada saat wawancara terkait dengan peran AMPI dalam penguatan basis massa partai Golkar

Dalam wawancara penelitian ini digunakan untuk memperoleh data primer dari responden yang merupakan pengurus aktif AMPI berupa bagaimana pengalaman, pendapat, pengetahuan serta kontribusi responden terhadap organisasi serta berkaitan dengan Partai Golkar. Dalam wawancara ini peneliti bertujuan untuk memperoleh data deskriptif mengenai kontribusi AMPI dalam berhubungan dengan basis massa Partai Golkar serta cara bagaimana organisasi tersebut membangun komunikasi dengan massa partai sehingga proses penguatan basis massa dapat diuraikan dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini penulis menemui narasumber dengan tiga tipe sebagai berikut:

- 1) Wawancara kepada pengurus Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia yaitu Aminulah Yunus S.Pdi selaku Ketua DPD AMPI Jawa Tengah, Meki condro Negoro SH selaku Sekretaris Jenderal DPD AMPI Jawa Tengah dan Indah Puspita Sari selaku Anggota biasa DPD AMPI Jawa Tengah,

- 2) Wawancara kepada pengurus DPD Partai Golkar Jawa Tengah yaitu kepada Muhammad Sholeh ST yang merupakan Sekretaris bidang kepemudaan DPD Partai Golkar Jawa Tengah.

b. Studi dokumentasi

Cara pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca sumber-sumber literatur berupa buku, jurnal, majalah, Koran dan beberapa situs tentang AMPI mengenai bagaimana kedua organisasi ini bekerja melakukan berbagai kegiatan organisasi yang terdokumentasi. Dalam paradigma kualitatif dokumentasi dapat dibedakan menjadi record dan dokumen. Menurut kamus *Webster's New Collegiate Dictionary* dalam Alwasilah (2011:111) sebagai berikut “*an original of official paper relied on as the basis, proof, or support of something, something that record*” yang dengan singkat oleh Guba dan Lincoln membedakannya sebagai berikut : *record* segala catatan tertulis yang disiapkan seseorang atau lembaga untuk pembuktian sebuah peristiwa atau menyajikan perhitungan, sedangkan dokumen adalah barang yang tertulis atau terfilmkan selain record yang tidak disiapkan khusus atas permintaan peneliti.

Literatur ini dapat dikatakan sebagai sumber data tertulis yang terbagi dalam dua kategori, yaitu sumber resmi dan tidak resmi. Sumber resmi dibuat oleh lembaga/perorangan atas nama lembaga, sedangkan sumber tidak resmi dibuat oleh individu tidak atas nama lembaga. Dalam pengambilan data dari studi dokumentasi ini, data yang akan diambil adalah data primer untuk menguatkan data sekunder. Studi dokumentasi memfokuskan diri pada analisis dan pemahaman terhadap dokumen-dokumen AMPI sehingga menjadi bahan

analisis dari mulai Anggarasn Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Visi dan Misi, Struktur Kepengurusan, Program Kerja dan dokumentasi lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Dokumentasi tersebut mencakup berbagai hal yang telah dibukukan atau diarsipkan sehingga peneliti dapat melacak kinerja kedua organisasi tersebut dalam berbagai kegiatan. Tujuannya adalah melihat keterkaitan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan proses penguatan basis massa Partai Golkar.

Dokumen yang penulis peroleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

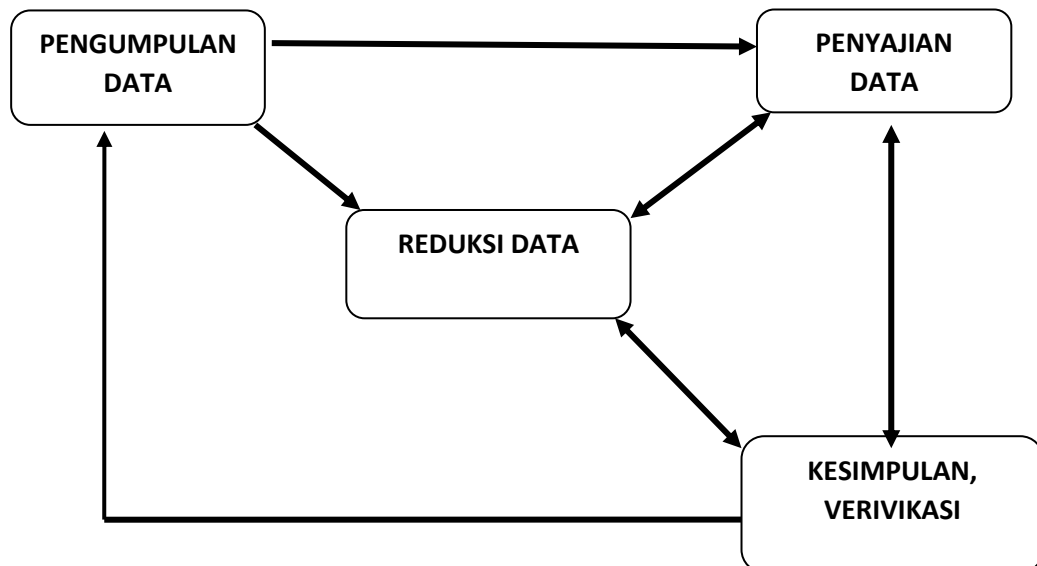
- 1) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga AMPI
- 2) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar
- 3) Hasil Rapat kerja Nasional AMPI tahun 2010
- 4) Peraturan Organisasi AMPI (PO) AMPI
- 5) Surat Keputusan DPP AMPI tentang struktur organisasi DPD AMPI Jawa Tengah
- 6) Laporan Pertanggung Jawaban Musyawarah Daerah AMPI Jawa Tengah tahun 2010

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis penelitian ini adalah teknik kualitatif yang informasinya digali melalui wawancara mendalam dan dikategorisasikan kemudian bersama informasi yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan untuk mempertajam analisis tentang kecenderungan penemuan dalam penelitian.

Dalam analisis penelitian ini tidak menggunakan data-data statistik untuk memahami data secara mendalam. Analisis dimulai sari tahap demi tahap

sehingga analisis data yang diperoleh bersifat konsisten. Dalam penelitian kualitatif ini menggunakan metode berpikir logika induktif abstraktif yaitu berfikir dari khusus ke umum. Menurut sanafiah Faisal dalam Burhan Bungin (2010:69) kegiatan penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan antara pengumpulan data dan proses analisis data yang prosesnya berbentuk siklus. Siklus ini seperti apa yang digambarkan oleh Miles dan Huberman sebagai berikut :



Model Analisis Data Miles dan Huberman (diolah)

Gambar tersebut menunjukkan sifat interaktif antara pengumpulan data dan analisis data. Analisa ini bertujuan agar temuan-temuan dari kasus-kasus yang terjadi di lokasi penelitian dapat dikaji lebih mendalam dan fenomena yang ada dapat digambarkan secara terperinci, sehingga apa yang menjadi pertanyaan dalam penelitian nantinya bisa terjawab dengan maksimal.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan penulis maka dapat disimpulkan temuan penelitian sebagai berikut:

1. Hubungan politik AMPI dengan Partai Golkar bersifat afiliatif., artinya AMPI memiliki kecenderungan kedekatan politik dengan Partai Golkar karena secara historis AMPI dibentuk oleh Partai Golkar.
2. AMPI memiliki kontribusi bagi penguatan basis massa kepemudaan Partai Golkar. Penguatan basis massa tersebut dilandasi afiliasi politik AMPI terhadap Partai Golkar. Implementasi penguatan dilakukan secara organisasional maupun secara personal. Kegiatan-kegiatan yang selama ini dilakukan yaitu pengiriman relawan ke daerah bencana, bakti sosial, seminar sebagai bentuk kegiatan ilmiah, safari ramadhan, kaderisasi, pengembangan usaha dan latihan keterampilan kader, bela negara..
3. Penguatan basis massa Partai Golkar di Jawa Tengah oleh AMPI dapat ditelusuri dengan terciptanya kader yang berkualitas dengan jumlah yang cukup banyak, pelembagaan Partai Golkar dan Peningkatan suara Partai Golkar dalam pemilu.
4. Hambatan dalam upaya penguatan basis massa Partai Golkar didasarkan pada tiga permasalahan yaitu permasalahan internal organisasi yang berkaitan dengan keaktifan anggota dalam menjalankan roda organisasi, minimnya anggaran

yaitu sumber anggaran yang tidak menentu, dan pragmatismenya sikap masyarakat yang terjebak pada pola pikir kapitalis..

B. SARAN

Setelah menganalisa temuan penulis dalam penelitian ini maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kontribusi organisasi kepemudaan AMPI dalam penguatan basis massa Partai Golkar saat ini secara umum sudah berjalan baik, namun belum dapat diukur secara pasti tingkat efektivitasnya, perlu dilakukan sebuah standar kinerja yang dapat mengukur tingkat keberhasilan tersebut. Maka berdasarkan penelitian ini penulis memberikan rekomendasi adanya penelitian lanjutan bagaimana basis massa memilih Partai Golkar sebagai pilihan politiknya.
2. Dalam mengatasi masalah anggaran semestinya dapat ditingkatkan dengan menyediakan post anggaran yang pasti. Dengan demikian AMPI perlu melakukan rencana kegiatan yang terstruktur dan terjadwal sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dipantau.
3. Untuk mengatasi permasalahan pragmatisme di masyarakat perlu diupayakan pendidikan politik kepada masyarakat secara masif sehingga pendidikan politik tidak hanya dilakukan pada saat menjelang pemilu saja tetapi bersifat konyinyu..
4. Dalam era digital ini pemanfaatan media sosial dilakukan secara maksimal. Karena jutaan rakyat Indonesia khususnya pemuda telah banyak yang memakai media sosial dalam kegiatan sehari-hari sehingga segala bentuk kegiatan dapat dijangkau banyak orang dalam waktu singkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkhatib, Umar Ibnu. 2009. *Dari Beringin ke Beringin: Sejarah, Kemelut, Resistensi dan Daya Tahan Partai Golkar*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Alwasilah ,A Chaedar. 2011. *Pokoknya Kualitatif*. Bandung : Pustaka Jaya
- Andriadi, Fayakhun. 2014. *Golkar Transformer*. Jakarta: RMBOOKS.
- Fatwa, A.M . 2014. *Transisi Demokrasi diatas Hamparan Korupsi : Buah Pikir Reflektif atas carut marut reformasi*. Jakarta : The Fatwa Center
- Burhan, Bungin. 2010. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Duverger, Maurice. 1984. *Partai Politik Dan Kelompok-Kelompok Penekan*. Terjemahan Laila Hasyim. Yogyakarta: Bina Aksara
- Firmanzah. 2008. *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Huntington, Samuel P. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ilahi, Mohammad Takdir. 2012. *Nasionalisme Dalam Bingkai Pluralitas Bangsa: Paradigma Pembangunan dan Kemandirian Bangsa*. Yogyakarta : AR-RUZZ MEDIA
- Kartono, Kartini. 2011. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Bandung: Raja Grafindo Persada
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 2013. *Modul I Untuk Pemilih Pemula*. Jakarta : KPU
- Litbang Kompas. 2003. *Partai-Partai Politik Indonesia-Ideologi dan Program*. Jakarta: Penbit Buku Kompas
- Lembaga Survei Indonesia. 2015.
- Maran , Rafael Raga. 1999. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Marijan, Kacung. 2010. *Sistem Politik Indonesia : Konsolidasi Pasca Orde Baru*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Prawira, Rusadi Kanta. 2001. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung : Sinar Baru Algesindo
- Pratwi, Yunda. *Analisis Perolehan Suara Partai Golkar Pada Pemilu 1999 di Indonesia*. Dalam Jurnal Dinamika Politik.Vol.1.No.2.Oktober 2012 Universitas Sumatera Utara

- Putra, Fadilah. 2003. *Partai politik dan kebijakan publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Singgih, Hendaru Sukmono.2013.” Penguatan Pelembagaan Internal Partai Politik” dalam *Artikel Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Brawijaya*.
- Soetjipto, Ani W dan Shelly Adelina. 2012. *Partai Politik dan Strategi Gender: Pelajaran dari Tiga Partai*. Jakarta: Parentesis
- Saidi, Ridwan. 1993. *GOLKAR Pasca Pemilu 1992*. Jakarta :PT Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Straus, Anselm dan Juliet Corbin. 2013. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Tata Langkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Surbakti, Ramlan. 2007. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Grasindo
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 2008, Jakarta : Aksara
- Syabani, Syahril dkk. 2002. *Sosiologi dan Politik*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Tandjung, Akbar. 2007. *The Golkar Way : Resistensi Golkar Di Tengah Turbulensi Era Transisi*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- 2013. *Pedoman Pembentukan & Pembubaran ORMAS*. Yogyakarta:Pustaka Yustisia
- Winarno, Budi. 2007. *Sistem Politik Indonesia : Era Reformasi*.Yogyakarta : MedPress
- Wiryanto. 2011. *Komunikasi Politik*. Surakarta : UNS Press

Internet

www.kpu.go.id di akses pada tanggal 10 Februari 2015

<http://www.golkarjateng.com/ormas-sayap/ampi> diakses pada tanggal 10 februari 2015

[Journal.ugm.ac.id](http://journal.ugm.ac.id) diakses pada tanggal 15 Maret 2015

LAMPIRAN



INSTRUMEN PENELITIAN SKRIPSI

**“KONTRIBUSI ORGANISASI KEPEMUDAAN AMPI DALAM PENGUATAN
BASIS MASSA PARTAI GOLKAR DI JAWA TENGAH”**

Oleh :

Nama : Ulul Mukmin

NIM : 3301411135

Program Studi : Pendidikan PKn

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL
JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN
2015**

A. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif instrumen penelitian menjadi objek yang sangat penting guna menentukan validitas dan realibilitas data. Pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis, karena tujuan utama penelitian adalah untuk mengumpulkan data guna memecahkan permasalahan yang ada. Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, namun setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumene penelitian sederhana, dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara (Sugiyono, 2010:307).

Dalam penelitian kualitatif peneliti sebagai instrumen maksudnya adalah peneliti dapat melihat secara jelas permasalahan dilapangan secara komprehensif dan holistik. Rancangan penelitian yang ada masif bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki obyek penelitian.

B. Sumber Data

1. Data Primer

Data ini diperoleh melalui informan dengan menggunakan teknik wawancara. Dalam pelaksanaan teknik ini penulis mengumpulkan data melalui komunikasi langsung dengan informan. Peneliti turun langsung ke daerah penelitian untuk mengumpulkan data dalam berbagai bentuk.

2. Data Sekunder

Data ini diperoleh melalui studi kepustakaan, melalui kajian buku-buku dan literatur yang relevan dengan obyek yang diteliti yaitu tentang organisasi sayap partai dan bagaimana perannannya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang direncanakan untuk digunakan di lapangan adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data dengan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Merupakan suatu bentuk komunikasi atau percakapan untuk memperoleh informasi. Alwasilah (2011:110) wawancara meminta waktu dan kesungguhan sang peneliti untuk mengumpulkan informasi yang tidak mungkin diperoleh dari observasi. Peneliti akan secara langsung melakukan wawancara dengan key Informan, yaitu orang yang dianggap paham dan mengetahui masalah yang akan diteliti dengan menggunakan daftar pertanyaan mendalam.

Sedangkan Sugiyono (2011:317) mengungkapkan bahwa wawancara digunakan teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden lebih mendalam dan jumlah responden sedikit. Maka dari itu untuk mencari tingkat pemahaman sedalam itu memerlukan cara penggalan yang handal seperti yang diungkapkan Sanafiah Faisal dalam Burhan Bungin (2010:67) dengan wawancara mendalam dapat digali apa yang tersembunyi dalam sanubari seseorang yang menyangkut masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Wawancara akan dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang sebelumnya telah disusun oleh penulis sebagai acuan dan sifatnya tidak mengikat sehingga banyak pertanyaan baru yang muncul pada saat wawancara terkait dengan peran AMPI dalam penguatan basis massa partai Golkar.

Dalam wawancara penelitian ini digunakan untuk memperoleh data primer dari responden yang merupakan pengurus aktif AMPI berupa bagaimana pengalaman, pendapat, pengetahuan serta kontribusi responden terhadap organisasi serta berkaitan dengan Partai Golkar. Dalam wawancara ini peneliti bertujuan untuk memperoleh data deskriptif mengenai kontribusi AMPI dalam berhubungan dengan basis massa Partai Golkar serta cara bagaimana organisasi tersebut membangun komunikasi dengan massa partai sehingga proses penguatan basis massa dapat diuraikan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menemui narasumber dengan dua tipe sebagai berikut:

- 3) Wawancara kepada pengurus Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia yaitu bapak Aminulah Yunus S.Pdi selaku Ketua DPD AMPI Jawa Tengah, bapak Meki condro Negoro SH selaku Sekretaris Jenderal DPD AMPI Jawa Tengah dan saudari Indah Puspita Sari selaku Anggota biasa DPD AMPI Jawa Tengah,
- 4) Wawancara kepada pengurus DPD Partai Golkar Jawa Tengah yaitu kepada bapak Muhammad Sholeh ST yang merupakan Sekretaris bidang kepemudaan DPD Partai Golkar Jawa Tengah.

2. Studi dokumentasi

Cara pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca sumber-sumber literatur berupa buku, jurnal, majalah, Koran dan beberapa situs tentang AMPI dan AMPG mengenai bagaimana kedua organisasi ini bekerja melakukan berbagai kegiatan organisasi yang terdokumentasi. Dalam paradigma kualitatif dokumentasi dapat dibedakan menjadi record dan dokumen. Menurut kamus *Webster's New Collegiate Dictionary* dalam Alwasilah (2011:111) sebagai berikut “*an original of official paper relied on as the basis, proof, or support of something, something that record*” yang dengan singkat oleh Guba dan Lincoln membedakannya sebagai berikut : *record* segala catatan tertulis yang disiapkan seseorang atau lembaga untuk pembuktian sebuah peristiwa atau menyajikan perhitungan, sedangkan dokumen adalah barang ang tertulis atau terfilmkan selain record yang tidak disiapkan khusus atas permintaan peneliti.

Literatur ini dapat dikatakan sebagai sumber data tertulis yang terbagi dalam dua kategori, yaitu sumber resmi dan tidak resmi. Sumber resmi dibuat oleh lembaga/perorangan atas nama lembaga, sedangkan sumber tidak resmi dibuat oleh individu tidak atas nama lembaga. Dalam pengambilan data dari studi dokumentasi ini, data yang akan diambil adalah data primer untuk menguatkan data sekunder. Studi dokumentasi memfokuskan diri pada analisis dan pemahaman terhadap dokumen-dokumen AMPI sehingga menjadi bahan analisis dari mulai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Visi dan Misi, Struktur Kepengurusan, Program Kerja dan dokumentasi lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Dokumentasi tersebut mencakup berbagai hal yang telah dibukukan atau diarsipkan sehingga peneliti dapat melacak kinerja kedua organisasi tersebut dalam berbagai kegiatan. Tujuannya adalah melihat keterkaitan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan proses penguatan basis massa Partai Golkar. Dokumen yang penulis peroleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 7) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga AMPI
- 8) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar
- 9) Hasil Rapat kerja Nasional AMPI tahun 2010
- 10) Peraturan Organisasi AMPI (PO) AMPI
- 11) Surat Keputusan DPP AMPI tentang struktur organisasi DPD AMPI Jawa Tengah

12) Laporan Pertanggung Jawaban Musyawarah Daerah AMPI Jawa Tengah tahun 2010

D. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini memfokuskan pada organisasi kepemudaan khususnya Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) merupakan organisasi kepemudaan dari Partai Golongan Karya. Fokus penelitiannya terletak pada kontribusi kedua organisasi tersebut dalam memperkuat basis massa partai di provinsi Jawa Tengah. Beberapa Objek penelitian yaitu:

1. Organisasi Kepemudaan AMPI
2. Hubungan AMPI terhadap Partai Golkar
3. Hubungan AMPI dengan Basis Massa Partai Golkar
4. Kontribusi AMPI terhadap Penguatan Basis Massa Partai Gokar
5. Basis massa Partai Golkar
6. Fungsi partai dalam rekrutmen politik
7. Hubungan Golkar dengan AMPI

INSTRUMEN PENELITIAN

Nama : Ulul Mukmin

Prodi : Pendidikan PKn

Judul Skripsi : Kontribusi Organisasi Kepemudaan AMPI dalam Penguatan Basis Massa Partai Golkar di Jawa Tengah

No	Fokus Penelitian	Indikator Penelitian	Lembar Instrumen	Subjek Penelitian	Teknik Pengumpulan data
1	Hubungan AMPI dengan Basis Masa Partai Golkar	Pemahaman Organisasi Kepemudaan AMPI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se jauh mana anda mengetahui organisasi kepemudaan AMPI? 2. Kapan organisasi AMPI ini mulai berdiri? 3. apa visi dan misi AMPI ? 4. Bagaimana sejarah berdirinya AMPI? 5. Apa tujuan didirikannya AMPI? 6. apa saja program kerja dari AMPI? 7. Berapakah jumlah anggota AMPI saat ini di DPD AMPI Jateng? 8. Bagaimana pendanaan AMPI? 9. Bagaimana rekrutmen di dalam AMPI? 10. Apakah syarat-syarat untuk menjadi anggota AMPI? 11. Bagaimana pola kaderisasi di dalam AMPI? 	DPD AMPI Jawa Tengah	Wawancara Studi Dokumentasi

		<p>Hubungan AMPI dan Partai Golkar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana hubungan AMPI dengan Partai Golkar? 2. Apakah ada anggota AMPI yang menjadi pengurus Partai Golkar? 3. Bagaimana kontribusi AMPI dalam menghasilkan kader untuk Partai Golkar? 4. Apakah keuntungan bagi anggota AMPI yang akan maju dalam mencalonkan diri dari Partai Golkar? 5. Apakah ada anggota AMPI yang menjadi anggota DPR atau DPRD? 6. Bagaimana peran AMPI dalam menampung aspirasi untuk Partai Golkar? 7. Bagaimana peran AMPI bagi Partai Golkar? 8. Pada pemilu 2014 yang lalu, bagaimana usaha yang dilakukan AMPI untuk menguatkan massa Partai Golkar? 9. Apakah ada pengurus atau alumni AMPI Jateng yang menjadi pengurus Partai Golkar baik di daerah maupun di pusat? 10. Apakah ada bantuan baik moril maupun materil dari 		
--	--	--	--	--	--

		Partai Golkar? 11. Jika ada batuan dari Partai Golkar, bagaimana bentuk bantuan tersebut? 12. Bagaimana peran AMPI dalam membangun pola kaderisasi bagi Partai Golkar?		
	Hubungan AMPI dengan Basis Massa Partai Golkar	1. Apa yang saudara ketahui tentang basis massa partai? 2. Apa yang saudara pahami tentang basis massa Partai Golkar? 3. Apakah perbedaan basis massa partai Golkar pada masa orde baru dan reformasi? 4. Bagaimana basis massa Partai Golkar di Jawa Tengah? 5. Bagaimana hubungan AMPI dengan basis massa Partai Golkar? 6. Bagaimana basis massa kepemudaan Partai Golkar? 7. Bagaimana AMPI mengelola basis kepemudaan Partai Golkar? 8. Sebagai organisasi kepemudaan Golkar bagaimana strategi AMPI dalam mewadahi pemuda untuk terlibat dalam dunia politik?		

			<p>9. Bagaimana AMPI berhubungan dengan basis massa Partai Golkar selain pemuda?</p> <p>10. Apa perbedaan hubungan AMPI dalam hubungannya dengan kepemudaan?</p> <p>11. Bagaimana hubungan AMPI dengan ormas Partai Golkar yang lain?</p> <p>12. Apa yang akan dilakukan AMPI dalam menguatkan basis massa Partai Golkar?</p> <p>13. Bagaimana strategi AMPI dalam mengelola basis massa Golkar di Jawa Tengah?</p>		
2	<p>Kontribusi AMPI dalam Penguatan Basis Massa Partai Golkar</p>	<p>Kontribusi AMPI terhadap Penguatan Basis Massa Partai Golkar</p>	<p>1. Bagaimana kontribusi AMPI dalam Penguatan basis massa partai Golkar di Jawa Tengah?</p> <p>2. Bagaimana bentuk nyata kontribusi AMPI untuk Partai Golkar?</p> <p>3. Apakah AMPI melakukan pendidikan politik terhadap basis massa partai Golkar?</p> <p>4. Bagaimana menjaga konstituen Partai Golkar yang selama ini menjadi pemilih partai Golkar?</p> <p>5. Bagaimana melakukan perluasan kuantitas basis massa yang selama ini belum</p>		

		<p>tersentuh oleh AMPI?</p> <p>6. Apakah ada kewajiban setiap anggota AMPI untuk membuat jaringan ke konstituen?</p> <p>7. Bagaimana strategi politik AMPI dalam memasarkan Partai Golkar di basis massa?</p> <p>8. Bagaimana hubungan AMPI di tingkat Provinsi dengan AMPI di tingkat kabupaten/kota?</p> <p>9. Apakah setiap kordinasi dengan pengurus kabupaten/kota ada agenda khusus yang membahas berkaitan dengan konstituen Partai Golkar?</p> <p>10. Untuk kedepan bagaimana rencana yang kan dibangun untuk menguatkan basis massa Parta Golkar?</p> <p>11. Bagaimana kerjasama AMPI dengan ormas Golkar maupun organisasi sayap lainnya untuk menguatkan Golkar di akar rumput?</p>		
	<p>Hambatan AMPI dalam Penguatan Basis Massa Partai Golkar</p>	<p>1. Dalam menjalankan organisasi ini apa saja hambatan yang dihadapi?</p> <p>2. Bagaimana merekatkan antar anggota dalam mencapai tujuan untuk Partai Golkar?</p> <p>3. Dalam melaksanakan program</p>		

			<p>kerja apa hambatan yang dihadapi?</p> <p>4. Bagaimana kesulitan yang dihadapi dalam berkoordinasi dengan pengurus AMPI di daerah kabupaten/kota?</p> <p>5. Bagaimana hambatan AMPI dalam mengelola basis massa Partai Golkar?</p> <p>6. Bagaimana hambatan AMPI dalam komunikasi dengan para pemuda?</p> <p>7. Bagaimana peluang dan tantangan AMPI dalam menguatkan basis massa Partai Golkar?</p> <p>8. Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam penguatan basis massa Partai Golkar?</p> <p>9. Bagaimana upaya yang dilakukan AMPI dalam mengatasi hambatan tersebut?</p> <p>10. Bagaimana peran Partai Golkar dalam membantu menghadapi berbagai masalah tersebut?</p>		
5	Hubungan Politik Partai Golkar dengan	Hubungan AMPI dengan Partai Golkar	<p>1. Bagaimana hubungan AMPI dengan Partai Golkar?</p> <p>2. Apakah ada anggota AMPI yang menjadi pengurus Partai Golkar?</p> <p>3. Bagaimana kontribusi AMPI</p>	DPD Partai Golkar Jawa Tengah	Wawancara Studi Dokumentasi

	AMPI		<p>dalam menghasilkan kader untuk Partai Golkar?</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Apakah keuntungan bagi anggota AMPI yang akan maju dalam mencalonkan diri dari Partai Golkar? 5. Apakah ada anggota AMPI yang menjadi anggota DPR atau DPRD? 6. Bagaimana peran AMPI dalam menampung aspirasi untuk Partai Golkar? 7. Bagaimana peran AMPI bagi Partai Golkar? 8. Pada pemilu 2014 yang lalu, bagaimana usaha yang dilakukan AMPI untuk menguatkan massa Partai Golkar? 9. Apakah ada pengurus atau alumni AMPI Jateng yang menjadi pengurus Partai Golkar baik di daerah maupun di pusat? 10. Apakah keuntungan bagi anggota AMPI yang akan maju dalam mencalonkan diri dari Partai Golkar? 11. Apakah ada bantuan baik moril maupun materil dari Partai Golkar untuk kedua organisasi tersebut? 		
--	------	--	--	--	--

			<p>12. Jika ada bantuan dari Partai Golkar, bagaimana bentuk bantuan tersebut?</p> <p>13. Bagaimana peran AMPI dalam membangun pola kaderisasi bagi Partai Golkar?</p>		
		<p>AMPI dengan Basis Massa Partai Golkar</p>	<p>1. Apakah yang saudara ketahui tentang basis massa partai?</p> <p>2. Apa yang anda ketahui tentang basis massa partai Golkar?</p> <p>3. Bagaimana karakteristik massa Partai Golkar?</p> <p>4. Apakah ada perbedaan basis massa Partai Golkar antara masa orde baru dan reformasi?</p> <p>5. Bagaimana Partai Golkar Mengidentifikasi golongan Massa Partai Golkar?</p> <p>6. Bagaimana karakteristik massa Partai Golkar di Jawa Tengah?</p> <p>7. Pada pemilu 2014 berapa jumlah pemilih yang memilih Partai Golkar di Jawa Tengah?</p> <p>8. Bagaimana usaha yang dilakukan Partai Golkar untuk menjaga konstituen yang telah memilih tersebut?</p>		

			<ol style="list-style-type: none">9. Bagaimana strategi Golkar dalam mempertahankan massa partai Golkar?10. Bagaimana Golkar mengakomodasi aspirasi massa Partai?11. Bagaimana rekrutmen politik yang dilakukan oleh Partai Golkar?12. Apakah AMPI membantu dalam pola kaderisasi Partai Golkar?13. Sejauh mana peran AMPI dalam membantu Golkar untuk memeberikan pendidikan politik pada masyarakat?14. Bagaimana pendidikan politik yang dilakukan partai Golkar?15. Bagaiamana keterlibatan AMPI dalam memeberikan pendidikan politik untuk partai Golkar?16. Bagaimana pembinaan Partai Golkar terhadap organisasi sayap atau ormas partai?17. Bagaimana AMPI membantu Golkar dalam menyerap aspirasi rakyat?18. Bagaimana pola pembinaan Golkar terhadap AMPI?		
--	--	--	---	--	--

<p>Kontribusi AMPI terhadap Penguatan Basis Massa Partai Golkar</p>	<p>Upaya AMPI dalam Penguatan Basis Massa Partai Golkar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana upaya Partai Golkar dalam mempertahankan basis massanya di Jawa Tengah? 2. Apa saja bentuk upaya nyata yang telah dilakukan Partai Golkar dalam menjaga eksistensi massa Partai Golkar? 3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menarik massa yang belum menjadi pemilih partai Golkar? 4. Bagaimana keuntungan adanya AMPI bagi Partai Golkar? 5. Bagaimana pola rekrutmen partai Golkar dari pengurus AMPI? 6. Apakah ada pertimbangan untuk alumni atau pengurus AMPI dalam mengisi calon jabatan publik? 7. Apa arti penting AMPI bagi Partai Golkar? 8. Bagaimana Partai Golkar membantu AMPI dalam mewadahi kepemudaan? 9. Bagaimana kontribusi AMPI dalam penguatan basis massa partai? 10. Menurut saudara, 		
---	---	---	--	--

			<p>bagaimana efektivitas AMPI dalam memeperluas lumbung suara Partai Golkar?</p> <p>11. Se jauh mana peran kedua organisasi tersebut bagi Partai Golkar dalam menyplai kader muda Partai Golkar?</p>		
		<p>Hambatan dalam Penguatan Basis Massa Partai Golkar</p>	<p>1. Bagaimana hambatan yang dihadapi Partai Golkar dalam berhubungan dengan konstituennya?</p> <p>2. Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh Partai Golkar dalam penguatan basis massa?</p> <p>3. Bagaimana kesulitan dan tantangan memperluas basis massa partai di Jawa Tengah?</p> <p>4. Bagaimana pengawasan yang dilakukan Partai Golkar terhadap AMPI?</p> <p>5. Bagaimana hambatan Partai Golkar dalam berhubungan dengan AMPI?</p> <p>6. Bagaimana Peran Partai dalam mensinergikan seluruh elemen Ormas dan Organisasi sayap Partai Golkar?</p> <p>7. Bagaimana upaya Partai Golkar dalam membantu AMPI untuk mengembangkan organisasi?</p> <p>8. Bagaimana upaya yang</p>		

			dilakukan Partai Golkar untuk mengatasi semua hambatan tersebut?		
--	--	--	--	--	--

Pedoman Wawancara Untuk Pengurus AMPI

Identitas Responden.

Nama :

Umur :

Jabatan :

1. Sejauh mana anda mengetahui organisasi kepemudaan AMPI?
2. Kapan organisasi AMPI ini mulai berdiri?
3. apa visi dan misi AMPI ?
4. bagaimana sejarah berdirinya AMPI?
5. Apa tujuan didirikannya AMPI?
6. apa saja program kerja dari AMPI?
7. Berapakah jumlah anggota AMPI saat ini di DPD AMPI Jateng?
8. Bagaimana pendanaan AMPI?
9. Apakah syarat-syarat untuk menjadi anggota AMPI?
10. Bagaimana pola kaderisasi di dalam AMPI?
11. Bagaimana hubungan AMPI dengan Partai Golkar?
12. Bagaimana kontribusi AMPI dalam menghasilkan kader untuk Partai Golkar?
13. Apakah keuntungan bagi anggota AMPI yang akan maju dalam mencalonkan diri dari Partai Golkar?
14. Apakah ada anggota AMPI yang menjadi pengurus Partai Golkar?
15. Apakah ada anggota AMPI yang menjadi anggota DPR atau DPRD?
16. Bagaimana peran AMPI dalam menampung aspirasi untuk Partai Golkar?
17. Bagaimana peran AMPI bagi Partai Golkar?
18. Pada pemilu 2014, bagaimana usaha yang dilakukan AMPI untuk menguatkan massa Partai Golkar?
19. Apakah ada pengurus atau alumni AMPI Jateng yang menjadi pengurus Partai Golkar baik di daerah maupun di pusat?
20. Apakah ada bantuan baik moril maupun materil dari Partai Golkar?
21. Jika ada bantuan dari Partai Golkar, bagaimana bentuk bantuan tersebut?

22. Bagaimana peran AMPI dalam membangun pola kaderisasi bagi Partai Golkar?
23. Apa yang saudara ketahui tentang basis massa partai?
24. Apa yang saudara pahami tentang basis massa Partai Golkar?
25. Apakah perbedaan basis massa partai Golkar pada masa orde baru dan reformasi?
26. Bagaimana basis massa Partai Golkar di Jawa Tengah?
27. Bagaimana hubungan AMPI dengan basis massa Partai Golkar?
28. Bagaimana basis massa kepemudaan Partai Golkar? Bagaimana AMPI mengelola basis kepemudaan Partai Golkar?
29. Sebagai organisasi kepemudaan Golkar bagaimana strategi AMPI dalam mewadahi pemuda untuk terlibat dalam dunia politik?
30. Bagaimana AMPI berhubungan dengan basis massa Partai Golkar selain pemuda?
31. Apa perbedaan hubungan AMPI dalam hubungannya dengan kepemudaan?
32. Bagaimana hubungan AMPI dengan ormas Partai Golkar yang lain?
33. Apa yang akan dilakukan AMPI dalam menguatkan basis massa Partai Golkar?
34. Bagaimana strategi AMPI dalam mengelola basis massa Golkar di Jawa Tengah?
35. Bagaimana kontribusi AMPI dalam Penguatan basis massa partai Golkar di Jawa Tengah?
36. Bagaimana bentuk nyata kontribusi AMPI untuk Partai Golkar?
37. Apakah AMPI melakukan pendidikan politik terhadap basis massa partai Golkar?
38. Bagaimana menjaga konstituen Partai Golkar yang selama ini menjadi pemilih partai Golkar?
39. Bagaimana melakukan perluasan kuantitas basis massa yang selama ini belum tersentuh oleh AMPI?
40. Apakah ada kewajiban setiap anggota AMPI untuk membuat jaringan ke konstituen?

41. Bagaimana strategi politik AMPI dalam memasarkan Partai Golkar di basis massa?
42. Bagaimana hubungan AMPI di tingkat Provinsi dengan AMPI di tingkat kabupaten/kota?
43. Apakah setiap koordinasi dengan pengurus kabupaten/kota ada agenda khusus yang membahas berkaitan dengan konstituen Partai Golkar?
44. Untuk kedepan bagaimana rencana yang akan dibangun untuk menguatkan basis massa Partai Golkar?
45. Bagaimana kerjasama AMPI dengan ormas Golkar maupun organisasi sayap lainnya untuk menguatkan Golkar di akar rumput?
46. Dalam menjalankan organisasi ini apa saja hambatan yang dihadapi?
47. Bagaimana merekatkan antar anggota dalam mencapai tujuan untuk Partai Golkar?
48. Dalam melaksanakan program kerja apa hambatan yang dihadapi?
49. Bagaimana kesulitan yang dihadapi dalam berkoordinasi dengan pengurus AMPI di daerah kabupaten/kota?
50. Bagaimana hambatan AMPI dalam mengelola basis massa Partai Golkar?
51. Bagaimana hambatan AMPI dalam komunikasi dengan para pemuda?
52. Bagaimana peluang dan tantangan AMPI dalam menguatkan basis massa Partai Golkar?
53. Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam penguatan basis massa Partai Golkar?
54. Bagaimana upaya yang dilakukan AMPI dalam mengatasi hambatan tersebut?
55. Bagaimana peran Partai Golkar dalam membantu menghadapi berbagai masalah tersebut?

Pedoman Wawancara Untuk Pengurus DPD Partai Golkar Jawa Tengah

Identitas Responden

Nama :

Umur :

Jabatan :

1. Bagaimana hubungan AMPI dengan Partai Golkar?
2. Apakah ada anggota AMPI yang menjadi pengurus Partai Golkar?
3. Bagaimana kontribusi AMPI dalam menghasilkan kader untuk Partai Golkar?
4. Apakah keuntungan bagi anggota AMPI yang akan maju dalam mencalonkan diri dari Partai Golkar?
5. Apakah ada anggota AMPI yang menjadi anggota DPR atau DPRD?
6. Bagaimana peran AMPI dalam menampung aspirasi untuk Partai Golkar?
7. Bagaimana peran AMPI bagi Partai Golkar?
8. Pada pemilu 2014 yang lalu, bagaimana usaha yang dilakukan AMPI untuk menguatkan massa Partai Golkar?
9. Apakah ada pengurus atau alumni AMPI Jateng yang menjadi pengurus Partai Golkar baik di daerah maupun di pusat?
10. Apakah keuntungan bagi anggota AMPI yang akan maju dalam mencalonkan diri dari Partai Golkar?
11. Apakah ada bantuan baik moril maupun materil dari Partai Golkar untuk kedua organisasi tersebut?
12. Jika ada bantuan dari Partai Golkar, bagaimana bentuk bantuan tersebut?
13. Bagaimana peran AMPI dalam membangun pola kaderisasi bagi Partai Golkar?
14. Apakah yang saudara ketahui tentang basis massa partai?
15. Apa yang anda ketahui tentang basis massa partai Golkar?
16. Bagaimana karakteristik massa Partai Golkar?
17. Bagaimana Partai Golkar Mengidentifikasi golongan Massa Partai Golkar?

18. Apakah ada perbedaan basis massa Partai Golkar antara masa orde baru dan reformasi?
19. Bagaimana karakteristik massa Partai Golkar di Jawa Tengah?
20. Pada pemilu 2014 berapa jumlah pemilih yang memilih Partai Golkar di Jawa Tengah?
21. Bagaimana usaha yang dilakukan Partai Golkar untuk menjaga konstituen yang telah memilih tersebut?
22. Bagaimana strategi Golkar dalam mempertahankan massa partai Golkar?
23. Bagaimana Golkar mengakomodasi aspirasi massa Partai?
24. rekrutmen politik yang dilakukan oleh Partai Golkar?
25. Apakah AMPI membantu dalam pola kaderisasi Partai Golkar?
26. Sejauh mana peran AMPI dalam membantu Golkar untuk memeberikan pendidikan politik pada masyarakat?
27. Bagaimana pendidikan politik yang dilakukan partai Golkar?
28. Bagaimana keterlibatan AMPI dalam memberikan pendidikan politik untuk partai Golkar?
29. Bagaimana pembinaan Partai Golkar terhadap organisasi sayap atau ormas partai?
30. Bagaimana AMPI membantu Golkar dalam menyerap aspirasi rakyat?
31. Bagaimana pola pembinaan Golkar terhadap AMPI?
32. Bagaimana upaya Partai Golkar dalam mempertahankan basis massanya di Jawa Tengah?
33. Apa saja bentuk upaya nyata yang telah dilakukan Partai Golkar dalam menjaga eksistensi massa Partai Golkar?
34. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menarik massa yang belum menjadi pemilih partai Golkar?
35. Bagaimana keuntungan adanya AMPI bagi Partai Golkar?
36. Bagaimana pola rekrutmen partai Golkar dari pengurus AMPI?
37. Apakah ada pertimbangan untuk alumni atau pengurus AMPI dalam mengisi calon jabatan publik?
38. Apa arti penting AMPI bagi Partai Golkar?

39. Bagaimana Partai Golkar membatu AMPI dalam mewadahi kepemudaan?
40. Bagaimana kontribusi AMPI dalam penguatan basis massa partai?
41. Menurut saudara, bagaimana efektivitas AMPI dalam memperluas lumbung suara Partai Golkar?
42. Sejauh mana peran kedua organisasi tersebut bagi Partai Golkar dalam menyplai kader muda Partai Golkar?
43. Bagaimana hambatan yang dihadapi Partai Golkar dalam berhubungan dengan konstituennya?
44. Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh Partai Golkar dalam penguatan basis massa?
45. Bagaimana kesulitan dan tantangan memperluas basis massa partai di Jawa Tengah?
46. Bagaimana pengawasan yang dilakukan Partai Golkar terhadap AMPI?
47. Bagaimana hambatan Partai Golkar dalam berhubungan dengan AMPI?
48. Bagaimana Peran Partai dalam mensinergikan seluruh elemen Ormas dan Organisasi sayap Partai Golkar?
49. Bagaimana upaya Partai Golkar dalam membantu AMPI untuk mengembangkan organisasi?
50. Bagaimana upaya yang dilakukan Partai Golkar untuk mengatasi semua hambatan tersebut?

Pedoman Studi Dokumentasi

A. Studi Dokumentasi Pada DPD AMPI Jawa Tengah

1. Studi dokumentasi pada anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) Organisasi Kepemudaan AMPI.
2. Melakukan studi dokumentasi pada Visi dan Misi kepengurusan AMPI.
3. Melakukan studi dokumentasi pada struktur kelembagaan AMPI.
4. Melakukan studi dokumentasi pada laporan pertanggung jawaban kegiatan AMPI.
5. Melakukan studi dokumentasi (foto) pada saat penelitian.

B. Studi Dokumentasi Pada DPD Partai Golkar Jawa Tengah

1. Studi dokumentasi pada anggaran dasar (AD) dan Anggaran Rumah tangga (ART) Partai Golkar.
2. Studi dokumentasi pada struktur kelembagaan Partai Golkar.
3. Studi dokumentasi pada laporan pertanggungjawaban kegiatan Partai Golkar.
4. Melakukan dokumentasi (foto) pada saat penelitian.



DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI GOLONGAN KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH

Sekretariat : Jl. Kyai Saleh No. 1 Semarang Kode Pos 50231
Telp. (024) 8311866, 8315518 Fax. (024) 8411975 @mail : golkarjateng@yahoo.com

SURAT – KETERANGAN

Nomor : B. 2 / GOLKAR I/VII/2015

Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ulul Mukmin
NIM : 3301411135
Mahasiswa : Universitas Negeri Semarang
Fakultas : Ilmu Sosial
Jurusan : S1 – PKn

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan observasi dan penelitian di DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penyelesaian tugas Skripsi dengan judul Kontribusi Organisasi Kepemudaan AMPI dan AMPG Dalam Penguatan Basiss Massa Partai Golkar Di Jawa Tengah.

Demikian kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 10 Juli 2015

DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLKAR
PROVINSI JAWA TENGAH

Nakil Sekretaris,

Muhammad Saleh, ST

Tembusan :

1. Ketua DPD Partai Golkar Prov.Jateng (sbg laporan).
2. Arsip.



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
ANGKATAN MUDA PEMBAHARUAN INDONESIA (AMPI)
PROVINSI JAWA TENGAH**

*Sekretariat : Kompleks DPD Partai Golkar Jawa Tengah
Jl. Kyai Saleh No. 1 Semarang kode pos 50231*

SURAT KETERANGAN

No.001/SKet/AMPI/VII/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Maki Condro Negoro, S.H.
Jabatan : Sekretaris DPD AMPI Jawa Tengah
Alamat : Semarang

Menerangkan bahwa

Nama : Ulul Mukmin
NIM : 3301411135
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Semarang
Fakultas : Ilmu Sosial
Program studi : PPKn

Mahasiswa tersebut telah selesai melakukan penelitian dilingkungan Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Jawa Tengah pada bulan Mei 2015 sampai bulan Juni 2015 guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian Skripsi yang berjudul "***Kontribusi Organisasi Kepemudaan AMPI dan AMPG Dalam Penguatan Basis Massa Partai Golkar di Jawa Tengah***".

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 25 Juni 2015

An. Ketua DPD AMPI Jawa Tengah
Sekretaris DPD AMPI Jawa Tengah



Maki Condro Negoro, S.H.
Maki Condro Negoro, S.H.



DEWAN PIMPINAN PUSAT ANGKATAN MUDA PEMBAHARUAN INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : KEP- 040 /K/DPP-AMPI/04/2011.

Tentang

**PENGESAHAN KOMPOSISI DAN PERSONALIA DEWAN PENASEHAT
SERTA DEWAN PIMPINAN DAERAH
ANGKATAN MUDA PEMBAHARUAN INDONESIA
PROVINSI JAWA TENGAH MASA BAKTI 2011 - 2016**

DEWAN PIMPINAN PUSAT ANGKATAN MUDA PEMBAHARUAN INDONESIA

- Menimbang** :: a. bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia, BAB VIII Pasal 15, maka Masa Bakti kesatuan organisasi Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia pada semua tingkatan adalah selama 5 (lima) tahun;
- b. bahwa sebagaimana yang diamanatkan dalam Anggaran Rumah Tangga Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia Pasal 6, bahwa Musyawarah Daerah (MUSDA) Provinsi diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia, Pasal 17 ayat (2) huruf d, tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia adalah menjadi wewenang Dewan Pimpinan Pusat Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia;
- d. bahwa oleh karena itu, perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Penasehat serta Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia Provinsi JAWA TENGAH Masa Bakti 2011-2016.
- Mengingat** : 1. Keputusan MUNAS VII AMPI Nomor : KEP- VI /MUNAS-VII/AMPI/2010 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia.
2. Keputusan MUNAS VII AMPI Nomor : KEP- VII /MUNAS-VII/AMPI/ 2010 tentang Program Umum Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia.
3. Keputusan MUNAS VII AMPI Nomor : KEP- VIII /MUNAS-VII/AMPI/ 2010 tentang Pokok-Pokok Pikiran dan Pernyataan Sikap Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia.

4. Keputusan MUNAS VII AMPI Nomor : KEP- XIII /MUNAS-VII/AMPI/2010 tentang Komposisi dan Personalia Dewan Penasehat dan Dewan Pimpinan Pusat Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia.
5. Keputusan DPP AMPI Nomor : PO- 001 /DPP-AMPI/03/2010 tanggal 20 Maret 2010, Peraturan Organisasi tentang Musyawarah dan Rapat-Rapat Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia.
6. Keputusan DPP AMPI, Nomor : JUKLAK- 001 /DPP-AMPI/03/2010 tanggal 20 Maret 2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Musyawarah Daerah Provinsi, Musyawarah Daerah Kabupaten / Kota dan Musyawarah Rayon dan Musyawarah Sub Rayon Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia.
7. Keputusan DPP AMPI Nomor : KEP- 001 /DPP-AMPI/03/2010 tanggal 20 Maret 2010 tentang Tata Kerja Dewan Pimpinan Pusat Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia Masa Bakti 2010 - 2015.
8. Keputusan RAKERNAS AMPI Tahun 2010, Nomor : I / RAKERNAS/AMPI/2010 tentang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia.
9. Surat Mandat DPP AMPI Nomor : MDT- 369 /DPP-AMPI/01/2011 tanggal 4 Februari 2011 tentang Mandat Penuh DPP AMPI untuk menghadiri sebagai Peserta, Pimpinan Sidang dan Formatur MUSDA VII DPD AMPI Provinsi JAWA TENGAH pada tanggal 5 - 6 Februari 2011 di Hotel Citra Dewi III, Jl. Gintungan Bandung, Kab. Semarang. Provinsi JAWA TENGAH.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan DPP AMPI, Nomor : KEP- 42 /DPP-AMPI/12/2007 tanggal 14 Desember 2007 tentang Pengesahan Pergantian Antar Waktu (PAW) Komposisi dan Personalia Dewan Penasehat dan Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia Propinsi JAWA TENGAH masa bhakti 2005 - 2010.
 2. Pelaksanaan Musyawarah Daerah VII Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (MUSDA VII DPD AMPI) Provinsi JAWA TENGAH dan Keputusan MUSDA VII AMPI tersebut di Kab. Semarang pada tanggal 5 - 6 Februari 2011 tentang Penetapan Komposisi dan Personalia Dewan Penasehat dan Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia Provinsi JAWA TENGAH masa bakti 2011 - 2016.
 3. Surat Formatur MUSDA VII AMPI Provinsi JAWA TENGAH, Nomor : 005/AMPI-JTG/B/III/2011 tanggal 25 Maret 2011 tentang Permohonan Pengesahan SK Komposisi dan Personalia Dewan Penasehat serta DPD AMPI Provinsi JAWA TENGAH Masa Bakti 2011 - 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT ANGKATAN MUDA PEMBAHARUAN INDONESIA TENTANG PENGESAHAN KOMPOSISI DAN PERSONALIA DEWAN PENASEHAT SERTA DEWAN PIMPINAN DAERAH ANGKATAN MUDA PEMBAHARUAN INDONESIA PROVINSI JAWA TENGAH MASA BAKTI 2011 - 2016.**

Handwritten initials/signature

PERTAMA : Mengesahkan Komposisi dan Personalia DEWAN PENASEHAT DEWAN PIMPINAN DAERAH Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia Provinsi JAWA TENGAH Masa Bakti 2011 – 2016, sebagai berikut :

- I. **Ketua** : **H. WISNU SUHARDONO, SE**
 Wakil Ketua : - BAMBANG R. SUGOMO
 - H. BAMBANG RAYA SAPUTRA, MBA
 - DR. HM. IQBAL WIBISONO, SH., M.Hum
 - FIRMAN SUBAGYO
 - BAMBANG SOESATYO
 - DR. H. NOOR ACHMAD, MA
 - H. PETIT WIDIATMOKO, ST
 - M. SHOLEH, ST
- II. **Sekretaris** : **AGUNG WIDYANTORO SH., MH**
 Wakil Sekretaris : - EKO ARIYANTO
 - AGUNG PRIYAMBODO, SE
- III. **Anggota-anggota** : 1. M. RIF'AN, SE, MM
 2. Hj. RA. KUSDILAH, SH
 3. ENDRO HARYANTO, S.Sos
 4. DRS. SENO BAYU AJI
 5. R. HARRY WIBOWO, SH, M.Hum, M.Si
 6. UNTUNG BUDIARSO
 7. JOHNY DH
 8. CHARLES DAHE PANE, SH

KEDUA : Mengesahkan Komposisi dan Personalia DEWAN PIMPINAN DAERAH Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia Provinsi JAWA TENGAH Masa Bakti 2011–2016, sebagai berikut :

- I. **Ketua** : **AMINULLAH YUNUS**
- II. 1. Wakil Ketua Bidang Organisasi, Pembinaan Wilayah & Kelembagaan
 - **FERRY WAWAN CAHYONO, S.Pi**
 2. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan :
 - **SRIYONO, SS. M.Si**
 3. Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM :
 - **ARI TRIDOYO, SH**
 4. Wakil Ketua Bidang Kerokhanian :
 - **WIJANARTO**
 5. Wakil Ketua Bidang Pelajar, Mahasiswa & Tenaga Kerja Muda :
 - **NAVIS MUNANDAR**
 6. Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan :
 - **AYU HANDAYANING WIDOWATI, S.Pd**
 7. Wakil Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup :
 - **DIDIEK SUDARMADI S. SE**
 8. Wakil Ketua Bidang Seni, Budaya dan Pariwisata :
 - **RIMA KUSUMAWATI PRASETYANINGRUM, SH., MM**
 9. Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Olahraga :
 - **SUYADI, S.Pdi**
 10. Wakil Ketua Bidang KESOS dan Pengabdian Masyarakat :
 - **ALI MARTIN**

l

HFT
S/V

11. Wakil Ketua Bidang Koperasi, UKM & Pengembangan Investasi
- **SUHANTORO, SE. Akt**
12. Wakil Ketua Bidang Pertanian, Perikanan dan Agribisnis :
- **BUDI SITEPU**
13. Wakil Ketua Bidang Politik dan Kajian Strategis :
- **SONI WASONO NUGROHO, SH**
14. Wakil Ketua Bidang HANKAM dan Daerah Tertinggal :
- **TEGUH WAHID TURMUDI, SH**
15. Wakil Ketua Bidang SDM, Perdagangan dan Perindustrian :
- **S U W A R N O**
16. Wakil Ketua Bidang IPTEK dan KOMINFO :
- **TEGUH WALUYO, ST**

III. Sekretaris : **M. MAKI CONDRU, SH**

- IV. 1. Wakil Sekretaris Bidang Organisasi, Pembinaan Wilayah & Kelembagaan : - **SISWANTO, S.Pd**
2. Wakil Sekretaris Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan :
- **KHOIRUL ANAM**
3. Wakil Sekretaris Bidang Hukum dan HAM :
- **ANDRI WIJAYA LAKSANA, SH**
4. Wakil Sekretaris Bidang Kerokhanian :
- **SUBHAN RIQO'I**
5. Wakil Sekretaris Bidang Pelajar, Mahasiswa & Naker Muda :
- **NURUL HUDA, SHi**
6. Wakil Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan :
- **FARIDA DEWI KUSUMANDARI**
7. Wakil Sekretaris Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup :
- **NUR AHFID BADRUTTAMAM**
8. Wakil Sekretaris Bidang Seni, Budaya dan Pariwisata :
- **KUAT HERMAWAN SANTOSO**
9. Wakil Sekretaris Bidang Pendidikan dan Olahraga :
- **MUHAMMAD ZULFA**
10. Wakil Sekretaris Bidang KESOS dan Pengabdian Masyarakat :
- **HENRY UMAR LIMUTU PAKAYA**
11. Wakil Sekretaris Bidang Koperasi, UKM & Pengembangan Investasi : - **NGASIRAN, SE. Akt**
12. Wakil Sekretaris Bidang Pertanian, Perikanan dan Agribisnis :
- ~~RIAT~~ **DIAN NURCHAYATI, SH.**
13. Wakil Sekretaris Bidang Politik dan Kajian Strategis :
- **AGUS HADOYO, SP. MM**
14. Wakil Sekretaris Bidang HANKAM dan Daerah Tertinggal :
- **INDRA SUSETYO**
15. Wakil Sekretaris Bidang SDM, Perdagangan dan Perindustrian :
- **BUDI PRASETYO**
16. Wakil Sekretaris Bidang IPTEK dan KOMINFO :
- **ZIKO TRI ARDIANTO SUSENO PUTRA**

HA
SH

V. Bendahara : **ARINING TRIDOYO, SH**

VI. Wakil Bendahara :

1. HESTI PUSPITASARI, SH
2. HANI HABSARI, ST
3. ERNI YULIANDA, S.Sos. MM
4. HERLIN MARIYANA, SE
5. FERRY YUDHA ADHY DHARMA R
6. KRISMAWAN
7. NILA SEPTIANI, AMD
8. AHMAD IRCHAM CHOLID, SSTP. MH
9. IRWAN SYAH DJOHA
10. SAIFUDIN IQDOM
11. DIAN ARBIYANTO, SE
12. ANISAH, SH

VII. BIRO – BIRO :

1. **BIRO ORGANISASI, PEMBINAAN WILAYAH DAN KELEMBAGAAN :**

- A. WENDI ANDRIYANTO, SE
- B. DIKI SETIYANA DANU SAPUTRA
- C. TEGUH DWIYONO, S.Pd
- D. MUHAMMAD AGUNG

2. **BIRO KADERISASI DAN KEANGGOTAAN :**

- A. M. MAGHFUR
- B. AGUS KHANIF
- C. SONI HARTONO
- D. IKA FITRIANI
- E. ADITYA PRASETYO

3. **BIRO HUKUM DAN HAM :**

- A. PRAJAWAN DODY, SH
- B. ANDIKA YULI RIMBAWAN, SH
- C. ABDUL MALIK
- D. F I R M A N
- E. PUTUT HERIYANTO, SH

4. **BIRO KEROKHANIAN :**

- A. W A H I D
- B. ANJAR WIDIYASMOKO
- C. ULIL MAR'ATISSOLIKHAH
- D. ROSYID ALI IDRIS
- E. PONCO AGUNG WIJAYANTO, SE

5. **BIRO PELAJAR, MAHASISWA DAN TENAGA KERJA MUDA :**

- A. SULHUL HABIB AHMAD
- B. R. BAYU EKA PRASETYA
- C. MUHAMMAD WAHYUDI
- D. KRISTIANA DEWI
- E. AJI HENDRA GAUTAMA

Handwritten signature/initials.

6. **BIRO PEMBERDAYAAN PEREMPUAN :**

- A. ATIK KUSMIATI
- B. MASROHATUN
- C. QOROTUL A'EN
- D. UMI SYAIDAH
- E. AGASTYA HALAWATI

7. **BIRO KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP :**

- A. PUJIANTO, SHi
- B. SITI FATIMAH
- C. M. SOFYAN AL NASHR
- D. JUNIETA
- E. ELISA

8. **BIRO SENI, BUDAYA DAN PARIWISATA :**

- A. OKTA SOFI
- B. ZAENAL ARIFIN
- C. YUNI LESTARI
- D. MUHAMMAD PRIONDARU

9. **BIRO PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA :**

- A. ME SUCIPTO, S.Pd
- B. ASEP CUWANTORO
- C. A. SAEFUDIN ZUHRI
- D. MUKHTAR
- E. CITRA AYU P.

10. **BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PENGABDIAN MASYARAKAT :**

- A. ADI JOKO PURWANTO
- B. DIDIK TRI ATMAJI
- C. GALIH PUTRI PERMADI
- D. FAFI ROHMATILLAH
- E. ZAENUR ROCHIM, SE

11. **BIRO KOPERASI, UKM DAN PENGEMBANGAN INVESTASI :**

- A. ZAENUDIN AFFANDI, SE
- B. LUKI SETYA AJI
- C. ABDUL AZIZ
- D. LUKMAN BURHAN
- E. RIZKY AMALIA, ST

12. **BIRO PERTANIAN, PERIKANAN DAN AGRIBISNIS :**

- A. AHMAD ZAENAL ARIFIN, SHi, SH
- B. IQBAL AL HUSNI
- C. SUROSO
- D. SUPARNGATNO
- E. SUKAMTO

6

6

13. BIRO POLITIK DAN KAJIAN STRATEGIS :

- A. SUGIJEN
- B. SUDARGONO
- C. KHOIRIYAH
- D. AYU
- E. RIZAL

14. BIRO HANKAM DAN DAERAH TERTINGGAL :

- A. ADI IMAM WICAKSONO
- B. ABDULLAH HADIK
- C. MUHAMMAD NUR ESA
- D. FATHUDDIN
- E. NUR HIKMAWATI

15. BIRO SDM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN :

- A. WISNU
- B. AGUNG WAHONO
- C. MUHAMMAD SYAIFUDIN, SE
- D. EMA NURUL FARIDA
- E. MUKAHAR

16. BIRO IPTEK DAN KOMINFO :

- A. WHELLI SUMEKTO
- B. BAKHTIAR KAERONI WIBOWO
- C. MUHYARI
- D. AHMAD MUNIF
- E. TRI UTOMO WAHYU WIDODO

KETIGA : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan DPP AMPI, Nomor : KEP- 42 /DPP-AMPI/12/2007 tanggal 14 Desember 2007 tentang Pengesahan Pergantian Antar Waktu (PAW) Komposisi dan Personalia Dewan Penasehat dan Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia Propinsi JAWA TENGAH masa bhakti 2005 – 2010 **dinyatakan TIDAK BERLAKU LAGI**;

KEEMPAT : Dewan Penasehat DPD AMPI Provinsi merupakan Badan yang bersifat kolektif dan bertugas memberikan petunjuk, pertimbangan, saran dan nasehat kepada Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia;

KELIMA : Dewan Pimpinan Daerah AMPI Provinsi, merupakan Badan Pelaksana yang bersifat kolektif dan mempunyai wewenang dan tugas serta kewajiban sesuai yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA.
PADA TANGGAL : 11 APRIL 2011.

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
 ANGKATAN MUDA PEMBAHARUAN INDONESIA**

KETUA UMUM,

DAVE A.F. LAKSONO



SEKRETARIS JENDERAL,

WENDHY N. TUSWANDI

Tembusan :

1. Yth. **Bapak Ir. H. Aburizal Bakrie**, Ketua Dewan Penasehat DPP AMPI (sbg. laporan).
2. Yth. Bapak Gubernur Provinsi JAWA TENGAH.
3. Yth. Bapak Ketua DPD Partai GOLKAR Provinsi JAWA TENGAH.
4. Yth. Sdr. Ketua DPD AMPI Kab. / Kota se- Provinsi JAWA TENGAH.
5. Arsip.

Handwritten initials/signature



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Gedung C7 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229
Telp./Fax (024) 8508006, E-mail : Fis @ unnes.ac.id, Website : fis unnes.ac.id

Nomor : 3871/UN37.1.3/LT/2015
Lamp. : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

15 MAY 2015

Yth. Pengurus DPD Partai Golkar Jateng
di

Semarang

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon Ijin Penelitian untuk penyusunan skripsi oleh mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Ulul Mukmin
NIM : 3301411135
Semester : VIII (delapan)
Jurusan : Politik dan Kewarganegaraan
Prodi/Jenjang : PPKn (S1)
Judul Skripsi : Kontribusi Organisasi Kepemudaan AMPI dan AMPG Dalam Penguatan Basis Massa Partai Golkar Di Jawa Tengah
Alokasi Waktu : Mei s.d Juli 2015

Mohon perkenan Saudara dapat mengizinkan mahasiswa dimaksud untuk memperoleh informasi data Penelitian di Instansi/lembaga yang Saudara Pimpin.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Dekan
 2. Ketua Jurusan PKN
 3. Mahasiswa yang bersangkutan
- FIS UNNES



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Gedung C7 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229
Telp./Fax (024) 8508006, E-mail : Fis @ unnes.ac.id, Website : fis.unnes.ac.id

Nomor : 3869/UN37.1.3/LT/2015
Lamp. : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

15 MAY 2015

Yth. Pengurus DPD AMPI Jateng
di

Semarang

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon Ijin Penelitian untuk penyusunan skripsi oleh mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Ulul Mukmin
NIM : 3301411135
Semester : VIII (delapan)
Jurusan : Politik dan Kewarganegaraan
Prodi/Jenjang : PPKn (S1)
Judul Skripsi : Kontribusi Organisasi Kepemudaan AMPI dan AMPG Dalam Penguatan Basis Massa Partai Golkar Di Jawa Tengah
Alokasi Waktu : Mei s.d Juli 2015

Mohon perkenan Saudara dapat mengizinkan mahasiswa dimaksud untuk memperoleh informasi data Penelitian di Instansi/lembaga yang Saudara Pimpin.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :
1. Dekan
2. Ketua Jurusan PKN
3. Mahasiswa yang bersangkutan
FIS UNNES



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Gedung C7 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229
Telp/Fax. (024) 8508006, E-mail : fis@unnes.ac.id, Website : fis.unnes.ac.id

Nomor : 1684UN37.1.3/LT/2015
Lamp : -
Hal : Permohonan Survey Awal

04 MAR 2015

Yth. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah
di
Semarang

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon Ijin Pelaksanaan Survey Awal untuk penyusunan skripsi oleh mahasiswa sebagai berikut :

Nama : ULUL MUKMIN
NIM : 3301411135
Semester : VIII (Delapan)
Prodi/Jenjang : PPKn/S1
Jurusan : Politik dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : KONTRIBUSI ORGANISASI SAYAP PARTAI GOLKAR DALAM
PENGUATAN BASIS MASSA (STUDI PADA DPD AMPI DAN
DPD AMPG JAWA TENGAH)
Alokasi Waktu : Maret-April

Mohon berkenan saudara dapat mengijinkan mahasiswa dimaksud untuk mendapatkan informasi data survey awal di Instansi/Lembaga yang saudara pimpin.

Atas perhatian dan kerjasamanya ducapkan terimakasih.



a.n Dekan
Pembantu Dekan Bid. Akademik

Dr. Eko Handoyo, M.Si
NIP. 196406081988031001

Tembusan :
1. Dekan
2. Ketua Jurusan PKN
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Gedung C7 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229
Telp/Fax: (024) 8508006, E-mail: fis@unnes.ac.id, Website: fis.unnes.ac.id

Nomor : 1625/UN37.1.3/LT/2015
Tempo : -
Hal : Permohonan Survey Awal

04 MAR 2015

Yth. Ketua DPD AMPI Jawa Tengah

di

Semarang

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon Ijin Pelaksanaan Survey Awal untuk penyusunan skripsi oleh mahasiswa sebagai berikut :

Nama : ULUI MUKMTN
NIM : 3301411135 *
Semester : VIII (Delapan)
Prodi/Jenjang : PPKn/S1
Jurusan : Politik dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : KONTRIBUSI ORGANISASI SAYAP PARTAI GOLKAR DALAM Penguatan Basis Massa (STUDI PADA DPD AMPI DAN DPD AMPG JAWA TENGAH)
Alokasi Waktu : Maret-April

Mohon berkenan saudara dapat mengizinkan mahasiswa dimaksud untuk mendapatkan informasi data survey awal di Instansi/Lembaga yang saudara pimpin.

Atas perhatian dan kerjasamanya ducapkan terimakasih

an Dekan
Pembantu Dekan Bid. Akademik
Dr. Eko Handoyo, M.Si
NIP. 1964060819880310017

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Jurusan PPKn
3. Mahasiswa yang bersangkutan

